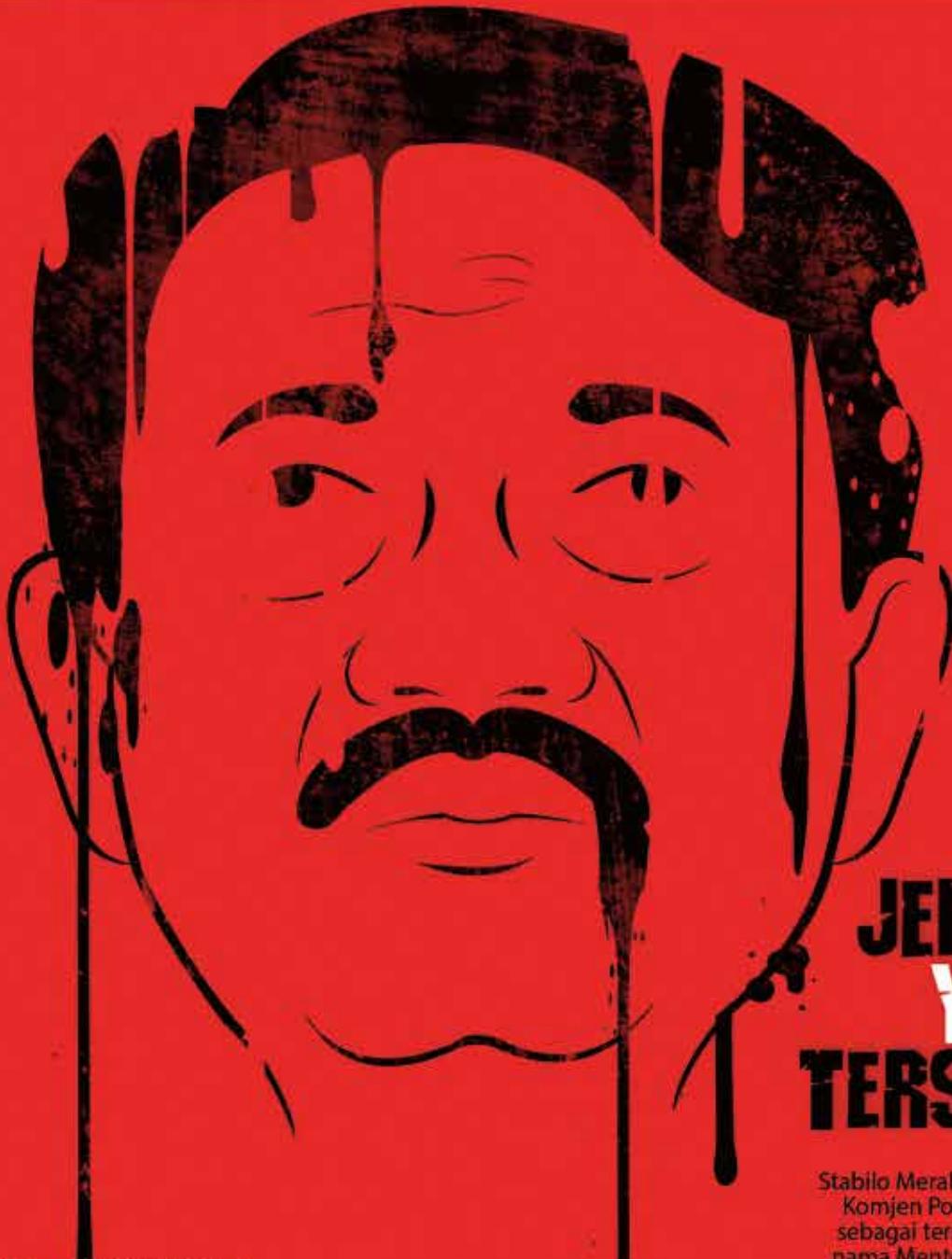


AKTUAL

Edisi 30 | 20-31 Januari 2015



JENDERAL YANG TERSANDERA

Stabilo Merah KPK membuat Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Masih ada sejumlah nama Menteri yang mendapat cap yang sama. Siapa berikutnya?

Rp 30.000

ISSN 2337-8395





YOU CAN COLLECT
ANY INFORMATION
EASIER AND FASTER
THAN EVER!



Klik WWW.AKTUAL.CO
untuk pemesanan
majalah Aktual versi digital

AKTUAL

PENDIRI M Danial Nafis

KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Dhia Prekasha Yoedha

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief

SEKRETARIS REDAKSI Hanny Haniffa

REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi

SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony

DIREKTUR MAJALAH Wahyu Romadhony

REDAKTUR Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito, Ismed Eka Kusuma

ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana, Fahad Hasan Thalib

STAF REDAKSI Soemitro-Deddy Kusnaedi-Moh Sahlan (Majalah), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Fadlan Syam Butho, Maulana Khamal Macharani, Mochammad Zhaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nailin In Saroh, Nicha Muslimawati, Vina Fatma Sari, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto), Warnoto (TV)

IT Radius Rasmangun, Yudi Astira

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis, WM Desangga

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Fitra Ismu (Meksiko), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmad Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Hadi Jatmika (Yogyakarta), Fajar Sodia (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikkal Kuku (Bandung), Joko Pramono (Lumajang Jatim).

PEMIMPIN PERUSAHAAN Febrianto

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin

Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkiffi

SIRKULASI Widhi Maulana

MARKETING OFFICER Bobby Ciputra

PERSONALIA Nurlaili Qadr

ALAMAT REDAKSI

PT Caprof Media Negeri

Cawang Kencana Building

1st Floor Suite 101

Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang

DKI Jakarta 13630 Indonesia

No Telp : (021) 8005520

Fax : (021) 80886466

Email : majalah@aktual.co

iklan@aktual.co

aktual.co
TERKANGAT TERPERCAYA

aktualTV

Bangsa Kasihan

Bagaimanakah kondisi Bangsa Indonesia memasuki tahun 2015 ini? Tak ada seorang pun yang mampu menggambarkan nestapa bangsa Indonesia sepuitis puisi berikut ini, kecuali Khalil Gibran, sang pujangga Lebanon ini.

Bangsa Kasihan

Oleh: Khalil Gibran

Kasihannya bangsa

*yang mengenakan pakaian yang tidak ditenunnya,
memakan roti dari gandum yang tidak ia panen,
dan meminum susu yang ia tidak memerasnya.*

Kasihannya bangsa

*yang menjadikan orang dungu sebagai pahlawan
dan menganggap penindasan penjajah sebagai hadiah.*

Kasihannya bangsa

*yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur,
sementara menyerah padanya ketika bangun.*

Kasihannya bangsa

*yang tidak pernah angkat suara
kecuali jika sedang berjalan di atas kuburan,
tidak sesumbar kecuali di reruntuhan,
dan tidak memberontak kecuali ketika lehernya sudah berada di
antara pedang dan landasan.*

Kasihannya bangsa

*yang negarawannya serigala,
filosofnya gentong nasi,
dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru.*

Kasihannya bangsa

*yang menyambut penguasa barunya dengan terompet kehormatan,
namun melepasnya dengan cacian, hanya untuk menyambut
penguasa baru lain dengan terompet lagi.*

Kasihannya bangsa

*yang orang sucinya dungu menghitung tahun-tahun berlalu,
dan orang kuatnya masih dalam gendongan.*

Kasihannya bangsa

*yang terpecah-pecah,
dan masing-masing pecahan menganggap dirinya sebagai bangsa.*

Nah, sekuat apa kata demi kata yang dituliskan Gibran untuk melukiskan Indonesia ini mampu mengusik nurani kita semua? Wallahualam bissawab. ■

Laporan Utama

24 Titik Tumpu Kinerja Jokowi Diuji

Pemerintah harap-harap cemas menjelang pembahasan rancangan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.



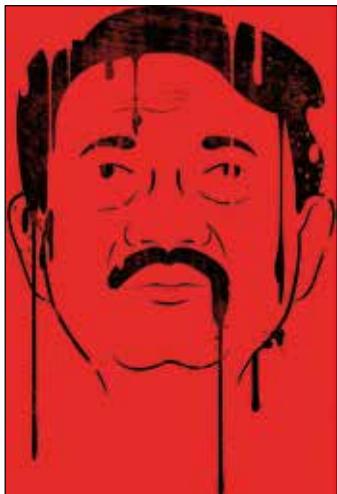
26 Dosa Konstitusional Pemerintahan Jokowi

Menjadi dosa konstitusional jika pemerintah-DPR tidak bersinergi. Pihak yang menolak bersinergi akan langsung didakwa dengan tuduhan melanggar konstitusi.



28 Sesi Drama Para Wakil Rakyat Bertopeng Kinerja

Pasca dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), publik disuguhkan drama Perseteruan Dua Kubu di Komplek Parlemen Pusat. Publik kemudian bertanya-tanya, apa saja yang dilakukan para anggota dimasa konflik tersebut?



36 HUKUM

Siapa Menyusul Budi Gunawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tiba-tiba menetapkan mantan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapoli) Komjen Pol Budi Gunawan menjadi tersangka.

10 NASIONAL

Siapa Dagang Jalur Udara

Baik atau buruk industri penerbangan di mata internasional, menurut mantan Menteri Perhubungan Budi Mulyawan Suyitno, tergantung pada Kementerian Perhubungan selaku regulator.

16 Masyarakat Menanti Tetesan Dana Desa

Sebanyak 74.045 desa di seluruh Indonesia berharap realisasi alokasi dana desa yang diamanatkan undang-undang. Dipastikan banyak rintangan sebelum sampai sasaran.

20 POLITIK

Sinyal Buruk Kongres PAN dan Demokrat

Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) siaga satu.

32 HUKUM

Dompot Buncit Raja Daerah

Publik kembali dihebohkan dengan munculnya isu transaksi mencurigakan dalam bentuk rekening gendut. Kali ini kepemilikannya bukan lagi berasal dari kalangan penegak hukum, maupun pegawai negeri sipil.

46 EKONOMI

Perang Valas Gerus Fulus

Untuk menjaga rupiah agar terus stabil, pemerintah rela melakukan beberapa kebijakan kontroversial.

50 GEOPOLITIK

Harga Minyak Global (Dipaksa) Turun, Siapa Untung?

Sangat orkestratik. Dunia kini bisa melihat dengan jernih, bagaimana bentuk Perang Dingin Baru baru saat ini: Perang Multidimensi.

52 ENERGI

Nasib Bangsa Digantung ke Pasar

Rekomendasi Tim RTKM memuluskan niat pemerintah meliberalisasi pengelolaan energi nasional sehingga nasib rakyat diombang-ambingkan pasar.

58 INTERNASIONAL

Rujuk AS - Kuba Sesudah 54 Tahun Embargo

Lewat normalisasi hubungan, Amerika Serikat dan Kuba membuka babak baru dalam hubungan kedua negara yang berbeda ideologi itu. Tetapi seberapa jauh rakyat Kuba mendapat manfaat dari perkembangan baru ini, masih harus dilihat.

62 Teror yang Merekatkan Eropa

Dalam aksi tersebut pimpinan dunia berbaur mengutuk tindakan kekerasan yang mengguncang Eropa tersebut.

3 Tatap Redaksi

5 Surat Pembaca

6 Kaki Hari

8 Lensa Aktual

14 Infografis

18 Kilas Nasional

22 Kilas Politik

44 Kilas Hukum

48 Kilas Ekonomi

56 Kilas Energi

64 Kilas Nusantara

66 Oase

Menuntut Elegansi Kehadiran Negara dalam Kasus Lapindo

Rapat Kabinet Jumat (19/12) lalu memutus pemberian “dana talangan” sebesar Rp 781 milyar pada Lapindo Brantas Inc. (Lapindo). Dana talangan bisa jadi adalah langkah solutif bagi sebagian korban, namun kita melihat keputusan itu bukan satu-satunya langkah penyelesaian kasus Lapindo yang multidimensi ini. Untuk itu, kita menuntut elegansi negara untuk memahami kompleksitas lansekap-bencana lumpur Lapindo.

Keputusan dana talangan baru menyentuh satu dimensi saja dari kasus Lapindo, yaitu “dimensi korban”. Keputusan itu hanya berlaku pada kelompok korban *cash and carry* yang sudah lama menanti terpenuhinya hak mereka. Bagi korban tersebut, dana itu adalah solusi mendesak yang tak bisa ditolak untuk segera dilakukan Pemerintah. Akan tetapi, solusi itu tidak menyentuh “dimensi pelaku”. Oleh karena itu, kita berpendapat bahwa keputusan dana talangan harus dilihat sebagai awal baru bagi penyelesaian kasus Lapindo, bukannya akhir.

Persoalan terutama dalam bencana lumpur panas Lapindo adalah ketiadaan data akurat tentang korban lumpur Lapindo. Selama ini, data korban hanya merujuk pada jumlah aset (tanah dan bangunan) dan tidak pernah memperhitungkan aspek manusia. Manusia (korban bencana) telah direduksi menjadi materi (uang “ganti-rugi”). Sampai saat ini, publik tidak pernah tahu, misalnya, berapakah jumlah *riil* korban lumpur Lapindo? Siapa sajakah mereka? Pindah kemana sajakah orang-orang itu? Bagaimana pula mereka mengatasi ketegangan antara terputus dari hunian lama dan beradaptasi di hunian baru?

Pemerintah juga perlu menyentuh aspek sosial-ekologis. Kini, kualitas air bawah tanah di sekeliling tanggul lumpur menurun drastis membuat wilayah di sekitar semburan tidak lagi bisa masuk

dalam kategori layak huni. Pembuangan lumpur ke Kali/Kanal Porong dan juga saluran air lainnya telah memperluas degradasi lingkungan sampai ke Selat Madura. Padahal, pelbagai riset ilmiah independen menemukan tingginya kandungan logam berat dalam lumpur Lapindo. Penelitian WALHI, misalnya, menemukan kandungan senyawa Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) yang berbahaya karena bersifat karsinogenik (memicu kanker) yang tidak bisa dideteksi dalam waktu dekat. Bukannya menindaklanjuti secara lebih serius, pemerintah justru meragukan dan mengabaikan temuan-temuan tersebut. Pemerintah mengingkari fakta tersebut dengan menyatakan lumpur tidak mengandung zat berbahaya. Hal ini tentunya ironi mengingat degradasi ekologi berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Data puskesmas setempat menunjukkan persoalan kesehatan di sekitar semburan meningkat serius.

Kita menyayangkan bahwa sampai kini tidak ada sanksi hukum dijatuhkan pada Lapindo yang telah secara jelas-jelas melanggar Perpres 14/2007 karena kegagalannya membayar sisa 80 persen “paling lambat sebulan sebelum masa 2 (dua) tahun habis” (Pasal 15 Ayat 2) pada para korban. Belajar dari pengalaman pemberian dana talangan pada korporasi, pemerintah harus mengoptimalkan instrumen negara, seperti BPK dan KPK, untuk melakukan audit keuangan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan uang rakyat untuk menalangi Lapindo. Pemerintah harus dapat memaksa Lapindo mengembalikan dana talangan yang diambil dari uang rakyat, karena termasuk dalam rakyat adalah para korban Lapindo!

“Dalam kasus seperti ini, negara seharusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat,” begitu pernyataan yang dilontarkan Joko Widodo di

hadapan korban Lapindo pada 29 Mei 2014 lalu. Kita melihat tidak seharusnya makna “negara hadir” dikedirikan sebatas pemberian dana talangan sebagai solusi akhir bagi kasus Lapindo. Negara juga harus hadir memberi sanksi yang setimpal bagi para pelaku kasus Lapindo. Apabila penyelesaian kasus Lapindo oleh pemerintah akhirnya mandeg pada urusan ganti-rugi semata (dengan mekanisme dana talangan), publik dapat menilai betapa amatirnya pemerintahnya. Hal semacam ini tentunya hanya akan menambah deretan praktik busuk korporasi dalam menyelesaikan masalah finansial internal mereka dengan menggunakan uang rakyat. Kedaulatan rakyat akan kembali disalahgunakan seiring dengan keputusan yang mengabaikan penegakkan hukum dalam kasus Lapindo dan bahkan membebaskan para pelakunya dari segala tanggung jawab.

Kita menuntut kehadiran negara untuk menyelesaikan kasus Lapindo secara runut dan menyeluruh. Untuk itu, kita mengajak pemerintah untuk memperluas horizon dalam melihat multidimensionalitas kasus Lapindo, bahwa lansekap-bencana lumpur Lapindo telah melampaui sebidang tanah di sekeliling semburan utama di Porong, Sidoarjo yang kini sudah menjadi lautan lumpur itu. Hanya dengan demikian, kita dapat menyaksikan elegansi kehadiran negara dalam kasus Lapindo.

Porong, 29 Desember 2014

Hendik Siregar

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

Demokrasi Akan Hancur Jika Kepemimpinan Lemah



Ketika reformasi digulirkan, terdapat optimisme yang meluas bahwa demokrasi bisa melahirkan kepemimpinan yang cocok dengan watak bangsanya. Apa yang terjadi, pendulum sejarah Indonesia hanyalah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas.

Padahal, demokrasi memang bermaksud membasmi pemerintahan otoriter, tetapi tak bisa tegak tanpa pemerintahan otoritatif. Kenyataan kini, aneka peraturan dan pembangunan tak jalan karena karena lemahnya wibawa otoritas atas gerombolan.

Memimpin demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat menjadi simpul kesadaran baru yang terpancar dari suara Wakil Presiden Jusuf Kalla (*Kompas*, 08/06.2006). Keinsyafan ini merupakan pertanda baik jika disertai pemahaman yang baik. Bahwa pemimpin yang baik tidak cukup sekadar berbudi baik dan menarik. Yang lebih penting adalah kesanggupan untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mesin politik dan pemerintahan yang bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Terlampau lama Republik ini dipimpin oleh Presiden yang "lemah". Presiden yang menegakkan wibawanya dengan personalisasi kekuasaan dan kekuatan pemaksa (*might*), bukan dengan menjalankan prinsip-prinsip negara hukum

(*right*) yang bersifat impersonal dan imparisial.

Jejak-jejak tradisi kepresidenan seperti itu masih bertahan pada watak para pemimpin negara di era reformasi: dalam kecenderungannya untuk memprioritaskan kepentingan sendiri dan pemujaan diri, dengan keengganan untuk mengembangkan wibawa sistemik dan pelayanan publik.

Tipe kepemimpinan seperti itu memang tak selaras dengan tantangan demokratisasi. Demokrasi yang memuliakan kedaulatan rakyat menghendaki kepemimpinan yang "kuat"; yakni kepemimpinan berbasis hukum dengan menjalankan amanat konstitusi.

Di sini, pemimpin negara mesti sadar bahwa demokrasi tak bisa dipisahkan dari konstitusi seperti tercermin dalam istilah "demokrasi konstitusional" (*constitutional democracy*). Istilah ini mengandung makna bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Dengan kepemimpinan yang committed terhadap konsitusi, ketaatan warga negara pada otoritas bukan sebagai ekspresi dari loyalitas dan ketakutan personal yang bersifat *ad hoc*, melainkan sebagai ekspresi dari kesadaran hukum untuk kemaslahatan bersama yang bersifat permanen.

Dalam menjalankan demokrasi konstitusional tersebut, kepresidenan merupakan institusi yang sangat

krusial. Sebagai satu-satunya pejabat negara yang dipilih langsung (secara teoritis) oleh seluruh rakyat, Presiden melambungkan harapan masyarakat bahwa amanat konstitusi itu akan diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan dan dijalankan oleh administrasi pemerintahan secara rasional.

Komitmen utama konstitusi dan kepemimpinan negara berkhidmat pada upaya untuk mengamankan dan mencari keseimbangan dalam pemenuhan tiga pokok kemaslahatan publik (public goods). Hal ini berkisar pada persoalan legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif.

Basis legitimasi dari institusi-institusi demokrasi berangkat dari asumsi bahwa institusi-institusi tersebut merepresentasikan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat secara imparial. Klaim ini bisa dipenuhi jika segala keputusan politik yang diambil secara prinsip terbuka bagi proses-proses perdebatan publik (public deliberation) secara bebas, setara dan rasional. Hanya dengan penghormatan terhadap prosedur-prosedur public deliberation seperti itulah, peraturan dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi demokratis yang mengikat semua warga, dan pemerintah bisa melaksanakannya secara benar (right) dan tanpa ragu (strong).

Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan Presiden/Wakil Presiden acapkali tak sejalan dengan legitimasi demokratis. Adakalanya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan proses-proses public deliberation, seperti dalam kasus rencana revisi Undang-Undang Perburuan dan Pencabutan SP3 Suharto. Seringkali pula tak menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh hasil public deliberation, seperti dalam penetapan anggaran pendidikan dan dalam membiarkan aksi-aksi kekerasan terhadap kebebasan sipil dan politik.

Setelah basis legitimasi diperjuangkan, kemaslahatan publik selanjutnya adalah kesejahteraan ekonomi. Demokrasi politik tak bisa

berjalan baik tanpa demokratisasi di bidang ekonomi. Pancasila sendiri mengisyaratkan, bahwa ujung pencapaian nilai-nilai ideal kebangsaan harus bermuara pada "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Negara kesejahteraan menjadi pertarungan dari kesaktian Pancasila.

Dalam 9 tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam penciptaan masyarakat yang lebih transparan dan terbuka di bidang politik. Namun capaian-capaian ini seringkali dimentahkan oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi. Dalam hal ini, Joseph E. Stiglitz (2005) punya pandangan yang menarik. "Di Indonesia orang kerap merasakan adanya konflik yang lebih intens: konflik antara kewajiban untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam sebuah sistem yang didasarkan pada aturan, dengan kewajiban moral untuk membantu kerabat dan anggota komunitas di sebuah negara yang ditandai oleh tingginya angka pengangguran, kemiskinan akut, dan ketimpangan yang mencolok. Ekonomi pasar hanya berjalan baik dalam sebuah sistem yang dipijakkan pada aturan. Dan dalam sistem yang berjalan mulus dengan kesempatan kerja penuh dan rasa keadilan sosial yang luas, kebutuhan untuk 'membantu' kerabat sangat bisa dikurangi. Masalahnya, mereka yang berada di negara berkembang diminta untuk meninggalkan 'jaring pengaman' dalam ikatan kekeluargaan dan komunal ini, padahal jaring pengaman sosial (dari rejim kesejahteraan) itu sendiri belum tercipta."

Menciptakan kesejahteraan ekonomi di negara seperti ini, Stiglitz merekomendasikan perlunya keseimbangan antara peran pemerintah dan pasar. Dalam hal ini, negara-negara berkembang harus lebih bebas dan leluasa menentukan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi mereka. Tidak ada cara tunggal dan sistem yang sempurna, seperti yang sering dikhotbahkan oleh para arsitek ekonomi di World Bank dan IMF.

Seturut dengan itu, pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk menjalankan amanat konstitusi dalam penguasaan bumi, air, udara dan kekayaan alam bagi kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara, sebagai mata-hati dan mata-nalar rakyat, harus berani mengambil sikap pro-rakyat dalam kasus eksplorasi kekayaan alam yang merugikan bangsa dan negara.

Semuanya itu merupakan prakondisi bagi terpeliharanya kebijakan ketiga: yakni identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia. Kemunculan Indonesia sebagai perwujudan dari civic nationalism (yang berbasis demokrasi konstitusional), dengan Pancasila sebagai titik-temu solidaritas kolektif-nya, mulai mendapatkan ancaman dari meruyaknya aspirasi politik identitas yang bersemangat partikularistik.

Fungsi pemimpin negara sebagai kekuatan moderasi di antara ekstrimitas masyarakat benar-benar sedang diuji. Betapapun mereka tampil karena dukungan partai atau kelompok tertentu, sekali mereka terpilih anasir-anasir partikularistik harus dikesampingkan demi kemaslahatan bersama. Presiden/Wakil Presiden kerap kali terkesan melakukan endorsement secara sengaja atau tidak terhadap keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlalu mahal harganya, jika demi mobilisasi dukungan bagi pemilihan mendatang, hal-hal mendasar dari prinsip demokrasi konstitusional dikorbankan.

Krisis selalu mengandung dua sisi: ancaman dan peluang. Untuk memanfaatkan peluang di balik krisis ada kunci yang harus ditemukan. Adapun kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Bagi para pemimpin, ada baiknya menyimak kembali credo Rene de Clerq yang menjadi semboyan Bung Hatta: "Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku. ▀"



Monumen Kebodohan Pemprov DKI Jakarta

Pengendara sepeda motor melintas besi beton pondasi proyek Monorel di jalan Patal Senayan, Palmerah, Jakarta Selatan, Jum'at (16/1/2015). Tiang pancang yang berada di Jalan Pejompongan-Senayan di dekat Stasiun Palmerah tersebut kerap menjadi penyebab kecelakaan pengendara dan membuat kemacetan lalu lintas. Begitu pula tiang pancang yang berada di Jalan Gelora juga membuat kemacetan lalu lintas, mengingat jalan itu sudah sempit.

Aktual - Munzir



Jenazah Korban Pesawat AirAsia Diterbangkan ke Surabaya -Petugas gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri membawa peti berisi jenazah korban AirAsia QZ8501 ke pesawat Hercules C-130 di Lanud Iskandar, Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, Kamis (1/01/2014).

SIAPA DAGANG JALUR UDARA



Minggu 28 Oktober 2014 menjadi hari kelabu dunia penerbangan Indonesia. Pesawat Air Bus 320-200 milik AirAsia bernomor penerbangan QZ 8501 untuk rute Surabaya-Singapura jatuh terhempas di Selat Karimata.

QZ 8501 dengan 155 penumpang dan 7 crew ini setelah lepas landas dari Bandara Juanda Surabaya, tercatat hilang kontak saat terbang di utara Semarang memasuki wilayah Kalimantan.

Mengapa QZ8501 bisa hilang kontak, belum diketahui. KNKT (Komisi Nasional Keselamatan Transportasi) hingga kini masih menyelidiki musibah Airbus A320-200 yang dipiloti Kapten Irianto.

Namun Kemenhub meski tetap mengevakuasi korban dan berbagai temuan serpih pesawat nahas ini, sempat menyiarkan beberapa keterangan pers yang berujung

memicu kontroversi pendapat tinggal landas. Kemenhub ternyata juga menemukan pilot tak mengambil data cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Berdasarkan laporan Kepala BMKG kepada Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan), bahwa memang AirAsia tidak mengambil (dari BMKG di Sidoarjo) data cuaca sebelum terbang,” kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid di Jakarta, Jumat (2/1) lalu.

Jumat itu pula, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub **JA Barata** mengungkapkan QZ8501 ternyata tidak dijadwalkan untuk terbang pada Minggu pagi itu. “Rute Surabaya-Singapura (PP) yang diberikan kepada Indonesia Air Asia adalah sesuai dengan jadwal penerbangan pada hari Senin, Selasa, Kamis dan

Sabtu,” papar Barata di Jakarta.

Atas dasar temuan bahwa QZ8501 terbang di luar jadwal alias terkategori ilegal itu, Kemenhub lalu mencabut izin AirAsia melayani rute penerbangan Surabaya-Singapura ini. Sontak beberapa pilot Indonesia pun “berang” karena merasa diri “dilecehkan” oleh kementerian yang dipimpin mantan Dirut KAI Ignasius Jonan.



Dokumen Penerbangan QZ8501

Jika penerbangan QZ8501 dikategorikan ilegal, lalu yang menjadi pertanyaan, adalah siapakah yang memberikan izin terbang bagi QZ8501 saat itu? Karuan wacana “kelelahan penerbangan QZ8501” pun mencuat jadi isu kontroversial,

yang memicu pro vs kontra khalayak ramai. Hingga hari ke 11 pasca musibah, kontroversi keilegalan QZ8501 masih menjadi tanda tanya khalayak. Sampai akhirnya muncul dokumen yang menguak legalitas izin penerbangan Airbus yang nahas ini. Itulah dokumen setebal 20 halaman yang berisi jadwal-jadwal penerbangan Air Asia secara legal.

Dalam dokumen antara lain terdapat surat Nomor **AU.008/30/60/Orju-DHU-2014** yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Indonesia AirAsia. Surat yang diterbitkan di Jakarta 24 Oktober 2014 ini menyebutkan bahwa AirAsia QZ8501 terbang pada hari 1,2,4,6 atau Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu. Lampiran halaman pertama surat itu terlihat dibubuhi tandang tangan Direktur Jenderal Perhubungan Udara atas nama Ir Santoso Eddy Wibowo M.SI berikut stempel. Lampiran kedua dan ketiga, berisi tembusan pada jajaran Bandara Juanda. Antar lain Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Surabaya, GM PT Angkasa Pura

W serta jajaran lain yang terkait bandara Juanda Surabaya.

Dokumen menunjukkan surat itu ditindak lanjuti PT Indonesia AirAsia tanggal 25 Oktober 2014, dengan surat Nomer : **IAA/GOP/GS/SHSUB/0349/X/2014** tentang jadwal penerbangan AirAsia, termasuk rute Surabaya-Singapura dengan melampirkan jadwal 1,3,5,7 atau Senin, Rabu, Jum'at dan Minggu.

Berdasarkan surat itu lalu ke luar rekomendasi *confirmation slot winter schedules* yang diterbitkan oleh IDSC tanggal 26 Oktober 2014 yang menyetujui penerbangan QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada hari ke-7 atau Minggu.

Bukti kedua QZ8501 terbang secara legal, adalah beredarnya rekaman percakapan Air Traffic Controll (ATC) Juanda dengan pilot QZ8501 di dunia maya, yang merekam persetujuan ATC Bandara Juanda telah mengizinkan Kapten Irianto menerbangkan QZ8501 ke Singapura, pada. Minggu pagi itu.

Salinan rekaman percakapan ATC

Bandara Juanda dengan QZ8501 pada Minggu pagi itu diunggah di *Soundcloud* oleh pengguna ber-userID "digitizing" pada 3 Januari 2014. Rekaman berjudul file "ATC PK AXC-QZ8501 201412272225Z" ini diunggah sesaat setelah Kemenhub membekukan izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura,

Sejauh mana keaslian rekaman yang diunggah itu, akan dibuktikan oleh hasil investigasi KNKT.

Pada menit ke-10 dari rekaman audio berdurasi 20 menit itu, terdengar suara AirAsia QZ8501 (dengan *callsign* Wagon Air 8501) yang memberitahukan posisinya di *parking stand A9*, dengan registrasi PK-AXC (Alpha X-Ray Charlie), jumlah penumpang, dan tujuan Singapura. Salinan dari percakapan itu kurang lebih berbunyi sebagai berikut:

AWQ8501: "Tower, Wagon Air eight five zero one good morning..."

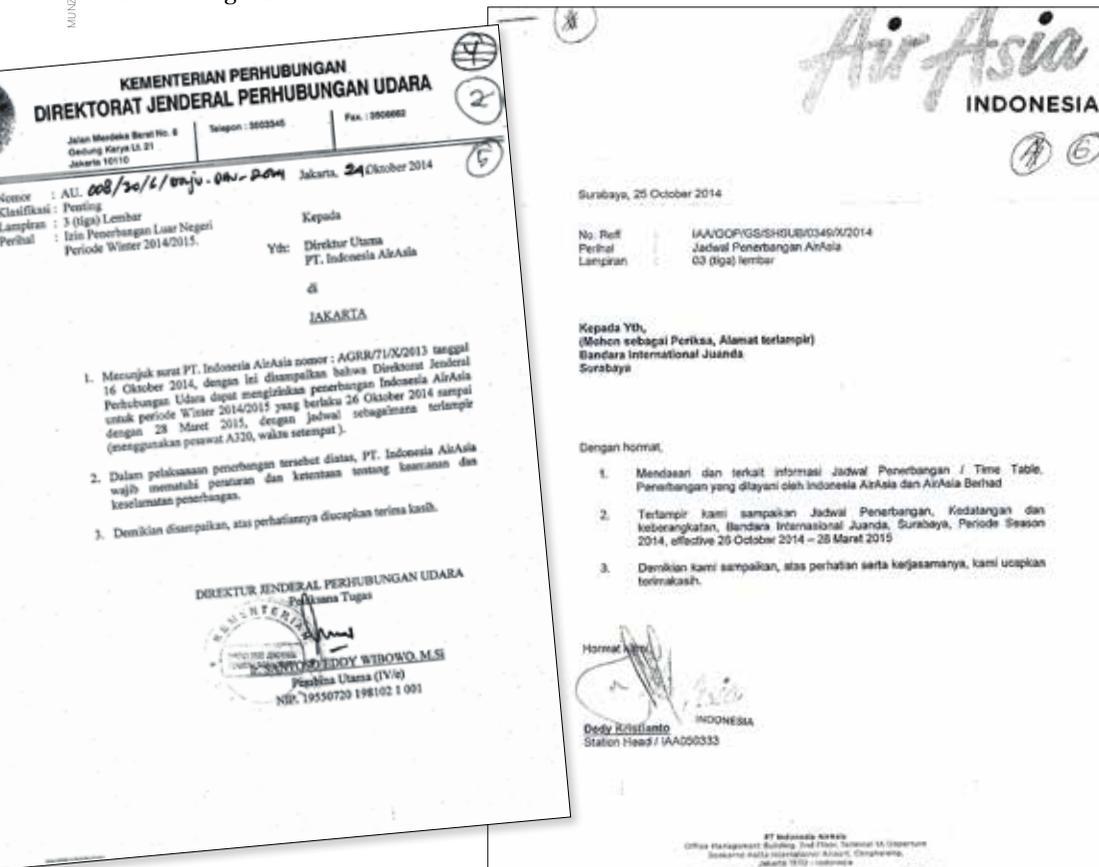
Tower: "Wagon Air 8501 good morning Juanda Tower, go ahead..."

AWQ8501:

"Eight five zero one (registrasi) alpha x-ray charlie parking stand Alpha Niner (A9) destination Singapore POB (passenger on board) one six one, request push and start, wagon air eight five zero one..."

Tower: "Wagon Air eight five zero one parking stand number Alpha niner Pushback and start approved heading west runway one zero, exit sierra two..."

Pada menit ke-4, terdengar QZ8501 meminta izin ke ATC untuk menuju ke landas pacu. ATC lalu mengarahkan QZ8501 ke *runway* 10 yang sedang



digunakan saat itu. Pada menit ke-07.07, ATC kemudian memberi izin keberangkatan kepada QZ8501 melalui *airways* M635 dengan ketinggian jelajah awal 24.000 kaki.

“Wagon Air eight five zero one clear to Singapore, mike six three five level two four zero initial, RAMPY one alpha departure squawk number seven zero zero five,” demikian kata petugas ATC yang berciri suara wanita tersebut.

Otoritas penerbangan Singapura (CAAS) secara terpisah pun sebelumnya menyatakan status penerbangan AirAsia QZ8501 juga legal. AirAsia telah mengajukan operasi penerbangan harian antara Surabaya dan Singapura untuk masa musim dingin sejak 26 Oktober 2014 hingga 28 Maret 2015. Jadwal harian ini disetujui berdasarkan hak lalu lintas udara yang tersedia di bawah kesepakatan bilateral ASA dan adanya slot di bandara Changi.

Sehingga sesuai proses yang dilakukan dan jika isi dokumen di atas benar, maka pihak maskapai tidak bisa dianggap sebagai pihak yang bersalah. Apalagi jika dihukum dengan pencabutan izin rute.

Menanggapi kontroversi ini, Menteri Perhubungan (Menhub) **Ignasius Jonan** ketika dikonfirmasi, malah balik bertanya kepada awak media mengenai data dokumen tersebut. “Ini pendapat anda atau AirAsia? Anda baca data yang salah,” kata Jonan di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (9/1).

Karena, menurut Jonan, pemerintah belum memberi izin rute kepada AirAsia. Yang diberikan baru sebatas izin slot. Jika telah mendapat slot, baru maskapai bisa mengajukan ijin rute kepada Kemenhub. “... diajukan itu untuk memperoleh ijin rute dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, jadi itu (slot) bukan ijin. Karena ijin harus diajukan ke Kemenhub yang harus diajukan oleh maskapai,” jelas Menhub ini.

“Slot itu anggotanya banyak jadi ada bandara keberangkatan, kedatangan dan navigasi udara ada koordinator slotnya, juga ada UPKS (unit pelaksana



kordinator slot) dari otoritas bandara kemenhub,” tandasnya.

Sengkarut Izin Penerbangan

Yudi Widiana Wakil Ketua Komisi V DPR RI menilai keputusan Menhub Ignasius Jonan terkait sengkabut perizinan penerbangan QZ8501 sebagai tindakan tergesa-gesa. “Saya tidak tahu apakah sudah konfirmasi ke KNKT yang sedang melakukan penyelidikan. Harusnya Menhub tunggu hasil penyelidikan KNKT. Ini terburu-buru. Dan tidak mungkin operator berjalan sendiri, pasti

ada aktor lain. Kalau jalan sendiri dan Kemenhub berikan sanksi ke operator, bisa dianggap tebang pilih bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Yudi di Jakarta, Kamis (9/1).

Sebaiknya, Kemenhub berempati atas tragedi QZ8501, tidak memperkeruh keadaan dan mencari masalah baru. “Seharusnya kementerian perhubungan cari solusi bukan permasalahan baru di kala sedang ada musibah ini,” kata .

Contoh, penerbangan QZ8501 diyakini Yudi sudah berjin dan

punya slot. “Kalau hanya AirAsia yang dibekukan, ini tidak adil. Saya yakin (proses izin) mereka (AirAsia) jalankan tapi lambat di pihak kemenhub (dalam melayani),” ungkapnya.

Sebagai analog, Yudi menyebut contoh di Amerika Serikat dan Eropa begitu ada permasalahan izin. Bukan izin maskapai yang dibekukan, tapi sisi regulator yang justru akan disidik cermat. Dalam hal ini peran Kemenhub sebagai regulator. Apalagi masalah proses perizinan, menurut Yudi, bersumber pada kelambanan pemberian izin atau kesengajaan menunda sebagai modus mafia perijinan di Kemenhub. Sinyalemen ini terbukti dari data proses perizinan penerbangan QZ8501 yang diperoleh Yudi.

Kekecewaan serupa juga disampaikan Bambang Harjo anggota Komisi VI DPR RI. “Kalau membaca dari data yang beredar, seharusnya pihak Kemenhub harus meng-*approval* izin tersebut, karena prosesnya sejak Oktober sudah dilakukan. Pertanyaannya: apakah di Dirjen Perhubungan Udara lagi kosong, saat ini dijabat oleh Plt jadi nggak bisa mengeksekusi, ataukah ada kebiasaan perubahan jadwal hanya diketahui otoritas bandara yang juga kepanjangan tangan Kemenhub,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (8/1).

Bambang menyekalkan sikap Kemenhub yang mempersoalkan izin slot penerbangan AirAsia yang tertimpa musibah kecelakaan QZ8501 pada Minggu 28 Desember 2014. Karena soal slot penerbangan, menurut dia, tidak ada kaitan dengan kecelakaan QZ8501.

“Apa kalau berangkat tidak hari itu tidak ada kecelakaan? Apa kalau berangkat tidak sesuai slot itu sudah pasti ada kecelakan? Tidak bisa. Makanya pemerintah tidak usah mempersoalkan slot terbang dulu. AirAsia hanya ketiban sial,” ujar Bambang.

Pengamat penerbangan dari Universitas Negeri Airlangga Surabaya, Adi Riyadi, memaparkan dalam perjalanan udara lintas negara

berdasarkan hukum internasional niscaya sudah diketahui dan mendapatkan izin yang disepakati oleh kedua negara.

Sehingga bila Menhub mengatakan QZ8501 itu penerbangan ilegal, Adi khawatir Singapura akan menuduh Indonesia menerbitkan izin palsu. “Itu yang saya khawatirkan, Singapura bisa menuduh bahwa Indonesia memberikan izin bodong,” katanya di Surabaya, Kamis (8/1).

Adi menilai, yang berhak memberi izin penerbangan lintas negara adalah Kemenhub. Sementara yang mengetahui dan mengubah jadwal atau *slot time* adalah Indonesia Slot Coordinator (ISC), selaku kepanjangan tangan pemerintah karena keberadaan ISC di bandara.

“Dari sini saya kembali katakan, sangat tidak mungkin pemerintah tidak tahu ada penerbangan atau tidak ada izin. Pemerintah pasti tahu dan pasti ada izin. Udara ruang tertutup, apakah ada lintasan pesawat lain atau tidak, pasti ISC sudah tahu,” kata Adi.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio tegas mengatakan ijin terbang QZ8501 tidak ilegal. Yang layak dicurigai, menurut Agus, malah kalangan di jajaran Kemenhub. Salah satu di antaranya yang berperan dalam masalah maladministrasi.

“*Flight schedule*-nya nggak masalah, Otoritas Bandara sudah *confirm*, sudah mengeluarkan *confirmation slot* dan akhirnya pesawat itu terbang ke Singapura sebelum kecelakaan,” jelas Agus, Kamis (8/1).

Pernyataan Agus ini sinkron dengan data yang beredar di kalangan wartawan di Surabaya seperti yang dilansir berbagai media yang memberitakan QZ8501 telah memiliki izin. “Memang sudah ada permit, dan Singapura tetap *ngeyel* kalau itu ada izin,” terangnya sembari mengatakan pembekuan ijin rute itu bisa dicabut lagi oleh Kemenhub.

Wajah Penerbangan Indonesia

“Karena yang diaudit di dunia Internasional adalah regulator. Kalau

regulatornya baik maka operator dan semuanya baik. Kalau regulatornya buruk semua akan buruk,” kata Budi Muliawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1)

Peran regulasi dalam dunia penerbangan, juga digarisbawahi pengamat penerbangan Samudra Sukardi, sebagai hal yang paling utama. “Regulator membuat regulasinya, kalau regulasinya semrawut maka operator dan penerbangannya bisa semrawut. Regulator harus menjalankan dan mengawasi karena *airlines* tidak mungkin tidak ikut regulasi,” kata Samudra dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengingatkan Kemenhub selaku regulator penerbangan, harus fokus membenahi internal. Pembenahan terkait regulasi terhadap maskapai penerbangan, bagi Agus, harus menjadi prioritas utama. “Pembenahan di Kemenhub harus dibenahi, regulator harus tegas mengatur,” katanya di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).

Untuk itu, Agus meminta kementerian yang dipimpin Ignatius Jonan jangan mengeluh tapi fokus berbenah dan memperketat pengawasan penerbangan di Indonesia.

“Walaupun timbulkan ketidaksesuaian aparat Kemenhub yang dari dulu di situ. Pengaturan internal di Kemenhub lakukan saja jangan hanya teriak di media,” cetusnya. Karenanya, dia menambahkan, maskapai pasti akan mengikuti setiap regulasinya. Namun, jika regulasinya masih bermasalah maka akan berdampak ke maskapai.

Informasi yang digali Aktual, pada kurun waktu 5-14 Mei tahun lalu, enam auditor ICAO melakukan audit kembali setelah tujuh tahun lalu, hasilnya auditor ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ini merilis penilaian paling buruk penerbangan terdapat pada hulunya yakni di Ditjen Penerbangan Udara, Kemenhub.

Soekardjito

KECELAKAAN PESAWAT DI INDO

1 16 Feb 1967

Garuda Indonesia Penerbangan 708 jurusan Makassar - Manado kecelakaan saat mendarat di Bandara Sam Ratulangi. **22 penumpang tewas** dan 70 penumpang selamat.

2 24 Sep 1975

Garuda Indonesia Penerbangan 150 jurusan Jakarta - Palembang kecelakaan di tengah cuaca buruk. **25 orang tewas** termasuk 1 di darat dan 36 penumpang selamat.

3 4 April 1987

Garuda Indonesia Penerbangan 035 jurusan Banda Aceh - Medan kecelakaan saat mendarat di Bandar Udara Polonia. **23 penumpang tewas** dan 22 penumpang lainnya selamat.

4 24 Juli 1992

Mandala Airlines Penerbangan 660 menabrak Bukit Inahau saat akan mendarat di Bandara Pattimura, Ambon. **70 penumpang** dan awak pesawat **tewas**.

9 16 Jan 2002

Garuda Indonesia Penerbangan 421 jurusan Mataram - Yogyakarta mendarat darurat di Bengawan Solo. **1 pramugari tewas** dan 59 orang selamat.

10 30 Nov 2004

Lion Air Penerbangan 538 jurusan Jakarta - Surakarta tergelincir saat mendarat di Bandara Adisumarmo. **26 orang tewas** dan 142 luka-luka.

11 5 Sept 2005

Mandala Airlines Boeing 737-200 Penerbangan RI 091 gagal take off dari Polonia Medan menuju Jakarta, menerobos pagar bandara dan menabrak perumahan penduduk di Jl. Jamin Ginting Medan. **100 penumpang tewas**. Korban dari masyarakat di darat, **41 orang tewas**.

12 1 Jan 2007

Adam Air Penerbangan 574 jurusan Surabaya - Manado jatuh di Selat Makassar di kedalaman + 2000 m. **Seluruh 102 penumpang dan awak pesawat tewas**.

17 29 Sept 2011

Nusantara BuanaAir Penerbangan 823 jatuh di Langkat, Sumatera Utara. **Seluruh 18 penumpang dan awak pesawat tewas**.

18 9 Mei 2012

Sukhoi Superjet100 menabrak gunung salak. **Seluruh 45 penumpang dan awak pesawat tewas**.

19 13 April 2013

Lion Air Penerbangan 904 tergelincir saat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. **Seluruh 108 penumpang dan awak pesawat selamat**. Sebanyak 45 orang mengalami luka-luka.



INDONESIA

5 18 Okt 1992

Merpati Nusantara Penerbangan 5601 jurusan Semarang - Bandung jatuh di Gunung Papandayan. **31 penumpang dan seluruh awak pesawat tewas.**

6 10 Jan 1995

Merpati Nusantara Penerbangan 6715 jurusan Bima - Ruteng jatuh di dekat pulau Flores. **10 penumpang dan 4 awak pesawat tewas.**

7 26 Sep 1997

Garuda Indonesia Penerbangan 152 jurusan Jakarta - Medan jatuh di desa Buah Nabar, dekat Medan, Sumatera Utara. **234 penumpang dan seluruh awak pesawat tewas.**

8 19 Des 1997

Silk Air Penerbangan 185 jurusan Jakarta - Singapura jatuh di Sungai Musi, Palembang. **104 penumpang dan awak pesawat tewas.**

13 7 Maret 2007

Garuda Indonesia Penerbangan 200 jurusan Jakarta - Yogyakarta tergelincir saat mendarat di Bandara Adisucipto. **22 penumpang tewas dan 118 penumpang selamat.**

14 2 Agust 2009

Merpati Nusantara Penerbangan 9760 jurusan Jayapura - Oksibil menabrak gunung. **Seluruh 15 penumpang dan awak pesawat tewas.**

15 13 April 2010

Merpati Nusantara Penerbangan 836 jurusan Sorong - Manokwari tergelincir saat mendarat di Bandara Rendani. **Seluruh 109 penumpang dan awak pesawat selamat. Sebanyak 44 penumpang mengalami luka-luka.**

16 7 Mei 2011

Merpati Nusantara Penerbangan 8968 jatuh di perairan dekat Bandara Utarom, Kaimana, Papua Barat. **Seluruh 25 penumpang dan awak pesawat tewas.**

20 28 Desember 2014
Air Asia QZ8501

Rute Surabaya - Singapura jatuh di selat Karimata. **169 Awak dan Penumpang Tewas, termasuk 16 anak-anak dan 1 bayi.**



Musisi kawakan Iwan Fals duduk santai dan sesekali tertawa ketika berdiskusi dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar di rumahnya, Desa Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat pada pertengahan Desember 2014. Pelantun tembang-tembang kritis di era orde baru ini tampak masih bugar meski rambut, kumis, dan jenggotnya mulai memutih.

Iwan Fals memang secara khusus diminta Marwan Jafar untuk menjadi Duta Desa. Dia diajak ikut bernyanyi ke desa-desa sambil menjalankan program pembangunan desa yang menjadi tugas kementerian. Tawaran ini dijawab Iwan dengan kesiapan menyanyikan 15 lagu setiap mengunjungi desa.

“Saya kaget dan senang. Didatangi Pak Marwan untuk ikut memikirkan desa yang menurut saya adalah tempat dilahirkannya orang-orang hebat sekelas Bung Karno dan tokoh hebat lainnya,” ucap Iwan.

Tembang-tembang Iwan Fals diharap bisa melengkapi harapan masyarakat desa untuk hidup lebih sejahtera. Para aktivis desa memang sudah bersorak gembira ketika DPR dan Pemerintah periode 2009-2014 mengesahkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada akhir tahun 2013 silam.

Dalam regulasi ini diatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang diestimasi Rp1,4 miliar per desa setiap tahun. Setidaknya ada 74.045 desa yang akan mendapat limpahan dana desa itu secara proporsional.

Hanya saja, pribahasa ‘di mana ada gula di situ ada semut’ tampaknya berlaku. Kementerian Desa sendiri bersikeras meminta agar Direktorat Jendral Pemerintahan Desa (PMD) sebagai lembaga pengelola desa segera pindah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di pihak lain, banyak politikus di DPR meminta agar dana desa ini segera digelontorkan, padahal lembaga legislatif ini juga bisa melakukan tarik ulur alokasi karena dana desa harus melalui persetujuan DPR.



Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar (kiri) berbincang dengan Musisi Iwan Fals (kanan) saat berkunjung ke kediamannya di Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12).

Masyarakat Menanti Tetesan Dana Desa

Sebanyak 74.045 desa di seluruh Indonesia berharap realisasi alokasi dana desa yang diamanatkan undang-undang. Dipastikan banyak rintangan sebelum sampai sasaran.

Tarik menarik kepentingan dalam proses pencairan dana desa diakui Marwan Jafar. Bekas ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini telah membuat rencana kerja dan anggaran untuk desa, namun dia khawatir revisi anggaran kementerian yang sudah disusun kemudian tidak disetujui secara penuh.

“Kami sudah susun semua revisi anggaran dan sudah disampaikan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kalau diberikan sesuai yang kita rencanakan berarti program kita jalan. Kalau RPJM kita disunat lalu tidak dikasih duit, ya enggak jalan-jalan (program desa),” kata Marwan.

Marwan berharap dana desa bisa ditingkatkan dari Rp9,1 triliun tahun 2014 menjadi Rp47 triliun tahun 2015. Dana inilah yang nantinya akan

disebar ke 74.045 desa di seantero nusantara. Adapun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015, jumlah alokasi dana desa sebesar Rp20 triliun, atau meningkat Rp11 triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp9 triliun.

Pembahasan tentang dana desa akan dimulai pada masa sidang DPR awal Januari 2015. Dalam pengajuannya, dana desa itu harus dipakai untuk pembangunan infrastruktur, badan usaha milik desa, pembangunan pasar desa, dan program lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Kita ajukan dan bahas bersama mitra kerja di komisi V DPR. Peningkatan anggaran akan fokus pada modal infrastruktur,

pembangunan irigasi, dan sebagai modal operasi desa,” kata Marwan.

Lantas, bagaimana mekanisme pencairan dana desa ini? Marwan menjelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN itu akan digelontorkan pemerintah pusat ke daerah dalam APBD masing-masing daerah. Selanjutnya, dana desa itu akan dimasukkan ke rekening desa. Untuk memastikan kesiapan Desa dalam mengelola anggaran, para perangkat desa akan diberikan pelatihan dan pendampingan bagaimana mengatur manajemen keuangan dengan benar.

“Dana desa ini kita harap bisa cair pada April 2015. Makanya mulai awal tahun ini akan ada pendamping atau fasilitator untuk pelatihan aparatur dan kelembagaan desa supaya bisa membantu penggunaan dana desa yang besarnya rata-rata tiap desa Rp1,4 miliar,” cetus Marwan.

Secara lebih detail, Marwan mengaku sudah mengantongi catatan kebutuhan desa berdasarkan analisis Data Survei Potensi Desa tahun 2014.

Data ini menyebut ada 3.396 desa, kecamatan, kabupaten membutuhkan pondok bersalin. Sebanyak 10.080 desa memerlukan gedung Sekolah Dasar beserta guru-guru. Untuk membangun ekonomi masyarakat, setidaknya ada 16.322 desa membutuhkan pasar desa yang permanen.

Kritik terhadap lambatnya implementasi dana desa ini mulai bermunculan. Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam menyebut Pemerintahan Joko Widodo belum membuktikan kinerja optimal soal pembangunan desa. Pemerintah juga tampak tidak bersungguh-sungguh menjalankan amanat UU Desa, khususnya tentang alokasi dana desa.

“Saya kira pemerintah saat ini posisinya tidak pernah jelas dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai implementasi UU Desa,” kata Muqowam.

Bekas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memang sangat faham tentang alokasi dana desa karena pernah menjadi Ketua Pansus RUU Desa hingga disahkan menjadi UU. Muqowam mengatakan, dalam pasal 72 UU Desa jelas dikatakan ada tujuh pos sumber keuangan desa, dan pemerintah pusat wajib memenuhi alokasi dana desa.

“Dana desa ini kan sudah jelas. 10% APBN yang ditransfer ke daerah diperuntukkan ke desa setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Tapi nyatanya masih banyak daerah yang tidak mengimplementasikan ADD secara maksimal,” ucapnya.

Tarik Menarik Dua Kementerian Kelola Dana Desa

Tarik menarik pengelolaan dana desa masih sengit di lingkungan instansi pemerintah. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tampaknya belum ikhlas 100% jika Ditjen PMD pindah ke Kementerian Desa. Padahal

keputusan ini sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 165 Tahun 2014.

Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo mengakui, hingga saat ini belum ada kesepakatan apakah PMD akan pindah total ke Kementerian Desa atau tidak. Namun sudah ada Keputusan Presiden yang mengatur perpindahan itu meski harus dibahas secara lebih detail dan terperinci. Apalagi urusan desa tak bisa dipisahkan dari pemerintah kabupaten dan kota sehingga tetap ada alur koordinasinya dengan Kemendagri.

“Kita kalau bicara pemerintah itu kan dari menteri ke kepala daerah. Anak buah pemerintah itu kan dari camat samapi desa. Jangan hanya dipotong sampai camat saja kita,” ucapnya.

Direktur Jenderal PMD Tarnizi Abdul Karim pasrah apakah akan tetap berada di bawah Kemendagri atau pindah ke Kementerian Desa. Namun dia meyakinkan bahwa pengucuran dana desa tak akan terhambat meskipun status posisi Ditjen PMD di kementerian belum pasti.

“Kita tunggu keputusan Menpan saja. Apakah pindah semua ke kementerian PDT atau bagaimana karena ini kan masih dibahas dulu,” ujarnya.

Sumber terpercaya di Kemendagri menyebut ada banyak pejabat di kementerian yang enggan pindah. Bahkan 16 pegawai sudah terang-terangan menolak perpindahan itu dan mengingatkan ada banyak konsekuensi jika Ditjen PMD pindah ke Kementerian Desa. Salah satunya terkait eksistensi program pemberdayaan masyarakat yang sering dijalankan ibu-ibu PKK di desa-desa. Perlu diketahui, dalam organisasi PKK diatur bahwa istri Mendagri secara *ex-officio* adalah ketua PKK.

Sementara itu, Marwan Jafar terus mendesak agar pegawai Ditjen PMD segera pindah untuk mendukung pelaksanaan kerja Kementerian Desa. “Lihat Perpres dong. PMD harusnya sudah pindah agar pekerjaan soal desa bisa efektif,” ucap Marwan.

Demo Perangkat Desa - Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se-Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2010).

M. Sahlan, Soemtro

80 Persen TKI Tidak Mengetahui Informasi Pekerjaan



Kementerian Tenaga Kerja mencatat sekitar 80 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berangkat ke luar negeri tidak mengetahui informasi apapun terkait pekerjaannya. Padahal informasi pekerjaan ini sangat penting bagi calon TKI.

“Mereka tidak punya informasi yang utuh mengenai gaji, akan bekerja di mana, jam kerjanya seperti apa, di mana tinggalnya,” kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Tenaga Kerja, Reyna Usman, Rabu (14/1).

Disampaikan, dalam kenyataannya banyak TKI yang baru menandatangani perjanjian kerja saat berada di bandara atau beberapa jam sebelum penerbangan. Salah satu alasannya adalah pendidikan para calon TKI yang mengenyam pendidikan rendah.

“Yang bekerja umumnya berpendidikan tamat sekolah dasar (SD). Mereka masih kurang informasi mengenai prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan,” ujar dia.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, ke depan pihaknya akan melakukan pembatasan dan pengendalian melalui peraturan menteri agar tidak semua TKI bisa bekerja di luar negeri.

“Jadi tidak semua TKI bisa bekerja di luar negeri. Ada kualifikasi jabatan. Harus memiliki ‘skill’ untuk bekerja dan bisa melindungi diri sendiri,” jelas Reyna. / Andy Abdul Hamid

Asing Kuasai 42% Pasar Berharga Nasional 2014

Direktur Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Wahyu Trenggono mencatat kepemilikan asing di pasar surat berharga nasional (SBN) domestik mengalami peningkatan sebesar 42 persen selama tahun 2014 menjadi Rp460,1 triliun dari Rp323,8 triliun di akhir 2013.

“Meski kondisi Pasar obligasi di Indonesia pada tahun 2014 banyak dipengaruhi faktor ekonomi global dan iklim sosial politik di Indonesia, kepemilikan asing meningkat yang menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih positif,” kata Wahyu di Jakarta.

Wahyu Trenggono mengemukakan bahwa selama 2014, ‘*capital outflow*’ tampak terjadi di bulan Desember yang mungkin disebabkan adanya ekspektasi lebih cepatnya kenaikan suku bunga AS (*Fed Rate*) dibandingkan rencana awal.

Secara spesifik, lanjut dia, kinerja obligasi pemerintah yang tercermin dari Indonesia Bond Indexes (INDOBeX) composites mencatatkan kinerja paling bagus dengan imbal hasil tahun berjalan sekitar 12,9 persen dari level 154,6633 ke level

174,6143.

Sedangkan kinerja total imbal hasil obligasi korporasi tahun berjalan sebesar 10,9 persen dari 161,2475 menjadi 178,8612.

Tahun 2014, ia juga mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menerbitkan dana sebesar Rp428,13 triliun dimana Rp274,39 triliun merupakan utang baru. Jumlah penerbitan utang baru (*net issuance*) itu naik 16,37 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara untuk penerbitan obligasi korporasi sampai dengan akhir tahun 2014, tercatat sebesar Rp45,07 triliun atau mengalami penurunan sebesar 22,87 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah seri baru sebanyak 88 seri.

“Penerbitan SUN meningkat, sementara surat utang korporasi menurun. SUN masih dinilai lebih baik oleh investor,” katanya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, IBPA telah melakukan penilaian dan

penetapan harga pasar wajar atas 491 seri jenis instrumen efek bersifat utang dan Sukuk, dengan total jumlah outstanding mencapai Rp1.851,873 triliun.

Dalam persentase, IBPA telah melakukan valuasi atas 98,13 persen surat utang yang diterbitkan pemerintah dan 98,88 persen obligasi dan sukuk korporasi dan 100 persen KIK-EBA yang diperdagangkan di pasar sekunder obligasi dalam negeri.

/ Ismed Eka Kusuma



Kebijakan Jokowi Pengaruhi Calon Kepala Daerah dari PDIP

Pengamat politik dari Universitas Bengkulu Drs Lamhir Syam Sinaga MSI mengungkapkan langkah dan gebrakan Presiden Joko Widodo berdampak besar pada Pemilihan Kepala Daerah dari partai pengusung, PDIP.

"PDIP sekarang sedang dalam tren positif, namun ini semua bergantung pada Jokowi, jika dia tetap pada jalur yang benar dalam berbagai kebijakan, maka ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi calon kepala daerah dari PDIP," kata dia di Bengkulu, Rabu (14/1).

Ia mengungkapkan, sampai saat ini Presiden Jokowi masih menunjukkan tren positif di mata rakyat, khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu menurut pengamatan dirinya. "Tetapi, jika calon gubernur dari PDIP ingin menang, jangan terlalu terlena oleh tren positif

partai dan mengabaikan hal-hal sepele yang ternyata berakibat fatal," ucapnya.

Seperti, masyarakat di berbagai daerah memiliki kebutuhan, yang berbeda-beda, penyerapan aspirasi dari masyarakat merupakan faktor penting kemenangan Pilkada, jangan terpaku dengan tren PDIP secara nasional.

"Pilkada mulai digelar pada 2015 di beberapa daerah, artinya, pemerintahan Presiden Jokowi sudah satu tahun berjalan, ini masa transisi," kata Lamhir.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki rekam jejak yang baik, namun masa satu tahun kepemimpinan merupakan masa transisi, dimana program-program pemerintahan baru saja di mulai, sehingga realisasi belum terlihat nyata oleh rakyat sebagai pemilik hak suara.

"Di sisi lain, akan banyak ranjau politik yang terjadi, oleh sebab itu, masa-masa seperti ini menjadi masa sulit," ujarnya. /Fahad Hasan Thalib



Peringatan Malari Ingatkan Jokowi

pelengkap sementara. Bukan yang utama seperti sekarang ini, apalagi membanjiri semua sendi ekonomi negeri kita. Ini bahaya dalam menjaga kedaulatan negara," ujarnya.

Dia menambahkan, penguasaan modal asing dalam perekonomian Indonesia menjadikan rakyat Indonesia hanya sebatas buruh sementara tuannya adalah pengusaha asing. Sumber daya alam dikuasai negara lain, sedangkan Indonesia hanya kebagian utang luar negeri yang semakin menumpuk.

Hariman juga menilai reformasi 1998 menunjukkan langkah kegagalan. Terbukti dari pemilu yang tidak bisa melahirkan pemimpin yang bagus dan berkualitas, tidak menghasilkan DPR yang berkualitas, serta tidak menghasilkan *civil society* yang kuat. "Malah mahasiswa yang saya sebut sebagai pilar ke-5 demokrasi justru mulai kehilangan daya kritisnya dan seperti impoten. Tidak punya *greget* perjuangan yang jelas," tuntasnya.

/Soemitro

Nikah di KUA Gratis, Pungutan Masuk Kategori Gratifikasi

Kementerian Agama memastikan tidak ada pungutan atau pembiayaan dalam pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) alias gratis. Berbeda misalnya jika pernikahan dilakukan diluar KUA, maka calon pengantin dibebankan biaya sebesar Rp600.000 yang harus dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dimana dalam aturan itu disebutkan bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua. Pertama, (biaya) gratis atau nol rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di KUA. Kedua, dikenakan biaya Rp600.000 jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja. Demikian disampaikan Dirjen Bimas Islam Kemenag, M Machasin, Kamis dua pekan lalu.

Diakuinya, dalam praktiknya dilapangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan calon pengantin. Misalnya petugas kelurahan atau lainnya yang turut membantu kelancaran pengurusan administrasi pernikahan.

"Tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin di luar yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Pungutan biaya di luar yang sudah ditentukan bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi," ucapnya.

Irjen Kemenag M. Jasin menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur prosedur pelayanan nikah di daerah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya gratifikasi dalam layanan nikah.

"Kemenag sudah berbuat agar penghulu terhindari dari menerima dana gratifikasi," jelasnya. /Soemitro

Refleksi peringatan ke 41 Melapetaka 15 Januari (Malari) diperingati oleh pelaku sejarah Hariman Siregar, di Sukabumi, Jawa Barat. Pada peringatan dan HUT INDEMO ke-14 tahun ini, Hariman menyoroti kinerja pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Jokowi sebagai presiden juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia justru membuat modal asing semakin berat dan kedaulatan negara juga tidak tau lagi entah dibawa kemana," ujarnya Kamis (15/1).

Menurut Hariman ia tetap berkeyakinan pemerintah harus membatasi masuknya modal asing. "Sikap saya sejak dulu kan jelas, modal asing masuk ke Indonesia itu harusnya hanya sebatas suplemen atau



Sinyal Buruk Kongres PAN dan Demokrat

Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) siaga satu. Partai yang sama-sama dilahirkan dari rahim reformasi itu belajar dari pengalaman dua saudara tuanya, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Paska perhelatan demokrasi akbar, Pemilu 2014, baik Golkar maupun PPP dilanda konflik internal.

Konflik tak kunjung berakhir dan memunculkan kepengurusan ganda. Di Golkar ada Ketum Aburizal Bakrie dan Ketum Agung Laksono, sementara di PPP ada Ketum Djan Faridz dan Ketum M Romahurmuziy. PD dan PAN siaga karena tidak ingin kedatangan tamu tak diundang atas nama internal partai, seperti dua

saudara tuanya.

Empat wadah organisasi ini sejatinya barisan partai diluar partai pendukung pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Khusus PD, bahasa saat dideklarasikan persisnya sebagai partai PD dan PAN akan sama-sama menghelat Kongres. PAN dilakukan lebih dulu, rencananya digelar di Bali pada akhir Februari 2015. PD menyusul beberapa pekan setelahnya. Nama-nama kandidat sudah bermunculan.

Di tubuh PAN ada nama petahana Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan dan Drajat Wibowo. Nama calon terakhir secara khusus diminta Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PAN, Amien Rais, agar

mengurungkan niatnya maju sebagai calon Ketum.

Menurut Amien dalam Rakernas di DPP PAN, Rabu (7/1) pekan lalu, Drajat yang juga Waketum PAN akan lebih baik jika konsen dibidang ekonomi. Pucuk pimpinan diserahkan kepada dua calon untuk bertarung memperebutkan kursi Ketum. Alasannya, Hatta dan Zulkifli sudah berpengalaman, baik di eksekutif maupun di legislatif.

Mantan Ketua MPR percaya siapapun Ketum terpilih dari kedua calon nantinya mampu menjaga soliditas PAN dalam barisan partai oposisi. Namun diingatkan agar seluruh kader bersama-sama menutup setiap celah yang ada supaya tidak disusupi pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan, umumnya pihak dimaksud adalah pemegang kekuasaan.

"Saya ingin bicara obyektifitas, biasanya pemegang kekuasaan



(Foto Kiri) Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (kanan), didampingi Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN di Kantor DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2015).

(Foto Kanan) Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Harian PD Syarif Hasan dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono sebelum mengikuti rapat pleno PD di Kantor DPP PD, Jakarta (11/12).

yang sedang memerintah secara alami tidak ingin oposisi yang terlalu kuat, karena akan (dianggap) mengganggu," Ketum Hatta Rajasa ditempatkan sama juga mewanti-wanti agar sekecil apapun celah intervensi dari luar ditutup. PAN yang pada 2015 ini menginjak usia remaja, 16 tahun, harus terus belajar. Utamanya dalam menjaga kekompakan dan kebersamaan serta soliditas partai.

Kongres VI sebagai satu agenda tersisa pengurus DPP periode 2010-2015 sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan Hatta. Dengan penekanan awal, siapapun Ketum terpilih, PAN tetap berada di barisan partai oposisi atau diluar pemerintahan. *Standing position* itu diambil untuk menjalankan fungsi-fungsi partai modernis.

Sesuai *platform* PAN, berada

di dalam ataupun di luar pemerintahan sama mulianya karena muaranya untuk kepentingan rakyat. Keberadaannya diluar pemerintahan disebut justru membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, sehat, kuat dan berwibawa. Posisinya tidak menghambat kinerja dan merongrong

kewibawaan pemerintah "Tetap di KMP (Koalisi Merah Putih) siapapun ketumnya," ucap Ketua DPP PAN Viva Yoga.

Di tubuh Partai Demokrat, meski Kongres baru akan digelar sekitar bulan Mei, namun bursa calon ketua umum sudah mulai menghangat. Ada nama Gede Pasek Suardika yang terang-terang mendeklar maju dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie.

Berkaca pada Golkar dan PPP, kewaspadaan ditekankan petinggi-petinggi partai berlambang mirip segitiga mercy tersebut. Mengantisipasi adanya intervensi hingga berujung perpecahan, mereka kompak meminta dengan sangat agar petahana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali maju sebagai caketum.

Inisiatif demikian, kata Wasekjen PD Andi Nurpati, sebenarnya merupakan usulan pengurus-pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Alasannya satu, jangan sampai konflik ditubuh Golkar dan PPP merambah PD. Figur SBY dinilai mampu mempersatukan kader sekaligus menghindarkan kemungkinan tersebut.

"Konflik Golkar dan PPP ini

sangat memprihatinkan, masyarakat bisa melihat langsung karena upaya pihak luar itu dilakukan sangat terbuka. Nah, Demokrat dan PAN sudah ada sinyal-sinyal seperti itu," ungkapnya, Kamis (8/1) pekan lalu.

Tanpa bermaksud menuding pihak-pihak tertentu, sinyal Kongres PD bakal disusupi pihak luar informasinya sangat kuat. Meski sebenarnya publik juga bisa membacanya. Modusnya, kata Andi, dilakukan dengan mendorong calon-calon tertentu dalam Kongres.

Cara-cara kotor demikian menurutnya sudah tidak layak dilakukan di negara yang demokrasi sudah mulai maju. Ia menyinggung bagaimana SBY bersusah payah membangun tegaknya demokrasi ditengah badai yang mendera PD saat itu. Dari konfigurasi dukungan partai pemerintah di parlemen hingga kader-kader terjerat kasus hukum.

Akan tetapi, SBY tidak pernah berupaya melakukan intervensi dan campur tangan terhadap partai politik lawan-lawannya. Padahal peluang dan kesempatan itu ada, namun SBY tidak mau merusak tatanan demokrasi yang sudah berjalan.

"Kita tidak mau ada intervensi masuk di PD, kita akan lawan," tegasnya. Waketum Nurhayati Ali Assegaf sebelumnya menyebut keberadaan SBY di Demokrat seperti halnya Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan. Ketokohan keduanya mampu menjaga partai sekaligus mempersatukan kader.

Dalam hal mengantisipasi masuknya kepentingan pihak luar berupa intervensi, sudah selayaknya SBY menerima keinginan kader-kader partai dari berbagai daerah. SBY bersedia dicalonkan kembali sebagai caketum periode 2015-2020.

"Justru saya menginginkan dalam situasi politik sekarang ini, Pak SBY mencalonkan diri kembali karena apa? Untuk menjaga supaya tidak ada dualisme lagi seperti yang sekarang terjadi dimana-mana," tandasnya.

DKI dan Aceh Terancam Sanksi Teguran Kemendagri Terkait RAPBD 2015



Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mengatakan pihaknya tengah mengkaji ketentuan pemberian sanksi lanjutan untuk daerah yang terlambat menyerahkan laporan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015. Ada dua provinsi yang terancam mendapat sanksi lanjutan sebagai upaya pembinaan Kementerian terhadap pemerintah daerah, yakni DKI Jakarta dan Aceh.

"Sanksi awal berupa teguran sudah diberikan ke Gubernur DKI, Gubernur Aceh, Ketua DPRD DKI, dan Ketua DPRD Aceh," kata Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis, (8/1)

Lebih lanjut Reydonnyzar mengatakan bentuk sanksi lanjutan yang sedang dikaji antara lain penyetopan pembayaran gaji selama enam bulan bagi kedua provinsi.

Tetapi dalam hal penerapan sanksi, kata dia, kementerian tidak dapat begitu saja menjatuhkan sanksi, pasalnya harus dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terlebih dahulu kepada kedua provinsi itu.

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 dipastikan tertunda. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja itu memakan waktu lama karena Dewan meminta agar usulan mereka bisa masuk ke rancangan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 312 ayat 2 menyatakan DPRD dan kepala daerah yang gagal menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun tidak akan digaji selama enam bulan.

Menurut Reydonnyzar, Pemerintah Provinsi Aceh sendiri telah melayangkan surat ke Kemendagri. Mereka telah berkomitmen segera merampungkan pembahasan RAPBD 2015. Kemendagri sendiri tambah Reydonnyzar, siap memfasilitasi permintaan percepatan pembahasan RAPBD tersebut. / Andy Abdul Hamid

Komnas HAM: Kejaksaan Agung Tak Serius Tangani Kasus Pelanggaran HAM Macet

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas mengatakan hingga kini Kejaksaan Agung tidak serius dalam menuntaskan tujuh kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu.

"Hingga akhir 2014, tujuh hasil penyelidikan Komnas HAM masih belum ditindaklanjuti Jaksa Agung," kata Hafid di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, (8/1).

Adapun ketujuh kasus tersebut adalah peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Talangsari, Lampung, 1989; penghilangan paksa orang 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; serta peristiwa Wasior dan Wamena 2003.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo harap dia, dapat segera tuntaskan kasus-kasus itu. "Mudah-mudahan pemerintahan Jokowi bisa mempercepat penyelesaian kasus-kasus itu," kata dia.

Dia menambahkan, apalagi pemerintahan Jokowi telah berkomitmen untuk selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM itu. "Kuncinya, harus ada kemauan politik yang sungguh-sungguh."

Selain itu kata dia, Komnas HAM sendiri mendesak Jaksa Agung Prasetyo segera menuntaskan kasus-kasus terbengkalai kini berada di Korps Adhyaksa. "Kami sudah bertemu dengan Jaksa Agung dan beliau berkomitmen untuk

menyelesaikan kasus-kasus itu," ucap Hafid. /Soemitro



Tunjangan Profesi Guru Naik Rp 10 T

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan pada tahun 2015, pemerintah telah menganggarkan tunjangan profesi guru hingga Rp 70 triliun, angka ini mengalami peningkatan sekitar Rp 10 triliun ketimbang tahun lalu yang hanya berkisar Rp 60 triliun.

“Porsi terbesar memang untuk guru, kami memikirkan bagaimana dengan alokasi yang besar itu bisa mendorong peningkatan kualitas guru,” jelas Anies di Jakarta, Selasa, (13/1).

Peningkatan kualitas guru dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus perhatian pemerintahan Joko Widodo masa mendatang. Dari Rp 409 triliun anggaran pendidikan yang diajukan dalam APBN perubahan 2015, sekitar Rp 70 triliun ditujukan untuk tunjangan profesi guru, kemudian Rp 254 triliun atau sekitar 62 persen untuk daerah dan sisanya 32 persen atau sekitar Rp 154 triliun untuk belanja anggaran pusat.

Saat ini ungkap Anies kualitas guru Tanah Air masih kalah jika dibandingkan dengan Korea Selatan dan Jepang. Sebagai perbandingan untuk satu guru Indonesia baru mampu mendidik siswa sekitar 17 orang, sementara untuk Korea Selatan perbandingan sudah mencapai 1:30 dan Jepang 1:26 siswa, sehingga dengan penambahan tunjangan profesi itu kualitas guru terus meningkat. “Target kita 1:32,” kata dia.

Menurut Anies, besarnya anggaran profesi yang dikucurkan untuk guru, karena selama ini mayoritas guru yang ada merupakan pegawai negeri sipil di tiap daerah, sehingga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. “Karena itulah



transfer dana terbesar ke sana, itu salah satu yang ingin kami dorong,” ujarnya.

Sesuai dengan peraturan bersama lima Kementerian, Anies berharap pendistribusian guru ke depan bisa dilakukan dengan adil, sehingga kebutuhan pengajar yang handal mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Suasana koordinasi yang kami lakukan sangat mendukung dan saling *support*,” ucap Anies. / Muhammad Nasrul Hamzah

KSAL Ingin Perempuan Jadi Komandan Kapal Perang

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ade Supandi mengatakan dirinya akan memberikan kesempatan luas bagi kaum perempuan untuk meniti karier di Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal). Keputusan itu diambil guna meningkatkan kesetaraan gender di TNI Angkatan Laut.

“Kowal bukan lagi ditempatkan di dapur, sudah saatnya duduk di posisi strategis,” ucap Ade kepada wartawan di Markas Besar TNI AL, Jakarta, Selasa, (13/1).

Lebih lanjut Ade mengatakan dirinya berharap agar prajurit wanita TNI AL dapat menjadi komandan



kapal perang. Seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, dimana salah satu anggota Kowal menjadi komandan kapal patroli. Dimasa depan, tidak menutup kemungkinan ada prajurit Kowal yang menjadi komandan kapal perang besar kelas fregat.

“Di AL Belanda, ada perempuan yang jadi komandan kapal kelas fregat. Bahkan, di Prancis, panglima armadanya perempuan,” kata Ade.

Oleh karenanya, lanjut Ade, dirinya akan menambah porsi Kowal di Angkatan Laut.

Saat ini jumlah anggota Kowal baru sekitar 5 persen. Dia berencana menambah jumlah prajurit wanita di TNI AL hingga 15 persen. “Tapi ingat, profesionalisme tetap utama. Kowal jangan merasa diistimewakan,” pungkas dia. ant/

Febrianto



Titik Tumpu Kinerja Jokowi Diuji

Masih segar diingatan 1 Oktober 2013 lalu pemerintah Amerika menonaktifkan 800 ribu pekerja di sektor pelayanan publik. Ini adalah imbas dari buntutnya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif di Amerika mengenai program asuransi masyarakat yang disebut dengan program Obamacare.

Kubu Partai Republik meminta Presiden Amerika Barack Obama menunda program asuransi tersebut selama satu tahun. Namun Pemerintah tidak menyetujui usulan tersebut. Pengajuan anggaran pendapatan dan belanja negara 2013-2014 yang didalamnya berisi pengajuan utang, tak disetujui Kongres dari kubu Republik. Inilah yang menjadi pemicu *shutdown*.

Tanpa persetujuan ini, berarti Amerika tak memiliki uang untuk menggaji pekerja pemerintah. Sebab batas uang negara ini hanya sampai akhir September. Sementara tanpa persetujuan kongres, konstitusi Amerika tidak membenarkan Presiden Barack Obama memutuskan sepihak. Akhirnya benar saja kesepakatan tersebut tidak terjadi Amerika sempat menutup pelayanan publiknya kecuali di bidang keamanan dan kesehatan. 17 tahun lalu pemerintah AS juga mengalami *shutdown* di era Bill Clinton. Situasi yang sama menghantui Indonesia hari ini.

Pemerintah harap-harap cemas menjelang pembahasan rancangan revisi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Sepekan sebelum pengajuan revisi yang dijadwalkan 12 Januari 2015, sejumlah pejabat negara dipanggil Presiden Joko SWidodo (Jokowi) ke Istana Negara.

Selain Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pada hari yang sama juga dipanggil bekas Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Purnawirawan A.M. Hendropriyono. Pemanggilan pejabat dan tokoh penting di lingkaran Istana ini menunjukkan betapa sibuknya pemerintah menjelang pengajuan revisi APBN 2015 itu.

Sofyan Djalil maupun Bambang Brodjonegoro tampaknya sudah membayangkan kemungkinan bakal alotnya proses pembahasan di DPR. Bahkan Bambang beberapa kali mengelak menjawab rincian draf

revisi APBN-P 2015, meskipun di sisi lain dia meyakinkan bahwa draf revisi sudah tersusun rapi dengan program-program yang produktif.

“Kita bicara soal realisasi APBN 2014 dulu. Soal APBN-P 2015 (saya jawab) tergantung *mood*,” kilah Bambang dalam jumpa pers tentang realisasi APBN 2014 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 5 Januari 2015.

Bambang menegaskan bahwa dalam revisi APBN 2015 itu, pemerintah menyiapkan sejumlah program produktif yang menjadi fokus pembiayaan. Apalagi ada ruang fiskal senilai Rp 230 triliun yang bersumber dari optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi anggaran belanja subsidi BBM tahun 2014.

“Alokasi dana itu akan digunakan untuk kegiatan belanja produktif yang meliputi belanja infrastruktur, belanja sosial dan dana desa, dan lain-lainnya. Selain itu kita juga akan alokasikan buat *carry over* kewajiban membayar utang subsidi ke Pertamina,” ujar Bambang.

Dalam revisi APBN, porsi penggunaan dana yang diusulkan lebih banyak untuk infrastruktur dengan porsi lebih dari 50 persen. Ada tiga kementerian yang nantinya akan mendapat limpahan alokasi besar dari program ini, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

“Dana untuk program perlindungan sosial juga akan bertambah. Penyalurannya melalui

Kementerian Pendidikan dan



Kebudayaan dan Kementerian Sosial. Kisaran tambahannya bisa Rp 50-60 triliun. Kemudian dana desa juga ditambah,” ucapnya.

Selain untuk program, revisi APBN 2015 yang diusulkan pemerintah juga memasukkan pembayaran sisa utang subsidi BBM ke PT Pertamina (Persero) yang harus dibayar secara bertahap setiap tahun. Untuk tahun 2015, pembayaran *carry over* utang diajukan pemerintah sebesar Rp 25 triliun.

Bambang menjelaskan, pada tahun 2014 kewajiban *carry over* subsidi BBM ke Pertamina telah dibayar sekitar Rp 13 triliun dari total kewajiban sebesar Rp 46,27 triliun sehingga sisanya saat ini sebesar Rp 33,02 triliun.

“Tahun ini kita anggarakan pembayaran *carry over* Pertamina Rp 25 triliun dan sisanya tahun depan (2016). Ini untuk menolong kesulitan keuangan Pertamina,” tandas Bambang.

Dalam revisi APBN 2015, pemerintah memangkas subsidi BBM jenis Premium dan hanya menyisakan subsidi jenis solar, minyak tanah, dan elpiji dengan total alokasi sekitar Rp60 triliun.

“Subsidi BBM Premium memang tidak ada lagi. Tapi kan masih ada subsidi Elpiji, solar, minyak tanah sama *biofuel* dan segala macam. Solar saja sekitar Rp 17 triliun, elpiji 3 kg itu Rp 30 triliun. Kemudian kita masih utang sama Pertamina *carry over* tahun ini akan kita bayar Rp 25 triliun,” jelasnya.

Dari pemenggalan subsidi BBM ini, pemerintah setidaknya mendapat dana penghematan sekitar Rp 200 triliun. Sebab dalam APBN 2015 subsidi BBM awalnya diperkirakan sebesar Rp 276 triliun, sedangkan dalam revisi APBN 2015 kemungkinan hanya sekitar Rp 60 triliun.

Mengukur Daya Tahan DPR ‘Berpuasa’
Pengamat politik anggaran dari



Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menilai pembahasan anggaran di DPR akan membawa dua kemungkinan. Pertama adalah episode penghukuman bagi pemerintah dalam bentuk penghambatan program kerja; kedua adalah musim panen bagi anggota legislatif, baik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah maupun Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai personifikasikan sebagai oposisi pemerintah.

“Yang ingin saya katakan hanya satu. Memangnya ada yang kuat puasa lama-lama. Demikian juga soal pembahasan APBN perubahan 2015, saya melihat kecenderungan akan ada lobi yang melancarkan pembahasan ini,” kata Uchok.

Pada tahap awal, Uchok menilai pasti ada kekisruhan di internal DPR. Lama tidaknya konflik pembahasan revisi APBN 2015 akan tergantung kemampuan lobi pemerintah terhadap oposisi di parlemen. Konflik akan selesai manakala pihak pemerintah bisa melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR yang dikuasai KMP. Lobi-lobi ini tentu efektif kalau ada bagi-bagi anggaran.

Jika anggota Koalisi Indonesia Hebat pandai melobi pimpinan DPR, lanjut Uchok, maka semua beres karena pada dasarnya DPR adalah lembaga politik yang menjadi pusat pertarungan kepentingan.

“Tinggal tempatkan saja sosok yang ahli dalam tawar menawar. Siapkan saja tulang yang penyet, alias bisa bagi-bagi anggaran, maka revisi atau pembahasan anggaran jadi lancar *tuh* semua,” tandasnya.

Uchok ingin menegaskan bahwa ribut di DPR bukan soal fanatisme mendukung sosok Jokowi ataupun Prabowo. Tapi soal kepentingan. Suasana DPR diprediksi mulai kondusif dan normal memasuki triwulan II-2015 atau sekitar bulan April. Sebab pada masa itu akan jelas siapa dapat apa, dan bagian-bagian

mana yang menjadi fokus masing-masing anggota DPR.

“Kalau sekarang masih rebut, itu wajar karena masih mencari bentuk. Nanti kalau sudah jelas pembagian tulang yang empuk itu, maka semua jadi kondusif,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro mengatakan pemerintah bisa kesulitan mendapat kesepakatan anggaran dari DPR jika program-program yang diajukan tidak jelas arahnya. Para menteri dan pimpinan lembaga Negara sebagai wakil pemerintah harus bisa menjelaskan secara gambling program-program itu.

“Contoh program yang paling mungkin ditolak DPR itu misalnya bantuan sosial dalam kartu sakti yang dibuat Jokowi. Ini bisa dijegal di DPR karena sifatnya hanya memberi bantuan tapi tidak mendidik masyarakat untuk menjadi produktif,” ujarnya.

Demikian pula masalah subsidi BBM jenis premium yang dihapus. Pemerintah dituntut mampu menjelaskan kemana pengalihan subsidi itu, sehingga alokasi dana subsidi BBM yang diajukan dalam revisi APBN 2015 hanya tersisa Rp60 triliun.

Pemerintah juga harus bisa menjelaskan bahwa pengalihan subsidi itu memang dipakai untuk program produktif. Salah satunya pengembangan sektor pertanian, subsidi pupuk, subsidi bibit, dan sebagainya. Kalau tidak, maka bisa alot pembahasannya di DPR.

Hanya saja Setyo tidak melihat kemungkinan adanya *government shutdown* seperti yang pernah dialami Amerika Serikat ketika kongres negara tersebut tidak mencapai kata sepakat dalam hal anggaran pembiayaan.

“Kalau di kita (Indonesia) mungkin tidak sampai *shutdown*, tapi kesulitan iya. Sebab kita kan masih bisa pakai dana silpa atau sisa anggaran sebelumnya untuk pembiayaan,” tandasnya.

Deddy K



Dosa Konstitusional Pemerintahan Jokowi

Eskalasi politik pada awal paruh pertama tahun 2015 dimungkinkan tidak akan lebih baik dari suguhan politik terakhir di tahun 2014. Sikap saling curiga dua gerbong besar, partai pemerintah dan partai oposisi, berlanjut.

Muaranya ditentukan dalam pembahasan Pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Unjuk kekuatan kedua kubu itu membuat suhu politik berpotensi semakin panas, rumit dan berlarut-larut.

“Mungkinkah APBN-P 2015 yang akan diajukan pemerintah akan dibahas dan disetujui DPR tepat pada waktunya? Patut diragukan. Kalau persetujuan APBN-P 2015 tertunda, pemerintahan Jokowi-JK bisa mengalami stagnasi,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar, **Bambang Soesatyo**, kepada Aktual, Selasa (6/1) pekan lalu.

Stagnasi pemerintahan ini mengingatkan apa yang terjadi di Amerika Serikat, 2013 silam. Saat itu, negara adidaya dibawah kepemimpinan Barack Obama mengalami lumpuh alias ‘shutdown’ karena tidak mempunyai anggaran.

Itu terjadi setelah pengajuan APBN 2013-2014 yang berisi pengajuan utang pemerintahan Obama tidak disetujui Kongres dari kubu Republik. Kongres menolak peningkatan pagu utang, khususnya menyangkut anggaran kesehatan untuk asuransi bagi warga atau yang disebut Obamacare.

Tanpa persetujuan Kongres itulah pemerintah tidak mempunyai uang untuk menggaji para pekerja pemerintah. Di sisi lain, sesuai

konstitusi Amerika, Presiden Obama tidak dibenarkan memutuskan sendiri anggaran yang diajukannya. Konstitusi demikian juga mengatur pemerintahan Indonesia.

“Jokowi boleh punya ambisi dan rencana, tetapi konstitusi mengamanatkan bahwa pemerintah tidak boleh jalan sendiri. Untuk membiayai ambisi dan rencananya, pemerintah butuh persetujuan DPR,” kata Bambang.

Sejumlah program dan target pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang menurutnya terdengar merdu dan ambisius bisa menghadapi tembok besar. Apalagi jika pemerintah terus memainkan lakon harmoni semu dengan DPR.

Berakhirnya suguhan politik 2014, seharusnya disikapi Jokowi dengan membangun komunikasi yang baik dengan parlemen. Terlebih program-program pemerintah sedikit banyak diarahkan oleh tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai atau diwujudkan berdasarkan kesepakatan dengan DPR.

Sayangnya pemerintah seperti tidak mau belajar. Yang ada justru klaim-klaim sepihak bahwa hubungan pemerintah dengan DPR baik-baik saja. Bambang lantas menyinggung bagaimana instruksi Presiden tentang larangan sementara bagi para menteri untuk menghadiri undangan rapat kerja dengan DPR.

Sikap demikian



itulah gambaran sikap politik pemerintah ke depan, belum mau membangun komunikasi dan sinergi dengan DPR. Padahal, sinergi pemerintah dengan DPR adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh diingkari dengan alasan apapun.

“Menjadi dosa konstitusional jika pemerintah-DPR tidak bersinergi. Pihak yang menolak bersinergi akan langsung didakwa dengan tuduhan melanggar konstitusi,” kata dia.

“Bagaimana mungkin mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan produktif bisa terwujud jika pemerintah tidak bersungguh-sungguh membangun kemitraan dengan DPR?,” lanjutnya.

Alih-alih membangun komunikasi dan bersinergi dengan DPR, pemerintah justru membuat barisan partai oposisi berang. Dua partai





Sidang Paripurna DPR Anggota dewan mengikuti jalannya Sidang Paripurna DPR membahas revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

barisan oposisi, Golkar dan PPP, digoyang. Hal itu tercermin dari sikap dan keputusan pemerintah terhadap kisruh kedua partai tersebut. Adanya kepentingan partai pemerintah tersebut sangat kentara dan telanjang, memecah partai oposisi dan menariknya ke partai pemerintah.

“Koalisi ramping yang sejak awal diniatkan Jokowi semasa masih berstatus Capres ternyata hanya pepesan kosong. Dukungan empat Parpol belum mampu menumbuhkan kepercayaan diri sang pemenang Pilpres,” tegas Bambang.

“Sesungguhnya, kisruh di tubuh dua partai ini terjadi karena kerja kotor oknum penguasa yang memecah belah kesolidan partai dengan kekuasaan dan iming-iming jabatan,” kata dia.

Bambang memberi lima

catatan kepada Presiden dan partai pendukung pemerintah. Pertama, segera membangun komunikasi dan sinergi dengan DPR. Kedua, pemerintah hendaknya tidak usil mencampuri masalah internal partai politik. Ketiga, batasi segala bentuk politik balas budi kepada para bandar atau sponsor dan para pendukung saat pilpres yang dapat merugikan rakyat.

Keempat, kendati telah beberapa kali ingkar janji seperti janji koalisi dan kabinet ramping, menteri dan Jaksa Agung non parpol namun kali ini kita berharap Jokowi tepati janjinya untuk tidak merebut jabatan ketua umum PDIP pada Kongres PDIP mendatang.

Kelima, menghentikan segala bentuk intervensi dan campur tangan ke partai politik lawan. Karena

langkah tersebut bisa menjadi blunder politik yang membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan itu sendiri.

Ketua DPP PPP Ahmad Gozali Harahap mengingatkan agar pemerintah dan partai pendukung pemerintah legowo dengan dikuasanya parlemen oleh kubu oposisi. Sikap demikian pernah dilakukan kubu oposisi ketika kalah dalam pesta demokrasi lima tahunan berikut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sikap lapang dada ini sekaligus memberikan ruang bagi partai oposisi untuk memberikan kritik dan pengawasan terhadap program-program pemerintah. Bukan semuanya coba dirangkul namun prosesnya melalui cara-cara kotor.

“Pemerintah harus berlapang dada, pemerintah harusnya *fair*, tidak perlu terlalu jauh melakukan intervensi terhadap parpol yang tidak searah dengan dia. Yang tidak seragam lalu dia intervensi, diobok-obok, digoyang, itu cara-cara yang kotor menurut saya,” katanya disela-sela Harlah PPP ke-42 di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.

Cara-cara demikian diyakini justru menjadi blunder, karena akan memunculkan perlawanan yang semakin besar. Barisan partai oposisi juga akan semakin solid dan mendapatkan simpati publik.

Disampaikan Gozali, DPP PPP pada awalnya sempat terbersit untuk menerima pinangan partai pendukung Jokowi. Akan tetapi, melihat gelagat yang tidak baik dari partai pemerintah, PPP urung melakukan hal itu.

Ke depan, PPP paska diobok-obok partai pendukung Jokowi akan semakin solid. Program-program pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat akan ditolak dengan tegas bersama partai oposisi lainnya.

“Sepanjang itu demi dan untuk kepentingan rakyat kita akan dukung, tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat kita akan *fight* untuk melawan,” jelasnya.

Soemitro



Sesi Drama Para Wakil Rakyat Bertopeng Kinerja

Pasca dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1 Oktober 2014, publik lagi-lagi disuguhkan drama konyol, bertajuk "Perseteruan Dua Kubu di Komplek Parlemen Pusat" yang dilakukan dua kubu yakni Kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang beranggotakan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKB, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Versi Surabaya dan dikomandoi oleh PDI Perjuangan dan Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan anggota Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), PPP versi Jakarta dengan komando ditangan Partai Gerindra.

Drama ini berawal saat pertarungan memperebutkan kursi RI 1 pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang kemudian dimenangi Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang mendapat dukungan KIH dengan mengalahkan pasangan Prabowo -Hatta yang didukung KMP.

Perseteruan tidak lantas berhenti sampai disitu, bahkan kemudian berlanjut ke Gedung Parlemen dengan adanya perebutan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR ditambah lagi sejumlah pasal di UU MD3 yang dinilai kubu KIH selaku pendukung Pemerintahan Jokowi-JK dapat berpotensi melemahkan pemerintahan melalui hak interpelasi, angket dan menyatakan DPR di tingkat komisi.

Di periode berikutnya, pertikaian diantara kedua kubu kemudian mereda setelah KIH dan KMP sepakat untuk melakukan penandatanganan terkait dengan revisi Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) diakhir Masa Persidangan Tahap Pertama di tahun 2014, yakni pada Sidang Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 Desember 2014.

Pada malam itu, Ketua DPR Setya Novanto memotong tumpeng nasi kuning dan kemudian memberikan potongan nasi tersebut ke Menkumham Yasonna H Laoly, Ketua Fraksi PDIP Olly Dodokambey dan ke beberapa Ketua Fraksi Parpol anggota KMP dan KIH.

Menyoroti hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Andi Irman Putra Sidin mengatakan tidak mungkin Indonesia mengalami *shutdown*, dengan adanya pertikaian di DPR yang setiap saat akan mengintai pada tahap berikut pasca reses. "Insya Allah, tidak akan terjadi *shutdown*. Karena yang terjadi sekarang hanyalah bentuk dari polarisasi, DPR tetap satu, tidak ada perpecahan. Di negara manapun polarisasi itu bisa terjadi, "ujarnya di Jakarta, Senin (5/1).

Lebih lanjut Irman mengingatkan biarkan partai penyeimbang tetap hidup sebagai bentuk Negara demokrasi dan jangan kemudian *diobok-obok* demi sebuah kepentingan.

Publik Bertanya Soal Kinerja Akibat Kisruh Di DPR

Pendapat miring kemudian terlontar dari masyarakat, publik kemudian bertanya-tanya, apa saja yang dilakukan para anggota dimasa konflik tersebut? Karena mereka menilai kinerja para wakil rakyat periode 2014-2019, dirasa kurang optimal dalam memperjuangkan aspirasi mereka yang kemudian



diwakilkan kepada anggota DPR.

Pendapat miring tersebut kemudian disanggah oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Susiantomo. Sigit mengatakan selama ini pihaknya (Kubu KMP) sudah bekerja secara maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Anggota DPR dari Dapil Jatim I pun membantah jika terjadi kevakuman di DPR selama ini. Alasan yang dikemukakan oleh Sigit sederhana, yakni ditandainya dengan digelarnya Sidang Paripurna sebanyak empat



PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN.

Suasana pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Serayan, Jakarta, Rabu (1/10). Biaya anggaran yang ditetapkan dalam pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih sebesar Rp 16 miliar. Biaya tersebut di antaranya digunakan untuk penginapan anggota Dewan terpilih sebelum dan sesudah pelantikan di tiga hotel berbintang.

kali. Yang mana, setiap Sidang Paripurna memiliki beberapa agenda yang berbeda, diantaranya membahas pembentukan alat kelengkapan dewan, membahas dan menetapkan mitra kerja untuk tiap komisi di DPR. “Begitu juga saat masa reses, Komisi V yang diikuti kedua belah kubu telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah, termasuk memantau secara langsung pencarian badan pesawat AirAsia QZ 8501 saat berada di Kapal BPPT Baruna Jaya 1 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu 3 Januari lalu,” kata

Sigit.

Pembelaan atas kinerja anggota DPR tidak hanya datang dari Sigit, tetapi juga berasal Anggota Komisi X DPR, Popong Otje Djunjuran. Menurut Politisi Senior Partai Golkar, selama ini anggota DPR telah menjalankan fungsinya secara maksimal. Seperti yang ditunjukan Popong dimasa reses pada masa sidang pertama. Popong menggelar pertemuan yang dihadiri oleh berbagai kalangan yang menjadi konstituennya, seperti para guru, pelajar, mahasiswa

dan juga berasal dari organisasi masyarakat. “Reses sendiri saya manfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat, dan memaksimalkan tugas saya sebagai anggota dewan diluar Gedung Parlemen. Terkait dengan hak dan kewenangan DPR, yakni melakukan fungsi pengawasan, anggaran,” ujar Popong di Bandung, Senin (5/1).

“Selain itu, bagi saya, reses bukan istirahat total, tetapi tetap bekerja dengan melakukan silaturahmi politik guna membangun komunikasi, sebagai investasi membangun dan



mempererat jaringan serta untuk mendapat dukungan politik, menyerap aspirasi masyarakat. Dan sebagai upaya sebagai pembelajaran politik bagi konstituen saya," tambah dia.

Selain itu, selama masa reses kata Popong, dirinya bersama tim yang berasal dari komisi tempatnya bekerja menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat telah melakukan beberapa kunjungan kerja, diantaranya ke Provinsi Jawa Barat. "Dengan menyambangi Gedung Sate Jalan Diponegoro Bandung, Selasa (16/12/2014) untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Salah satu agenda kunjungan yakni pembahasan beberapa materi program Pemprov Jawa Barat, terkait dengan kesiapan Provinsi Jawa Barat menghadapi PON 2016," kata Popong.

Popong mengatakan sebagai wakil rakyat, dirinya perlu mengetahui bagaimana kesiapan terkait sarana dan prasarana, anggaran, serta koordinasi antara Jawa Barat sebagai tuan rumah dengan tingkat pusat. Pemprov Jabar lanjut Popong, pada PON Jabar yang akan digelar tahun 2016 mendatang sendiri, telah mencanangkan catur sukses, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses perekonomian rakyat, dan sukses administrasi. "Dengan demikian, diharapkan nantinya pelaksanaan PON Jabar 2016 bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti," harap Popong.

Tak mau kalah dengan koleganya di KMP, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno. Di masa reses Teguh mengaku telah menggagas konsep baru untuk program kerjanya semacam *town hall meeting* yang diadopsi dari negeri Paman Sam. Tetapi sambung Teguh, kemudian konsep tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia dalam bentuk Panggung Pendopo Rakyat (Pandora).

Nantinya sambung dia seluruh masyarakat dari semua kalangan dapat hadir ke acara yang dilangsungkan di Pandora. Selain itu, Teguh mengatakan



Komplek perumahan DPR-RI di Kalibata

telah melakukan kegiatan advokasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di salah satu dapilnya. Selain mensosialisasikan program pemerintah bagi masyarakat kalangan menengah bawah itu, Teguh juga ikut memfasilitasi warga setempat untuk ikut serta menjadi anggota BPJS kesehatan.

Kegiatan sosialisasi pada masyarakat dimasa reses juga ditunjukkan oleh Politisi Partai Golkar Meutya Hafid. Meutya mengaku telah menggelar acara pertemuan dengan konstituennya untuk membahas masalah kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesuai dengan Komisi I DPR yang dibidangnya yakni masalah telekomunikasi dan hubungan luar negeri.

Pertanyaan publik tak lantas berhenti sampai disitu, pasalnya mereka juga mempertanyakan, apakah pantas jika kemudian para anggota dewan mendapat gaji dan tunjangan penuh bagi kubu koalisi yang dinilai belum bekerja secara optimal. Dengan tegas politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan tidak sepatutnya anggota DPR yang belum bekerja secara optimal mendapat gaji dan tunjangan penuh. "Tentu saja tidak pantas, gaji dan tunjangan

penuh diberikan kepada anggota DPR yang bekerjanya secara optimal sebagai wakil rakyat, seperti yang ditunjukkan oleh 50 Fraksi PD selama ini. Sebagai penyeimbang, tidak perlu khawatir kami akan bekerja dengan baik, berbeda dengan yang lainnya, mereka terlalu berpolitik," tegas Ruhut di Jakarta, Selasa (6/1).

Dana Reses Besar, Fungsi Mandul Dan Rakyat Kelimpungan

Jumlah anggaran reses bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014, hampir mencapai Rp 1 Triliun. Namun ironisnya, dana tersebut tidak ada imbal balik dan manfaatnya tidak dapat diperoleh langsung oleh rakyat, seperti diungkap Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi.

Uchok mengatakan di tahun 2014, anggaran yang ditetapkan bagi anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) mereka adalah sebesar Rp 994,9 miliar. Lebih lanjut Uchok mengatakan anggaran reses ini melonjak secara signifikan ketimbang dengan anggaran reses tahun sebelumnya, hanya sebesar Rp 678,431 Miliar.

Dengan demikian sambung Uchok



jika dihitung ada kenaikan sebesar Rp 316,471 miliar atau 44 persen. Sementara pada tahun 2012, anggaran reses DPR dalam rangka penyerapan aspirasi hanya sebesar Rp 539,481 Miliar.

Jika anggaran Rp 994,9 miliar itu kemudian dibagi kepada 560 anggota DPR, kata Uchock setiap orang akan memperoleh dana sebanyak Rp 1,7 miliar per tahun. Dan setiap tahun ada 11 reses, maka setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp 161,5 juta.

Namun Uchock menilai jika mahalnya biaya reses anggota dewan tidak sebanding dengan kinerja yang diperlihatkan mereka dan terkesan mubazir. Pasalnya, kata Uchock tujuan dan fungsi reses akan menjadi “mandul” karena kegiatannya membosankan konstituen, dan dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional.

Bagaimana Reses Di Negara Lain

Di negara lain, masa reses berbeda dengan apa yang terjadi Indonesia, metode kunjungan kerja tidak menjadi metode yang berdiri sendiri. Selain melakukan kunjungan kerja, biasanya anggota senator juga kerap melakukan pertemuan konstituen, membuka sekretariat pengaduan masyarakat, membuka kotak pos dan email pengaduan masyarakat, bahkan juga menerbitkan publikasi tentang perkembangan pengaduan tersebut. Seperti yang terjadi di negara tetangga, Filipina.

Di Filipina, para senatornya membuka kantor sekretariat yang selalu *stand by* menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat. Tak hanya sebatas itu, para senator di Filipina juga mengeluarkan terbitan tentang perkembangan usulan masyarakat di parlemen. Sebut saja bagaimana ketika mereka memperjuangkan kebutuhan masyarakat akan sarana air bersih

atau pelayanan kesehatan.

Dengan demikian hasil kerja para senator semuanya terdokumentasi dan terpublikasikan secara baik, sehingga kontrol dari masyarakatpun dapat berlangsung. Tetapi fakta berbeda dijumpai di Indonesia, alih-alih menerapkan berbagai metode secara paralel, satu-satunya metode yang dipilih pun tidak diindahkannya.

Sudah menjadi rahasia umum kemudian, jika sejumlah anggota dewan disini, ada yang tidak pernah melakukan kunjungan kerja pada masa reses. Meskipun mereka kerap pulang ke daerah pemilihan, tetapi mereka hanya sekedar menjalin pertemuan dengan sanak saudara atau pun tim sukses yang berhasil memenangkan dirinya menjadi anggota DPR. Padahal tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai kepergian anggota DPR ke setiap daerah pemilihannya itu.

 Deddy K

Dompot Buncit Raja Daerah

Publik kembali dihebohkan dengan munculnya isu transaksi mencurigakan dalam bentuk rekening gendut. Kali ini kepemilikannya bukan lagi berasal dari kalangan penegak hukum, maupun pegawai negeri sipil. Tetapi berasal dari mereka yang masih menjabat kepala daerah ataupun mantan kepala daerah.

Petunjuk tersebut datang dari Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) **Muhamad Yusuf**. Dalam keterangannya pada pertengahan Desember tahun lalu dikatakan, sepanjang tahun 2014 telah ditemukan transaksi mencurigakan yang melibatkan sekitar 50-an kepala daerah dengan total transaksi mencapai angka triliunan Rupiah.

Sementara itu, transaksi mencurigakan tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Analisa (LHA) maupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kedua laporan tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dituntaskan.

Dalam LHA disebutkan PPATK telah menemukan rekening gendut yang dimiliki oleh 26 bupati dengan nilai total transaksi mencapai Rp 1,3 triliun. Seolah tak mau ketinggalan bawahannya, 12 gubernur diduga juga ikut-ikutan memiliki rekening gendut dengan angka transaksi

yang cukup besar yakni mencapai Rp 100 miliar. Tak hanya sebatas itu pula, PPATK juga menemukan salah satu istri gubernur yang dicurigai telah melakukan transaksi dengan angka yang cukup besar, senilai Rp 15 miliar. Selain itu, ada dua wakil bupati juga tercatat memiliki rekening gendut mencapai angka Rp 1,8 miliar. Satu wakil gubernur dengan nilai total transaksi Rp 300 juta. ditambah lagi dengan rekening gendut yang dimiliki oleh dua wali kota senilai Rp 1,8 miliar dan 1 anak bupati senilai Rp 3 miliar.

Sedangkan berdasarkan hasil LHP, PPATK melaporkan jika pemilik rekening gendut tersebut adalah dua gubernur dengan nilai total transaksi mencapai angka Rp 200 miliar. Terkait masalah ini, PPATK juga telah melakukan pemeriksaan atas rekening gendut yang dimiliki enam bupati, dengan jumlah total transaksi keseluruhan mencapai Rp 500 miliar. Begitu juga dengan rekening gendut yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang diduga terkait dengan Mantan Bupati Fuad Amin Imron dengan nilai transaksi lebih dari Rp 300 Miliar. Pasalnya Politikus

Gerindra diduga rutin menerima setoran uang sogokan dari Media Karya sebagai imbal jasa untuk



Muhamad Yusuf



menyukseskan perolehan pasokan gas dari PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore.

Berdasarkan data yang telah diolah, disebutkan PPTAK telah melakukan analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM). Pada tahun 2013 PPATK menemukan uang senilai Rp 15 triliun sampai dengan Rp 20 triliun yang terindikasi korupsi. Ditahun 2013 PPATK juga telah menerima laporan LKTM sejumlah 41.940 laporan, angka ini



Nampak di Layar screen foto barang bukti uang yang ditemukan di Rumah Fuad Amin yang ditayangkan oleh KPK pada saat keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

mengalami kenaikan ketimbang tahun 2012 yakni 31.021 laporan.

Disini dapat dikatakan bahwa transaksi keuangan yang dapat dikategorikan mencurigakan jika nilai transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil pekerjaan pemilik rekening atau frekuensi transaksi yang dilakukan diluar kebiasaan yang wajar.

Terkait dengan permasalahan rekening gendut, PPTAK berharap agar instansi penegak hukum bekerja

cepat untuk menuntaskan kasus rekening gendut dan menjebloskan pemiliknya ke dalam penjara. Tetapi faktanya, kasus hukum tersebut masih saja mangkrak di Kejaksaan Agung maupun di Kepolisian.

Lagi-lagi prestasi kemudian dipertontonkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan aksinya menciduk mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, yang juga disinyalir sebagai salah satu pemilik rekening gendut kepala

daerah. Bahkan KPK sendiri sudah menetapkan status Fuad sebagai tersangka korupsi dan menjebloskan kedalam rumah tahanan KPK.

“Tertangkapnya Fuad, dapat dijadikan pintu masuk aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus rekening gendut, karena Fuad diduga sebagai salah satu pemilik rekening gendut. Penangkapan Fuad sendiri adalah pengembangan kasus rekening gendut yang disampaikan PPTAK

kepada KPK,” tegas Peneliti Divisi Investigasi Publik dan Investigator ICW. Tama S Langkun.

Namun demikian Tama menyesalkan respon yang ditunjukkan kedua instansi penegak hukum lainnya yang dianggap belum bekerja secara optimal untuk menindaklanjuti laporan PPTAK terkait rekening gendut kepala daerah.

“Padahal, laporan yang dibuat PPTAK berupa laporan hasil pemeriksaan yang berisikan data detil, siapa pemilik rekening, siapa yang memberi. Dan laporan tersebut yang dibuat secara komprehensif sehingga mereka dapat langsung bekerja untuk menindaklanjuti laporan dan temuan PPATK untuk menjerat kepala daerah pemilik rekening gendut untuk dijadikan tersangka,” sesal Tama.

Bantahan Kejaksaan Agung

Pembelaan kemudian datang dari Kejaksaan Agung, seperti diungkap oleh Kepala Sub Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Sarjono Turin, Kejaksaan Tinggi Bali pada Juli 2014 telah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan rekening gendut kepala daerah, kini berkasnya sedang dalam tahap pra penuntutan untuk segera dibawa ke pengadilan. Adapun tersangka yang dimaksud adalah I Wayan Candra, mantan Bupati Klungkung Bali Periode 2008-2013.

I Wayan sendiri dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus pengadaan Dermaga Gunaksa Bali pada tahun 2007 silam. Akibat ulahnya tersebut, negara kemudian dirugikan sebesar Rp 8 miliar. Sangkaan pencucian uang yang ditujukan kepada I Wayan terkait dengan ditemukannya aliran dana ratusan juta rupiah direkeningnya dari dan kerekening perusahaan yang dimilikinya yakni Bali Perkasa Internasional dan Bahtera Sujud Anugerah.

Uang haram tersebut diduga berasal dari pemberian *fee* dari

makelar tanah, pasalnya waktu transaksi dianggap tidak terpaut jauh dengan proses pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga tersebut.

Pengusutan atas kasus I Wayan sendiri merupakan pengembangan atas temuan PPTAK pada akhir 2012 yang lalu. I Wayan adalah satu dari 10 pemilik rekening gendut yang dilaporkan oleh PPATK yang memiliki rekening tambun dengan nilai total diatas Rp 1 triliun.

Selain I Wayan, Kejaksaan Agung juga telah memasuki tahap penyidikan terkait pengusutan dugaan rekening gendut yang dimiliki Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur diduga telah menerima uang sebesar USD 4,5 juta yang dilakukan dengan empat kali transfer dari sebuah rekening perusahaan tambang sepanjang 2010. Modus yang digunakan Nur yakni menyamarkan uang tersebut dengan polis asuransi.

Tak hanya Nur Alam, mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo atau yang akrab dipanggil Foke dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjadi target sasaran pengusutan berikutnya oleh Kejaksaan Agung.

Dalam kasus tersebut dikatakan ada aliran dana yang mencurigakan ke rekening Foke pada bulan Februari-Desember 2012, dengan nilai total Rp 60 Milyar. Dana tersebut kemudian dikaitkan dengan pertarungan Foke pada Pilgub DKI 2012. Aliran dana tersebut terlacak

melalui proses pemindahbukuan dari rekening dua perusahaan penampung uang, dan perusahaan tersebut menerima uang dari lima perusahaan di luar negeri. Dua diantaranya tercatat berasal dari Hongkong dan Inggris.

Sedangkan dalam catatan rekening gendut yang dimiliki oleh Alex Noerdin, tercatat jika pada tahun 2008 terdapat transaksi mencurigakan. Dalam rekening tersebut, terlihat Alex menerima uang sebesar Rp 12,2 miliar yang berasal dari 9 perusahaan di Musi Banyuasin. Untuk mengelabuinya aliran uang haram tersebut, Alex menggunakan jurus *pass by* atau transaksi singkat yang dapat dicairkan. Uang tersebut diduga sebagai gratifikasi pada saat Pilkada Sumsel berlangsung.

Tak hanya itu, pada Mei 2011, isteri Alex, Eliza juga diduga

Sarjono Turin





Wayan Candra



Alex Noerdin

menerima aliran dana sebesar Rp. 1,9 miliar. Uang yang diduga sebagai gratifikasi itu berasal dari salah satu rekening direktur perusahaan rekanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam kasus ini modus yang dipergunakan adalah pola transaksi *real time gross settlement (RTGS)*.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012, harta kekayaan Foke mencapai Rp 46,9 miliar dan USD 200 ribu. Foke sendiri telah dua kali melaporkan harta kekayaannya, yakni pada 31 Mei 2007 dan 26 Juli 2010. Secara fantastis, dalam tiga tahun itu harta kekayaan Foke bertambah menjadi Rp 13,9 miliar. Dan tahun 2007, kekayaan Duta Besar Jerman tercatat Rp 33 miliar. Dan harta kekayaan yang dimiliki Alex pada 7 Maret 2013 Rp 25,9 miliar.

Untuk pengusutan sejumlah kasus korupsi yang kini mangkrak penyidikannya, Kejaksaan Agung berencana untuk membentuk satgas anti korupsi yang nantinya berisikan jaksa-jaksa berpengalaman yang ditarik dari KPK dan daerah. Kedudukannya berada di bawah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, yang selama ini menangani kasus-kasus korupsi.

Modus Bertransaksi Libatkan Orang Dekat

Dalam menjalankan aksinya, kepala daerah ataupun penyandang status mantan kepala daerah pemilik rekening gendut tidak lagi melakukan cara-cara transaksi modern dengan langsung memanfaatkan jasa perbankan yakni melalui transaksi antar bank, tetapi beralih ke cara lama yakni bertransaksi konvensional, bertransaksi secara tunai. Dimana, pemberi suap dan penerima suap dapat datang langsung ke rumah, ke kantor atau bertemu di suatu tempat, untuk menyerahkan uang sogokan tersebut secara tunai. Cara ini mereka anggap cukup ampuh untuk bertransaksi secara haram dan untuk mengelabui aparat penegak hukum dan PPATK.

Modus yang mereka jalankan tak lantas berhenti sampai disini, uang haram hasil sogokan tersebut kemudian disimpan ditempat khusus ataupun disetorkan ke bank dengan menyatut nama lain, sebut saja memakai nama isteri, anak, sopir, sanak famili, atau perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Mantan Ketua MK Aqil Mochtar.

Berikut ini adalah 10 modus yang biasa dilakukan oleh tikus-tikus koruptor untuk menghalalkan uang hasil korupsi yang didapatnya, yakni pertama, mereka membeli

aset bergerak dan tidak bergerak. Kedua, membeli saham atau surat berharga lainnya. Ketiga, bermain di pasar modal di negara lain tentu saja bukan memakai nama sendiri tetapi atas nama orang lain. Keempat, penjualan Multi Level Marketing (MLM) dengan memakai sistem jaringan viral. Kelima, berkedok badan amal seperti yayasan. Keenam, memakai rekening atas nama orang lain. Ketujuh, menggunakan akad perjanjian kredit atau sejenisnya. Kedelapan, membeli lotere atau undian. Seolah-olah uang yang diperoleh berasal dari hasil undian. Kesembilan, menggunakan sejumlah media *credit card* untuk pencucian uang hasil korupsi. Dan terakhir yakni melalui jalan pernikahan antar bangsa, sehingga hasil hasil korupsi tersebut dapat disimpan di negara lain.

PPATK Macan Kertas

Temuan PPATK terhadap rekening buncit pejabat negara sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya lembaga ini juga sempat mengungkap sejumlah rekening tak wajar milik perwira tinggi polri. Setidaknya ada 5 perwira tinggi yang saat itu dilaporkan PPATK.

Mantan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Mateus Salempang, Kepala Korps Brigade Mobil Polri, Irjen Sylvanus Yulian Wenas. Komjen Budi Gunawan yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Profesi dan Pengamanan, Wakapolri Badrodin Haiti, Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji disebut sebagai pemilik rekening tak wajar tersebut. Namun penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tidak mengungkap temuan tersebut.

Melihat temuan baru milik pimpinan daerah ini koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman pesimis akan tuntas. "Saya melihat kali ini lebih politis. Kalau KPK benar dan PPATK mau harusnya yang dulu-dulu tuntaskan dulu. Jangan tebang pilih capek juga publik lihat aksi tong kosong ini," ujarnya.

By Deddy K





SIAPA MENYUSUL BUDI GUNAWAN

Pagi itu, Selasa (13/1) menjadi hari yang berbeda bagi Susilawati Rahayu. Di rumahnya jalan Duren Tiga Barat VI No 21, Jakarta Selatan sejak pagi ia sudah disibukkan menyiapkan kudapan dan minuman untuk menyambut tamu. Rombongan Komisi III DPR RI memang hari itu akan berkunjung ke kediaman Susilawati istri calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol Budi Gunawan.

Kunjungan rombongan Komisi Hukum DPR tersebut merupakan rangkaian dari proses *fit and proper test* untuk menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri ini sebagai Kapolri. Tingga selangkah lagi siswa terbaik Akademi Kepolisian 1983 ini memimpin Polri. Namun mimpi Budi buyar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tiba-tiba menetapkan mantan Kapolda Bali ini menjadi tersangka. “Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, akhirnya KPK menemukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan,” ucap Ketua KPK Abraham Samad, pukul 14.00 WIB di kantornya, Kuningan Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, Budi dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ia diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan.

Pengumuman mengejutkan di kantor anti rasuah tersebut tidak membuat kesibukan di kediaman Budi batal. Dua bus berlogo DPR RI datang ke rumah tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Budi sang tuan rumah menyambut dengan hangat ditemani Susilawati. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa, anggota Komisi III Aboebakar Al Habsyi, Nasir Djamil, Sarifudin Sudding, Junimart Girsang, dan Patrice Rio Capella dan anggota lain.

Budi di depan anggota Komisi III tersebut pasrah akan nasibnya. Namun ia menyebut ada yang ingin mengagalkan pencalonan dirinya. “Saya melihat ada manuver-manuver kepentingan lainnya,” kata Komjen Budi Gunawan di depan rombongan Komisi III.

Mantan Kapolda Jambi tersebut juga menyebut adanya tindakan sewenang-wenang atas penetapan dirinya. “Kalau memang itu

kenapa baru sekarang pada saat pencalonan Kapolri. Banyak sekali kepentingannya. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kami tidak ingin ada yang berlaku semena-mena menzalimi orang lain,” ujar Komjen Budi.

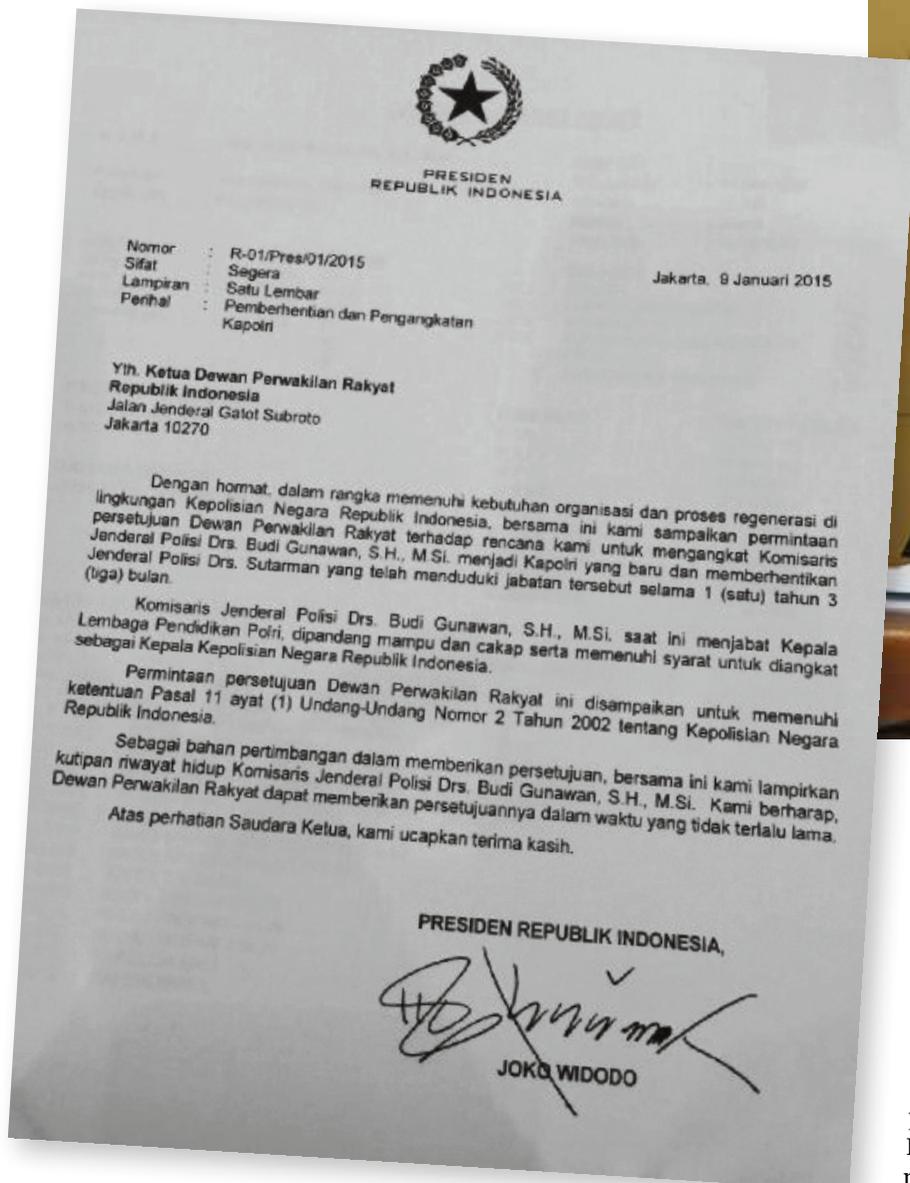
Penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK telah mencoreng wibawa Polri. “Ini bukan masalah Budi Gunawan, ini masalah kewibawaan negara dan institusi Polri,” tegasnya.

Susilawati sendiri yakin suaminya tidak bersalah. “Menyikapi kejadian yang baru kami lihat di televisi, kami

berserah kepada Allah, tentunya yang baik, yang benar akan terlihat. Kami ikhlas. Kami yakin dan percaya kebaikan, kebenaran, akan terlihat juga,” ujarnya.

Manuver KPK terhadap pencalonan Budi memang sudah ditunjukkan sejak Presiden Jokowi mengirimkan surat pemberitahuan penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kapolri tanggal 9 Januari lalu. KPK merasa ditinggalkan oleh Jokowi dalam menilai calon Kapolri. Pasalnya lembaga ini sebelumnya disertakan oleh Jokowi dalam menilai calon Menteri Kabinet Kerja. “KPK sebaiknya dilibatkan dan

Ketua KPK Abraham Samad (tengah) berdiri didampingi Wakil Ketua Bambang Widjojanto, saat akan memberikan keterangan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1/2015).



ini dilakukan terus-menerus untuk kemaslahatan publik, tapi kalau ternyata tidak dilibatkan, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Sabtu (10/1).

Reaksi dari kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga keras menentang pencalonan mantan ajudan Presiden Megawati tersebut. “Ini menunjukkan Jokowi tutup mata



ketika memilih Kapolri. Ini kami nilai sebagai suatu skandal politik yang dilakukan Jokowi,” kata Koordinator Divisi Hukum ICW Emerson Yuntho dalam jumpa pers di Warung Daun, Jakarta, Minggu (11/1).

Jokowi, kata Emerson, telah melanggar program ‘Nawacita’ yang dielu-elukan sejak kampanye. Di mana satu di antara sembilan poin tersebut yakni akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang profesional, berintegritas dan bersih.”Kini

faktanya Jokowi tidak menjalani proses penjarangan itu melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Emerson.

Diusulkannya Budi memang tidak lepas dari pengaruh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sama seperti saat Megawati mengusulkan sejumlah nama untuk masuk dalam kabinet kerja. Namun saat itu nama yang diusulkan oleh Megawati gagal masuk setelah mendapat cap merah

dari KPK. Budi Gunawan salah satunya. “Komjen BG saat pencalonan menteri yang bersangkutan sudah diusulkan dan saat itu KPK beri catatan merah,” jelas Samad.

Sejak awal KPK memang sudah mengingatkan Jokowi untuk tidak menggunakan nama-nama calon menteri yang mendapatkan rapor merah dan kuning. Abraham mengancam akan menetapkan calon menteri dengan stabilo merah paling lambat 1 tahun. Sementara

calon dengan warna kuning akan ditetapkan paling lambat 2 tahun.

Menanggapi penetapan Budi sebagai tersangka ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memiliki pandangan tersendiri. "Sebelum ini saya menilai meski selalu berani, KPK itu biasa saja karena tugasnya memang begitu. Tapi hari ini saya nilai KPK beraninya luar biasa," ujarnya.

Namun keberanian tersebut ditantang oleh Mahfud dengan menagih nama-nama lain berstabilo untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. **"Agar tidak dinilai politis KPK harus segera melakukan dua hal. Pertama calon menteri lain yang di stabilo merah segera dijadikan tersangka. Kedua yang sudah tersangka segera diadili,"** ujarnya.

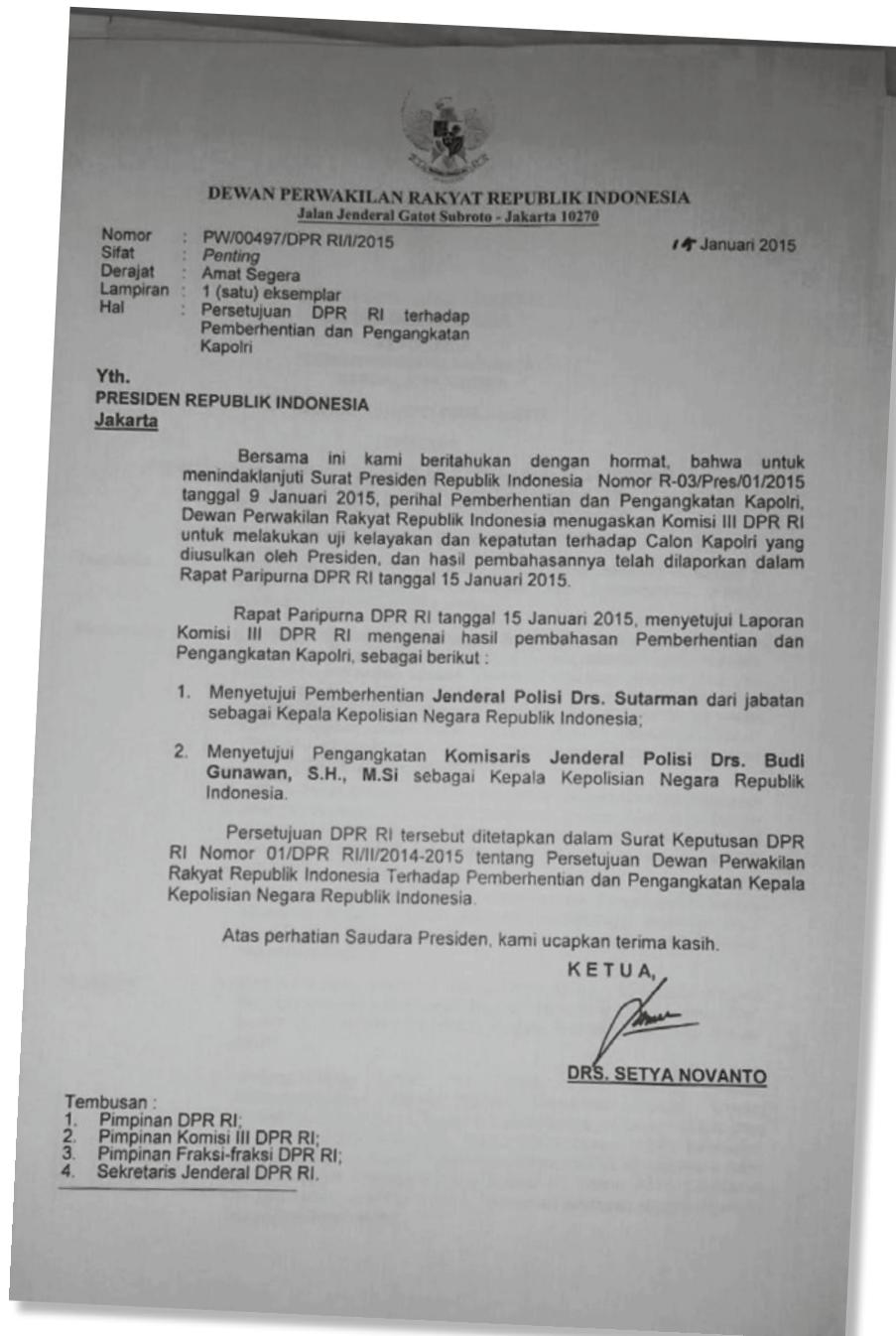
Seperti diketahui saat Jokowi menetapkan jajaran Menteri Kabinet Kerja memang sejumlah nama

menteri menjadi sorotan. Kuat dugaan sejumlah menteri yang saat ini membatu kerja Presiden juga mendapatkan stabilo dari KPK.

Budi Gunawan ini semakin memperpanjang nama calon pejabat Negara usulan dari rumah Megawati di Teuku Umar yang tersingkir dari pusat kekuasaan. Seperti kata politisi senior PDI-P Hendrawan Supratino ia sering diledek teman-temannya, bahwa PDIP itu pemenang tapi juga pecundang. Maksudnya, menang pemilu, tapi sering "kalah" dalam mendapatkan sejumlah posisi. Misalnya, kata Supratikno, dalam hal penunjukkan Ketua BPKM. Jago dari PDIP banyak dan sudah disiapkan, tapi yang dipilih malah orang lain yaitu Franky Sibarani. Calon Ketua BPKM dari PDIP yang banyak disebut misalnya, Daniel Lumban Tobing, Maruarar Sirait dan Sihar Sitorus. Tapi yang dipilih Franky, Sekjen Apindo, yang selama

ini dikabarkan dekat dengan Jusuf Kalla dan Sofyan Wanandi. Selain itu, jatah PDIP di kabinet juga sama dengan yang diperoleh Nasdem, yaitu 4 kursi. "Itu yang membuat saya diledek teman-teman. Bagi saya nggak apa-apa





akan menetapkan Budi sebagai Kapolri atas hasil *fit and proper test* Komisi III DPR. “Mudah-mudahan muluslah sampai paripurna. Kami diminta jalan terus sama ketua fraksi,” ujarnya.

Selain restu dari Megawati, Budi Gunawan juga tetap didukung oleh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh.

“Obyektif saja. Apakah Komjen Budi tidak punya kemampuan jadi Kapolri? Kalau diusulkan jadi Kapolri ya berarti punya kemampuan dong,” kata Sekjen NasDem Patrice Rio Capella.

Presiden Joko Widodo akhirnya juga memilih langkah senada dengan Megawati dan Surya Paloh. Setelah menggelar rapat kabinet terbatas Jokowi memutuskan menunggu hasil Rapat Paripurna DPR. “Kita menghormati KPK, tetapi ini juga ada proses politik yang ada di Dewan, kita menghargai Dewan. Saya masih menunggu paripurna DPR, mungkin nggak tahu (waktunya -red), setelah selesai itu nanti akan kita putuskan,” kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Wisma Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (14/1).

Sebelumnya memang Komisi III secara aklamasi menerima pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Seluruh Fraksi sepakat meneruskan pencalonan Budi hingga sidang paripurna. Hanya Fraksi partai Demokrat yang memilih untuk tidak menghadiri *fit and proper test* Budi.

Saat rapat paripurna digelar esok harinya kembali sleuruh fraksi kecuali Partai Demokrat menyetujui Budi sebagai calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden Jokowi. Siang itu surat keputusan paripurna langsung dikirim oleh Ketua DPR RI Setya Novanto ke Presiden.

Jokowi langsung menggelar rapat dengan anggota kabinetnya. Pertemuan juga digelar dengan

kalau jago kami dikalahkan jago orang lain,” katanya. PDIP ikhlas karena memegang teguh ajaran Bung Karno, yaitu *karmane vadne adi karaste mapaleshu kadacana*, yang artinya, kerjakan tugasmu tanpa berhitung apa yang akan kau dapatkan.

Namun kali ini Megawati bersikap lain. Ia tetap merestui Budi Gunawan sebagai Kapolri meskipun memiliki status tersangka. Pesan itu

disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Trimedya Panjaitan. “Pesannya ya kita diminta ‘jaga’ Komisi III. Fraksi kan kepanjangan tangan DPP, itu pesannya,” kata Trimedya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).

Bahkan Megawati meminta Fraksi PDI-P mengawal Budi Gunawan sampai ke Sidang Paripurna yang

pimpinan Partai pendukung. Usai menggelar pertemuan di Istana Negara pimpinan parpol pendukung kembali menggelar pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Demorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri hingga tengah malam.

Lewat tengah malam pertemuan selesai. Hasilnya seperti dikatakan oleh plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Mereka masih sepakat untuk mengangkat Budi. “Kan ini sedang berproses. Mau apa lagi? Kita akan mendapatkan Kapolri baru sebentar lagi,” ujar Hasto, di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2015) dini hari.

Hasto menilai ada tindakan arogan yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan Budi. “Jangan mentang-mentang berkuasa, mereka seperti kejar tayang begitu. Segala sesuatu itu ada prosesnya, ada mekanismenya,” ujarnya.

Keputusan di jalan Teuku Umar tidak langsung dijalankan dilakukan Presiden Jokowi. Sejak pagi Presiden menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait pengangkatan Kapolri. Kapolri Jenderal Sutarmanto dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diundang ke istana.

Siang hari keputusan mengejutkan dikeluarkan Presiden. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Suhardi Alius dicopot atas perintah Presiden. Suhardi digantikan oleh Irjen Pol Budi Waseso yang dekat dengan Budi Gunawan. Suhardi di mutasi ke Lemhanas menggantikan jabatan Sekretaris Utama menggantikan Komjen Boy Salamudin.

Pencopotan Suhardi seperti dikatakan oleh sumber Aktual di Mabes Polri karena ketidakloyalan Suhardi mengusung Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Manuver Suhardi malah disebut menghambat Budi. “Karena dia dekat dengan Ketua KPK dan PPATK, jadi malah tidak loyal,” ujar sumber.

Suhardi memang dekat dengan Abraham Samad. Keduanya sering

mengadakan pertemuan. Semuanya berawal saat Suhardi dan Abraham melakukan sidak bersama di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak saat itu keduanya terus berkordinasi menuntaskan sejumlah kasus. Bahkan Abraham Samad menemui Suhardi usai menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Usai melakukan mutasi pada Suhardi, Jokowi akhirnya mengambil keputusan. Yakni menunda pelantikan terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengangkat Wakapolri sebagai pejabat pelaksana tugas, hal ini karena Sutarmanto diberhentikan. “Berhubung Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai kepala Kepolisian RI. Jadi, menunda, bukan membatalkan, ini yang perlu digarisbawahi,” kata Jokowi ujarnya di Istana Negara. Sampai kapan akan ditunda. Hanya Presiden yang tahu.

Cara Demokrat Mendulang Citra

Partai Demokrat (PD) memilih sikap tersendiri sejak Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Fraksi PD Benny K Harman langsung meminta proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi oleh Komisi III DPR dihentikan. Sementara 9 partai lain sepakat melanjutkan agenda tersebut.

Suara penolakan pada Budi juga dikatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin. Menurutnya jika Presiden tetap melantik Budi akan menghancurkan wibawa Presiden. “Akankah kita biarkan drama calon kapolri berlanjut dan berlarut dan berpotensi mempertaruhkan nama baik dan martabat negara di mata rakyat maupun dunia?” ujarnya.

Suara penolakan ini dibarengi dengan desakan kelompok relawan pendukung Jokowi yang mengancam akan menarik dukungan jika tetap melantik Budi. Kelompok yang diorganisir oleh selebritis ini mengancam akan menduduki

Istana Negara jika Presiden tidak mendengarkan aspirasi mereka.

Bahkan mantan Presiden SBY menguarakan hal yang sama. “Mari kita selamatkan Negara, Presiden dan Polri. Dengarkan suara rakyat,” kata SBY lewat twitter resminya, Jumat (16/1/2015).

Sengkarut pengangkatan Budi Gunawan ini memang tidak bisa dilepaskan dari peran Cikeas. Informasi yang dihimpun Aktual hal ini berawal dari digelarnya Rapat Dewan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti). Polri baru menggelar Wanjakti 2 hari setelah Presiden Jokowi mengirimkan surat penunjukan Budi ke DPR tanggal 9 Januari.

Dalam Wanjakti yang dihadiri oleh delapan perwira tinggi bintang tiga dan dipimpin oleh Kapolri Jenderal Sutarmanto sebanyak 8 jenderal tidak menyetujui Budi sebagai calon Kapolri. Namun pada penunjukan Budi, Presiden tidak menggunakan pertimbangan Wanjakti. “Walaupun tidak dilibatkan, walaupun tidak diajak bicara, saya tetap loyal apa yang jadi keputusan presiden,” kata Sutarmanto di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (15/1).

Penolakan terhadap Budi dalam Wanjakti memang sudah disadari Presiden. Hal ini lantaran mayoritas peresta Wanjakti adalah perwira bintang tiga yang dipromosikan di era Presiden SBY. Kabareskrim Komjen



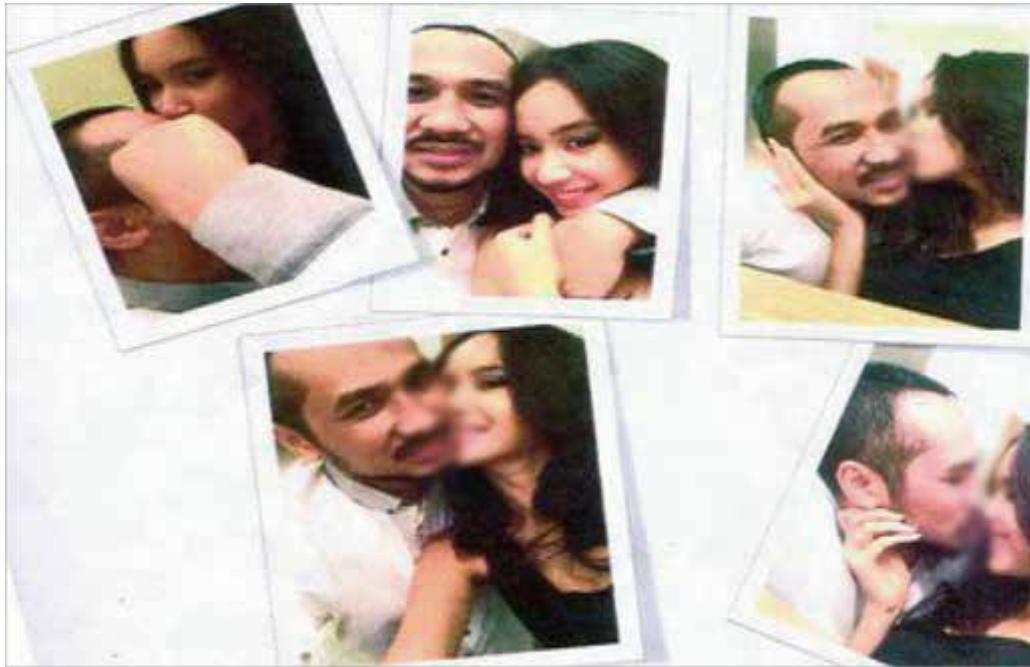


Foto Mirip Abraham Samad dan Elvira Devinamira.

ia tidak berani memastikan jika orang di dalam foto tersebut adalah Abraham Samad. "Foto itu asli tapi gua ga tahu itu Abraham Samad atau bukan," kata Agan saat dihubungi.

Menanggapi polemik tersebut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan berharap KPK membentuk Komite Etik untuk

menelusuri kebenaran tersebut. "Foto itu asli apa tidak? Kalau asli, Komite Etik bisa masuk (memproses)," ujarnya.

Beredarnya foto mesra Abraham dan Elvira Devinamira mengingatkan komitmen KPK terhadap kasus perselingkuhan. Pada tahun 2012 lalu KPK pernah memecat pegawainya yang kedapatan selingkuh. Pegawai KPK berinisial MNHS yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut dinilai telah melanggar kode etik KPK.

Saat itu Samad menyebut perselingkuhan adalah pelanggaran kode etik serius bagi pegawai KPK. **"Itu kan pelanggaran etika. Tidak boleh seorang pegawai KPK melakukan selingkuh. Dia melakukan perselingkuhan dan itu kuat sekali datanya,"** ujar Ketua KPK Abraham Samad, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 19 September 2012 silam.

Abraham bahkan menyamakan perselingkuhan dengan suap. "Itu melanggar, itu pelanggaran berat kalau di KPK sama dengan menerima suap," ujarnya. Bagaimana dengan sekarang?

Deddy K

Suhardi Alius misalnya sempat disodorkan sebagai ajudan Presiden pada tahun 2009. Sutarman sendiri dikenal dekat dengan keluarga SBY.

Romantisme Abraham dan Sang Putri

Sehari setelah mengumumkan penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan, Ketua KPK Abraham Samad dikejutkan oleh beredarnya foto mesra dirinya di media sosial. Pada foto tersebut tampak Abraham bercumbu mesra dengan Putri Indonesia Tahun 2014 Elvira Devinamira.

Elvira memang bukan orang asing bagi Abraham. Perempuan yang menetap di Surabaya ini mengenal Abraham setelah KPK menunjuk dirinya sebagai Duta Anti Korupsi. Keduanya sempat bertemu dalam acara estival antikorupsi 2014 di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Ia menjadi pembicara dalam tema, 'Saya, Perempuan Anti Korupsi'.

Elvira mengaku terinspirasi oleh kisah Abraham Samad ketika masa kanak-kanak. Kisah ini diceritakan Abraham saat Elvira mengikuti karantina Putri Indonesia. Waktu kecil, Abraham mengaku pernah dimarahi ibunya karena membawa

pulang kapur tulis dari sekolah. Sang ibunda mengajarkan kepada Abraham agar dia tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya, meskipun itu hanya sebatang kapur tulis. "Jadi, menanamkan nilai-nilai antikorupsi bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu," tutur Elvira, kala itu.

Saat disinggung apakah foto yang dikirim tersebut serangan balik terhadap KPK terkait penetapan tersangka Budi Gunawan, Abraham tidak membantah. "Kemungkinan besar demikian," kata Abraham dalam pesan singkat, Rabu (14/1).

KPK sendiri telah melakukan kajian terhadap foto yang beredar tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto foto tersebut hasil dari rekayasa. "KPK sudah mengkaji foto yang sudah beredar dan dipastikan itu adalah hasil editan dan rekayasa," katanya. Namun KPK tidak mengambil langkah hukum dalam kasus ini.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh ahli manipulasi foto Agan Harahap mengatakan, foto yang beredar dengan cepat menjadi viral itu adalah foto asli dan bukan hasil manipulasi atau editan. Namun

Ketua BNP2TKI Minta KPK
Segera Ungkap Pemalsuan
Dokumen TKI Di Lembaganya



Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusrin Wahid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkap mafia yang bersarang di lembaga yang dipimpinnya. Palsunya ditemukan sejumlah fakta bahwa banyak Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tenaga kerja di negara embargo.

Padahal kata Nusrin, pemerintah telah melakukan pelarangan terhadap pengiriman tenaga kerja di beberapa negara, khususnya di negara rawan konflik seperti Mesir dan Suriah.

"Bagaimana bisa (TKI) masuk kalau tidak ada pemalsuan dokumen?" ungkap Nusrin di Kantor KPK, Kuningan Jakarta, Senin, (12/1).

Dalam hal ini kata Nusrin tak menutup kemungkinan ada pihak internal BNP2TKI yang terlibat melicinkan upaya tenaga kerja tersebut masuk ke negara terlarang. Dan modus yang dipergunakan pemalsuan dokumen.

Nusrin mengaku dirinya juga sudah berkordinasi dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK untuk menutup lubang di BNP2TKI, karena perdagangan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri kini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan harus diputus mata rantainya. Dan bisnis gelap perdagangan tenaga kerja juga sangat menggiurkan sebab harga per orang mencapai USD 5.000. /Nebby Mahbubirrahman

MAKI: Kejagung Pecahkan Rekor Tutupi SP3 Setya Novanto dan Tanri Abeng Selama 11 Tahun

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan Kejaksaan Agung telah berhasil menyembunyikan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap Setya Novanto dan penelantaran status tersangka Tanri Abeng dalam perkara dugaan korupsi Cesia Bank Bali selama 11 tahun.

Lebih lanjut Boyamin mengatakan fakta tersebut didapatkan MAKI usai mengajukan gugatan praperadilan kepada Kejagung dalam perkara tersebut dan telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, Rabu (8/1) dengan hakim tunggal, Swandi.

"Pada hari Kamis kemarin Kejagung telah menjawab gugatan intinya untuk tersangka Setya Novanto telah diterbitkan SP3 pada tgl 18 Juni 2003," ujar Boyamin di Jakarta, Jumat (9/1).

Sedangkan kata Boyamin SP3 tersebut bernomor Prin-35/F/F.2.1/06/2003 sementara untuk Tanri Abeng belum pernah diberi SP3.

Dengan terungkapnya SP3 mulai tahun 2003 pada sidang lalu, lanjut Boyamin, berarti Kejagung telah mampu mencatatkan rekor untuk menutupi SP3 selama 11 tahun. Karena, selama ini Kejagung sendiri tidak pernah terbuka terkait kasus tersebut.

Sedangkan para tersangka lainnya seperti Sahril Sabirin, Pande Lubis dan Djoko Chandra telah dinyatakan bersalah pada tahun 2009 setelah melalui proses persidangan yang dijalankan sampai dengan Kasasi dan peninjauan kembali.

"Artinya SP3 tahun 2003 telah mendahului vonis tersangka lain tahun 2009. Untuk itu mestinya SP3 Setya Novanto dibuka kembali setelah yang lain divonis bersalah karena sejak awal kelima orang tersebut didakwa secara bersama-sama dan berlanjut melakukan korupsi," jelas Boyamin.

Keterlibatan Setya Novanto dan Tanri Abeng sendiri kata dia telah disebut dalam pertimbangan putusan kasasi Pande Lubis dan PK Sahril Sabirin.

"Setya Novanto dan Tanri Abeng bersama-sama dan berlanjut melakukan korupsi, untuk itu mestinya SP3 Setya Novanto dibuka kembali untuk dibawa ke pengadilan dan juga Tanri Abeng dibawa ke pengadilan," papar Boyamin.

Guna memperkuat gugatan praperadilan, MAKI telah menyerahkan bukti salinan putusan Sahril Sabirin, Pande Lubis dan Djoko

Candra yang menyebut dugaan keterlibatan Setya Novanto dan Tanri Abeng dengan harapan Hakim Haswandi akan kabulkan gugatan praperadilan. /Nebby

Mahbubirrahman





Saat Lisa Berkicau di Kasus Hambalang

Saksi kasus Hambalang, yang juga duduk sebagai Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukitawati Isa mulai buka suara saat dicecar hakim terkait kasus korupsi dengan terdakwa Machfid Suroso di Pengadilan Tipikor Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Dalam kesaksiannya, awalnya Lisa enggan menjawab pertanyaan hakim terkait uang *fee* 18 persen dari nilai proyek Hambalang yang diterima dari PT Adhi Karya dan diserahkan kepada Sekretaris Kementerian Pendidikan dan Olahraga, Wafid Muharram. Begitu juga dengan pertanyaan hakim tentang pertemuannya dengan Dedi Kusdinar dan Teuku Bagus Muhammad Noor di Plaza Senayan Jakarta beberapa waktu lalu saat pembahasan *fee* 18 persen.

Tetapi setelah mendapat teguran Hakim Sinung Hermawan, dirinya baru menunjukkan keberaniannya dengan mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Lisa mengaku mendapat ancaman terkait aliran dana Hambalang dari Sylviana Soleha atau yang akrab disapa Bu Pur, orang dekat Cikeas.

“Satu yang beliau katakan, Jangan pernah membuka mulut mengenai uang,” jelas Lisa. “Kalau tidak, bisa berakhir seperti Arif Gundul,” tambah Lisa. /Nebby Mahubirrahman

Berkas Kasus Transjakarta Udar Pristono Sudah P 21

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Tony Spontana mengatakan berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan armada Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013 dengan tersangka mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono telah dinyatakan lengkap atau P21.



“Berkas perkara atas nama tersangka UP, setelah dilakukan penelitian hasil penyidikannya dinyatakan lengkap atau P21,” ujar Tony dalam siaran persnya, Selasa (13/1).

Lebih lanjut Tony mengatakan hal tersebut berdasarkan Surat Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus Nomor : B-03/F.3/Ft.1/01/2015, tanggal 12 Januari 2015 untuk Tersangka UP.

Selain Udar, penyidik Kejagung juga telah melengkapi berkas perkara untuk tersangka lain dalam kasus ini berinisial P. Hal ini sesuai dengan surat nomor : B-02/F.3/Ft.1/01/2015, tanggal 12 Januari 2015.

Tony menambahkan sesuai Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 Ayat (1), dan Pasal 139 KUHP, berkas kedua tersangka pada hari ini, akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Hari ini tim penyidik melaksanakan penyerahan kedua tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” ucap Tony.

Selain itu, kata Tony, proses penyerahan tanggung jawab kedua tersangka dan barang-bukti dilakukan kepada Jaksa

Dalam kasus ini, Udar yang telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Armada Bus Transjakarta senilai Rp. 1.000.000.000.000 dan Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler senilai Rp. 500.000.000.000, pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.

Tak hanya Udar, Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan tersangka P, nama lainnya yakni tersangka BS, tersangka CCK, dan tersangka AS. Sementara dua orang lainnya sudah menjadi terdakwa yaitu Dradjat Adhyaksa dan Setyo Tuhu. /Nebby Mahubirrahman

Polri Siapkan Pengacara Bagi Komjen BG

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan setiap anggota Polri yang terjerat kasus hukum berhak mendapat pendampingan dari Divisi Hukum Polri. Hak tersebut juga berlaku pada calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar.

“Setiap anggota Polri punya hak hukum untuk didampingi oleh Divisi Hukum Polri sebagaimana pejabat Polri yang lain. Termasuk anggota Polri yang mengalami pemeriksaan karena disangka melakukan sebuah tindakan pidana,” kata Ronny, di Jakarta, Selasa (13/1).

Namun demikian Polri menyerahkan sepenuhnya kepada BG apakah dirinya tetap menggunakan pengacara yang telah disiapkan Polri atau tidak. /Fadlan Syiam Butno



Perang Valas Gerus Fulus

Sepanjang lima tahun terakhir, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan (depresiasi) terhadap mata uang asing yang tergolong serius. Pelemahan rupiah terbesar terjadi pada mata uang Poundsterling yang mencapai 41,13 persen. Sedangkan terhadap kurs dolar, sepanjang Januari-Desember 2014 sempat menyentuh Rp12.965 untuk kurs jual dan Rp12.835 di kurs beli. Bahkan tidak sedikit Perbankan yang menjual diatas Rp13.000 per dolar AS.

Tekanan terhadap rupiah tentu saja membuat tekanan serius terhadap ekonomi domestik, misalnya meningkatnya harga bahan-bahan baku dan penolong keperluan industri yang bahannya diimpor dari luar negeri.

Asumsi pemerintah yang tercantum dalam APBN selalu meleset setiap tahun. Padahal, asumsi tersebut merupakan pedoman strategis bagi pemerintahan dalam merealisasikan segala kebijakan

fiskal dan menetapkan subsidi energi. Jika asumsi tersebut meleset, maka realisasi belanja pemerintah bakal membengkak dan membebani kondisi fiskal negara.

Setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM dengan menyerahkan ke harga Pasar, kurs rupiah pada 7 Januari terkapar di posisi Rp12.740 per USD. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuding pelemahan Rupiah terjadi karena faktor eksternal terutama gejolak yang terjadi di Yunani.

"Pelemahan rupiah terjadi karena persoalan faktor eksternal, terutama gara-gara Yunani (Greece) itu, partai kiri yang kelihatan *voting*-nya. Greece menakutkan orang karena restrukturisasi ekonomi Uni Eropa, jadi terganggu," ucap Sofyan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1).

Bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro seolah mengiyakan pernyataan

Menko perekonomian Sofyan Djalil, pelemahan Rupiah ini dikarenakan lebih karena pengaruh dari Eropa, Yunani.

"Meski sudah menyesuaikan harga BBM, tetap tidak bisa menahan gejolak dari faktor eksternal. Kalau Dolar AS sudah menguat semua kena," tegasnya.

Padahal Yunani itu negaranya kecil dan jauh. Penduduknya kurang dari 11 juta, bisa mempengaruhi mata uang Indonesia. Dimungkinkan dalam beberapa waktu ke depan, bisa jadi rupiah melemah karena Timbuktu atau Papua.

Menurut Analisis pasar Modal dari WKSI, Reza Priyambada, laju Rupiah tertahan awal pekan pasca pelemahan Euro setelah terdapat sentimen negatif dari rencana ECB yang akan mempertimbangkan untuk segera merealisasikan program pembelian obligasi dari beberapa Negara di Euro Zone. Selain itu, ada kekhawatiran pasar terkait krisis Yunani, terutama beredarnya spekulasi akan keluarnya Yunani dari Zona Euro.

"Masih berlanjutnya pelemahan pada laju harga minyak mentah membuat pelaku pasar lebih memilih ke aset *safe heaven*, USD dan Yen," tegas Reza.

Masih adanya imbas dari berlanjutnya pelemahan harga kontrak minyak mentah dunia membuat pelaku pasar lebih memilih aset-aset *safe heaven*, diantaranya USD. Di sisi lain masih adanya kekhawatiran terhadap masalah Yunani yang melemahkan Euro juga turut berimbas negatif pada Rupiah.

Meningkatnya mata uang Yuan seiring rilis rencana Pemerintah Tiongkok untuk mendorong pengerjaan proyek infrastruktur senilai 7 triliun Yuan, belum cukup mampu direspon positif pelaku pasar. Masih berlanjutnya pelemahan Euro dan kembali berbalik turunnya Yen membuat USD berkesempatan untuk menguat dan berimbas pada pelemahan mata uang lainnya.

Kebetulan juga dari dalam negeri belum ada *trigger* positif yang dapat membuat Rupiah menguat dan

sempat adanya antisipasi pelaku pasar terhadap imbas dirilisnya hasil *meeting* The Fed di Desember yang lalu sehingga membuat pelaku pasar lebih memilih mentransaksikan USD, terutama setelah rilis kenaikan data-data AS berupa MBA *mortgage applications*, *chain store sales*, *ADP employment*, hingga neraca perdagangan yang lebih baik dari estimasi sehingga laju Rupiah pun sulit untuk bangkit.

Untuk menjaga rupiah agar terus stabil, pemerintah rela melakukan beberapa kebijakan kontroversial, seperti penjualan *global bonds*, penyesuaian BBM dari Rp6.500 menjadi Rp7.600, kenaikan elpiji 12kg, penyesuaian tarif listrik, tarif KA, membuat nilai rupiah semakin hancur. Hampir tidak berarti apa-apa lagi. Mayoritas rakyat tambah miskin. Jika rakyat miskin, otomatis pajak yang diterima pemerintah akan berkurang. Kemiskinan dan kejahatan bakal merajalela.

Global Bonds

Pada tanggal 9 Januari 2015 (8 Januari 2015 waktu New York), Pemerintah melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi USD yang masing-masing bertenor 10 tahun (jatuh tempo 15 Januari 2025) dan 30 tahun (jatuh tempo 15 Januari 2045) dan diterbitkan dengan nominal masing-masing USD2 miliar. Transaksi ini merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes (GMTN)

Republik Indonesia sebesar USD30 miliar. *Final pricing* (yield) tersebut, 30 bps lebih ketat dari *initial price guidance* yaitu 4,5% untuk tenor 10 tahun dan 5,5% untuk tenor 30 tahun. Sedangkan total penawaran yang masuk (*total order book*) untuk seri RIO125 dan RIO145 adalah sebesar USD19,3 miliar, sehingga terdapat *oversubscription* sebesar 4,8 kali. Total penawaran ini merupakan penawaran terbesar yang pernah dicapai Pemerintah untuk transaksi penjualan SUN dalam valuta asing berdenominasi US dollar. Pendistribusian untuk seri RIO125 adalah 48% untuk investor Amerika Serikat, 24% untuk investor Eropa, 15% untuk investor Asia (ex. Indonesia), dan 13% untuk investor di Indonesia.

Penaikan Elpiji 12 Kg

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kilogram mulai 2 Januari 2015 secara diam-diam. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Ahmad Bambang mengatakan Pertamina menaikkan harga elpiji 12Kg saat harga CP Aramco turun berpatokan pada CPA Desember 2014 sebesar USD562 per ton. Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding penaikan elpiji tersebut ada *mark up* sebesar Rp20.600 per tabung. Potensi pemalahan harga elpiji 12Kg mencapai Rp128,8 miliar.

"Asumsi dan parameter yang digunakan ICW dan Pertamina

berbeda. Namun kami pastikan harga LPG Pertamina masih termurah dibanding pesaing dan dibanding di negara-negara di luar negeri," ujar Direktur Marketing and Trading Pertamina Ahmad Bambang kepada Aktual.co melalui pesan singkatnya, Kamis (8/1).

Lebih lanjut dikatakan, parameter pertama yang digunakan saja sudah tidak sama. Rata-rata *contract price* (CP) Aramco Desember adalah USD561,6.

"Namun yang digunakan adalah rata-rata CPA bulan Desember 2014 dengan mempertimbangkan tren Januari. Hal itu dipangaruhi, Pertama harga CP Aramco tidak tetap, melainkan berubah tiap hari. Kedua, stok pertamina mencapai 20-an hari, sehingga secara akuntansi harus dihitung *averagenya*. Ketiga, CPA hari ini, tidak bisa langsung dijual untuk hari ini juga, melalui proses yang panjang," jelasnya.

Penyesuaian BBM dan Penundaan Tarif Listrik

Analisis pasar modal dari PT Platon Niaga Berjangka mengatakan sentimen pembangunan infrastruktur masih cukup kuat menopang rupiah, perbaikan infrastruktur akan membuat perekonomian Indonesia tetap akan tumbuh meski dibayangi perlambatan ekonomi global.

"Pergerakan mata uang rupiah berfluktuasi cenderung stabil seiring dengan faktor internal yang masih cukup mendukung untuk menahan laju dolar AS meningkat lebih tinggi," kata Analisis PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong.

Di sisi lain, pemerintah yang akan melakukan harmonisasi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan ditundanya kenaikan tarif listrik menyusul tren penurunan harga minyak dunia akan menahan laju inflasi domestik.

"Namun, diharapkan harmonisasi harga tidak terlalu sering dilakukan karena dapat membuat kebijakan investasi pelaku pasar kurang menentu," ujarnya.



Harga BBM Turun, Pemerintah Harap Harga Kebutuhan Ikut Turun



Pemerintah mengharapkan terjadi penurunan harga di berbagai sektor menyusul kebijakan menurunkan harga jual bahan bakar minyak jenis premium dan solar.

“Misalkan menteri melaporkan ke masyarakat harga Semen Indonesia Group turun ke masyarakat, diharapkan (biaya-red) produksi yang lain turun maka (harga jual-red) ikut

turun,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (16/1).

Sementara itu Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pemberian waktu dua hari sejak diumumkan hingga harga baru BBM berlaku merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada pengusaha SPBU agar tidak mengalami kerugian.

“Dikasih waktu dua hari supaya para pengusaha tidak mengalami kerugian karena sudah punya stok, kemudian mulai sekarang mereka beli stok dengan harga baru,” paparnya.

Menteri ESDM juga mengatakan ke depan, harga jual premium dan solar akan ditinjau setiap dua pekan untuk menyesuaikan dengan perkembangan harga minyak mentah dunia. / Ismed Eka

BEI Target 32 Perusahaan IPO

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut ada 32 calon emiten yang berpotensi bisa melantai di bursa saham alias melakukan pencatatan saham perdana (Initial Public Offering /IPO) tahun 2015. Target ini termasuk optimistis mengingat ada potensi hambatan dari penerapan internal regulator bursa.

Direktur Utama BEI, Ito Warsito menilai target IPO 32 perusahaan sangat realistis jika melihat peluang peningkatan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang ditarget lebih besar dibanding realisasi tahun sebelumnya.

“Pastinya kita harus optimis (target 32 perusahaan IPO) akan tercapai,” ucap Ito dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Januari 2015.

Kepala Riset PT. Universal Broker Securities, Satrio Utomo, menilai target ini memang sangat realistis jika melihat peluang kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sangat terbuka. “Proyeksi IHSG memang memungkinkan investor akan lebih mudah untuk IPO tahun 2015 dibandingkan tahun kemarin,” ucapnya.



Yang harus diwaspadai, lanjut Satrio, BEI masih menerapkan kebijakan mengenai fraksi harga dalam perdagangan saham. Dalam ketentuan baru, Bursa mempersempit kelompok harga-harga saham. Saham dengan harga di bawah Rp 500 fraksi harganya Rp 1, kelompok saham di harga Rp 500-Rp 5.000 memiliki fraksi Rp 5, untuk saham di atas Rp 5.000 dicatatkan dengan fraksi harga Rp 25.

Tujuan dari perubahan fraksi harga ini untuk meningkatkan likuiditas pasar, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kedalaman dalam transaksi. Ketentuan mengenai perubahan fraksi harga ini akan mendekatkan jarak antara permintaan dan penawaran (*bid and offer*). Dengan demikian, realisasi transaksi diharapkan bisa lebih banyak terjadi. / Ismed Eka

Mantan Dirut Anol Ditunjuk Pimpin Angkasa Pura II



Pemerintah terus melakukan reposisi di pos strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya adalah menunjuk Budi Karya Sumadi sebagai Direktur Utama AP II menggantikan Tri Sunoko yang sudah masuk masa pensiun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, penunjukan Budi sudah melalui proses yang ketat. Dia juga menyebut bekas Dirut PT Taman Impian Jaya Ancol ini memiliki integritas yang sangat bagus. Penunjukan ini, kata dia, sudah melalui proses asesmen dengan mengutamakan *track record*, integritas dan kemampuan berinovasi

“Kemampuan Teknis diyakini dapat dikuasai apabila orang itu punya *track record* sangat baik,” lanjut Rini di Jakarta, Januari 2015.

Budi memiliki beberapa pekerjaan rumah yang banyak dan pelik sebagai Direksi AP II. Salah satunya adalah membenahi bandara Soekarno-Hatta yang sudah mulai semrawut akibat kelebihan penumpang dan padatnya jadwal penerbangan.

“Pekerjaan rumah cukup banyak, Pak Menhub (Ignasius Jonan) tekankan keselamatan secara menyeluruh untuk penumpang sehingga memang itu paling utama. Kedua pengembangan dari bandara Soekarno Hatta juga menjadi sangat penting. Mungkin seminggu lagi bisa ditanya bagaimana programnya,” tuntas Rini. / Ismed Eka

Widjanarko Didepak Dari SKK Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencopot Johannes Widjonarko dari posisi Wakil Kepala SKK Migas. Dia tersingkir dari SKK Migas atas usulan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi yang direstui Menteri ESDM Sudirman Said.

"Bukan dipecat. Ini usulan dari kepala SKK Migas yang baru dan sesuai dengan kewenangan mereka," ujar Sudirman, seraya menambahkan bahwa Kepala SKK Migas memiliki hak dan wewenang untuk mengusulkan nama-nama anggotanya.

Sudirman tidak merinci alasan pencopotan bekas Plt SKK Migas pengganti Rudi Rubiandini yang ditangkap KPK itu. "Pak Johannes Widjonarko kan sudah lama (SKK Migas), dan Pak Amien mungkin butuh menata lebih dalam," kilahnya.

Widjonarko diberhentikan secara tidak hormat dari kursi Wakil Kepala SKK Migas melalui SK Menteri ESDM Nomor 0041K/73/MEM/2015. "Pada kesempatan ini saya pribadi dan keluarga memohon pamit. Sejak 8 Januari 2015 saya telah diberhentikan dengan hormat sebagai Wakil Kepala SKK Migas," itu kata-kata terakhir Johannes Widjonarko sebagai pejabat di SKK Migas. / Ismed Eka



Menkeu Prancis Tinjau BMKG, Ada Apa?

Menteri Keuangan (Menkeu) Prancis Michael Sapin meninjau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melihat tindak lanjut kerja sama yang dilaksanakan sejak 2012.

"Beliau ke BMKG untuk melihat sejauh mana bantuan yang sudah diberikan dan realisasinya. Kesan yang saya tangkap beliau menanggapi positif karena ini adalah contoh kerja sama yang bisa dibilang tepat waktu dan realisasinya," kata Kepala BMKG Andi Eka Saka di Jakarta, Jumat (16/1).

Michael Sapin bersama rombongan tiba di gedung BMKG pada Jumat siang, disambut Kepala BMKG beserta para deputy dan diajak melihat sistem yang dimiliki BMKG seperti sistem pemantauan cuaca dan lainnya.

Prancis memberikan bantuan pinjaman lunak sebesar 30,3 juta euro yang digunakan untuk memperbarui peralatan di BMKG sampai proses membantu sektor-sektor seperti observasi.

Bantuan itu sudah berlangsung sejak 2012 dan berakhir pada 2015 dengan jangka waktu pengembalian selama 19 tahun. Hingga saat ini dari bantuan Prancis tersebut sudah berhasil memodernisasi peralatan BMKG di 66 titik observasi.

"BMKG memiliki 179 stasiun pengamatan sehingga sisanya nanti akan kita lanjutkan proses modernisasi dengan APBN," tambah Andi.

Bagi Prancis sendiri, kerja sama tersebut memiliki arti dalam bentuk transfer teknologi dan mereka bisa belajar dari Indonesia yang memiliki iklim dan kondisi alam yang unik, jelas Andi. ant / Ismed Eka

ARLI: Industri Rumput Laut Lebih Suka Ekspor

Persediaan bahan baku rumput laut untuk industri dinilai masih tinggi oleh kalangan pengusaha rumput laut. Padahal sebelumnya, Kementerian

Perindustrian mengatakan bahwa industri hilir kelautan kekurangan bahan baku rumput laut, akibat dari maraknya penjualan bahan mentah secara legal maupun ilegal.

Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Aziz mengatakan penyerapan rumput laut Indonesia oleh industri nasional masih relatif rendah. Pasalnya, daya beli industri Indonesia untuk bahan baku rumput laut masih rendah jika dibandingkan dengan pembeli dari industri luar negeri, seperti Tiongkok,



Filipina, dan Chile. "Angka ekspornya pasti lebih tinggi karena penyerapan dari industri pengolahan kita masih kecil. Para pelaku lebih suka mengekspor rumput

laut kering karena diuar harganya tinggi," ujar Safari dalam rilis yang diterima Aktual.co, Jumat (16/1).

Lebih lanjut dikatakan Safari, pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam memandang permasalahan tersebut. Selain itu, pemerintah diharapkan mendorong daya saing industri nasional dalam rangka hilirisasi.

"Kita harapkan industri rumput lautnya jalan, ekspornya juga tetap jalan karena peluang masih tinggi," pungkasnya. / Ismed Eka

Harga Minyak Global (Dipaksa) Turun, Siapa Untung?

Sangat orkestratik. Dunia kini bisa melihat dengan jernih, bagaimana bentuk Perang Dingin Baru baru saat ini: Perang Multidimensi.

Ini diawali dengan hubungan yang sangat tidak harmonis antara AS dan Russia. Perang geopolitik yang membisu antara keduanya memuncak di krisis di Ukraina. Yang terjadi di Ukraina bukan semata yang Anda lihat di televisi. Di sana ada sanksi ekonomi, ada perang teknologi militer, ada perang bisnis pipa gas, ada perang diplomatik sampai perang nasionalisme. Sangat multidimensional.

Kali ini, AS mulai meningkatkan derajat orkestrasi perang itu ketingkat yang sangat spekulatif: Menurunkan harga minyak global. Russia melihat, turunnya harga minyak global adalah ulah AS memanipulasi pasar migas global.

Ini bukan hanya berpengaruh kepada Russia dan “musuh” besar AS yang lain seperti Iran dan Venezuela. Tapi ke seluruh negara-negara yang ada di dunia ini.

Sebuah laporan mengatakan, yang paling terpukul adalah beberapa negara di Asia Pasific dan Uni Eropa yang harus berjibaku untuk mengamankan neraca keuangannya, termasuk Indonesia.

Ya. Seperti pernyataan Secretary US Secretary of State Victoria Nuland dan US Assistant Secretary of The Treasury Daniel Glaser kepada Foreign Affairs Committee of US House of Representative pada Mei 2014 lalu. Bahwa tujuan sanksi ekonomi terhadap Russia bukan hanya untuk merusak hubungan diplomatik dan bisnis antara Rusia dengan Uni Eropa. Namun lebih dari itu, untuk

menghancurkan stabilitas ekonomi Russia dengan fokus melemahkan nilai mata uangnya (devaluasi nilai mata uang Rubel) dan menaikkan inflasi.

Tekanan itu bertambah hebat ketika harga minyak global turun. Karena sekitar 46 persen pendapatan Russia dari sektor migas maka Russia sangat terpukul. Nilai mata uang Rubel bertambah hancur, *capital outflow* terjadi dan harga barang ikut naik dan rakyat mulai panik. Kalau Presiden Putin tak mampu keluar dari kemelut ini maka tingkat kepercayaan rakyat kepada kepemimpinannya akan turun.

Siapa pemenang dari perang ini?

Sederhana jawabannya, perang akan dimenangkan AS jika Putin jatuh. Jatuhnya Putin akan merubah kondisi geopolitik global di Timur Tengah. Lalu, dominasi AS di Timur Tengah dan Uni Eropa akan menguat.

Namun, kalau Putin bisa bertahan maka skenarionya akan berubah.

Sekadar informasi, untuk keluar dari tekanan, Putin melakukan beberapa *counter* yang cukup strategis. Pertama, pada akhir Mei 2014 lalu Russia melakukan aliansi strategis dengan Tiongkok. Rusia menandatangani kontrak gas baru senilai USD400 miliar dengan Tiongkok. Kontrak ini sempat mengguncang skenario besar AS. Kontrak sekitar 30 tahun tersebut menyatakan bahwa Rusia akan ekspor gasnya ke China sebanyak 38 miliar cubic meters (BCM) per tahunnya dengan harga sekitar USD 10 per cubic feet.

Yang kedua, beberapa saat lalu Putin melakukan *deal* bisnis gas sangat penting dan strategis dengan Turki. Pada 1 Desember



2014 lalu, Putin memutuskan untuk menghentikan pembangunan pipa gas “South Stream Natural Gas” dari Russia ke Bulgaria yang melintasi Laut Hitam.

Putin menggantinya dengan proyek pipa gas “Turk Stream” dari Russia ke Turki yang juga melintasi Laut Hitam. Perusahaan raksasa Russia, Gazprom bekerja sama dengan Perusahaan asal Turki, Botas dalam proyek besar ini. Salah satu *deal* “tertutup” antara kedua perusahaan itu adalah untuk menekan jatuhnya nilai mata uang Rubel. Bagi Turki, keuntungan dari *deal* tersebut adalah negaranya akan menjadi pintu masuk gas asal Russia (yang masih murah) ke negara-negara Uni Eropa.

Namun, yang menarik, adalah langkah unik Putin di dalam negerinya. Ketika harga barang naik akibat inflasi Putin menaikkan gaji pegawai negerinya. Terutama gaji guru (termasuk dosen, peneliti dan guru besar), dokter dan paramedis di rumah sakit umum dan klinik. Itu belum kenaikan gaji dan upah



Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan menghadiri konferensi pers di Istana Presiden di Ankara 1/12/2014 lalu.

Sergey Glazhev



di beberapa sektor penting dimana Putin sedang meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong daya saing negara.

Namun, sampai kapan harga minyak kembali normal? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau menilik tahun 2008 lalu, ketika harga minyak global jatuh sampai tingkat USD35 per barel. Butuh waktu dua tahun (sampai tahun 2011) harga minyak kembali normal.

Anggap saja, butuh waktu yang sama harga minyak kembali normal. Berarti baru normal pada tahun 2017. Apakah dalam waktu dua tahun itu AS atau Russia dan negara-negara yang terkena dampak (termasuk Indonesia) mampu pulih? Perlu diingat, ketika sistem keuangan Russia kolaps, dampaknya akan

berpengaruh langsung ke Uni Eropa sampai Amerika Selatan.

Yang jelas, ketika Russia kolaps, AS pasti akan kolaps juga meski tak sehebat Russia.

Bagaimana dengan Tiongkok?

Oleh sebagian pengamat geopolitik, sasaran AS bukan hanya Russia. Namun sasaran lanjutannya adalah Tiongkok.

Instabilitas yang terjadi di Russia langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi beberapa kesepakatan politik dan ekonomi antara kedua

negara itu. Bisa jadi, Tiongkok akan memanfaatkan kelemahan Russia saat ini untuk kepentingan nasionalnya.

Sebenarnya, dari sisi geopolitik, Tiongkok sudah sangat diuntungkan. Melemahnya harga minyak global akan menurunkan “kebekuan” politik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Dengan kata lain, tantangan besar untuk mewujudkan skema geopolitik global Jalan Sutera-nya (silk road) di wilayah Timur Tengah untuk sementara bisa berjalan tanpa masalah karena tensi perang di Timur tengah (keamanan) akan turun.

Apalagi, Saudi Arabia sudah mulai merubah arah kebijakan energinya untuk lebih menoleh ke Timur. Sejak 2009 lalu, Saudi Arabia sudah menjalin kerjasama strategis dengan China. Beberapa kapal tanker besar minyak Saudi sudah terlihat aktif mengirim minyak ke Tiongkok beberapa waktu terakhir ini.

Intinya, menurut Penasihat Presiden Russia Sergey Glazhev, meningkatnya tensi “perang dingin” antara AS, Russia dan Uni Eropa justru akan menguntungkan China. Ya, turunnya harga minyak global justru akan melemahkan AS, Russia dan Uni Eropa. Meski Tiongkok juga ikut terkena dampak, namun Tiongkok lebih banyak mendapat keuntungan geopolitik.

Jadi kalau dilihat dari sisi Tiongkok, skema geopolitik global Jalur Sutera-nya akan lebih cepat terealisasi jika konflik antarnegara di Timur Tengah dan Laut China Selatan turun tensinya. Jatuhnya harga minyak global dan perang dingin di lain sisi justru menurunkan tensi kebekuan politik dan peperangan yang ada di kawasan tersebut.

Dalam bahasa geopolitik, memang benar Tiongkok dan AS berbeda kepentingan dalam melihat jatuhnya harga minyak global. Namun, ada beberapa hal yang membuat mereka sepakat dalam hal-hal tertentu. Misalnya berbagi “bisnis” di kawasan Asia Pasifik.

Benarkah?

Andy Abdul Hamid, Karel Stefanus Ratulangsi



Nasib Bangsa Digantung ke Pasar

Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) merekomendasikan agar Pertamina mencabut penjualan minyak jenis premium Ron 88 dari pasar. Rekomendasi ini memuluskan niat pemerintah meliberalisasi pengelolaan energi nasional sehingga nasib rakyat diombang-ambingkan pasar.



Ketua tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri tampak kewalahan meladeni puluhan wartawan di kantor kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, akhir Desember 2014. Dia dicecar berbagai pertanyaan seputar rekomendasi penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ron 88 dari pasar domestik.

Tidak semua pertanyaan wartawan dijawab Faisal. Bahkan dalam sebuah momen, dia tampak kesal dan marah karena ada pertanyaan wartawan yang tidak dapat dimengerti. "Anda tolong belajar dulu soal ini (tata niaga migas). Biar nyambung dan ngerti, baru kemudian enak tanya-tanya ke saya," ujarnya.

Faisal memang sibuk menerangkan tentang rekomendasi agar pertamina penghapusan BBM premium ron 88 kemudian menggantinya dengan BBM jenis pertamax ron 92. Soal harga, Faisal menegaskan bahwa nantinya akan sangat tergantung pada pasar.

"Seluruhnya diserahkan pasar. Namun untuk subsidi perlindungan, bisa terapkan *range* atau batas atas dan batas bawah untuk subsidi tetap misalnya Rp500 per liter," ucapnya.

Setelah rekomendasi ini turun, pemerintah Jokowi-JK benar-benar melempar harga minyak dalam negeri ke harga pasar. Bahkan lebih sadis lagi, subsidi BBM jenis premium dicabut. Perubahan harga BBM pun begitu cepat, karena premium yang baru dinaikkan menjadi Rp8.500 per liter diturunkan kembali menjadi Rp7.600 per liter, sedangkan solar dari Rp7.500 per liter menjadi

Rp7.250 per liter.

Mencekik Secara Perlahan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dengan bangga menyampaikan bahwa harga BBM jenis premium turun lagi dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp7.600. Sedangkan jenis solar turun dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 7.250 per liter.

"Harga ini (solar dan premium) akan terus dievaluasi setiap bulan mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dua bulan sebelumnya," kata Sofyan, awal Januari 2014.

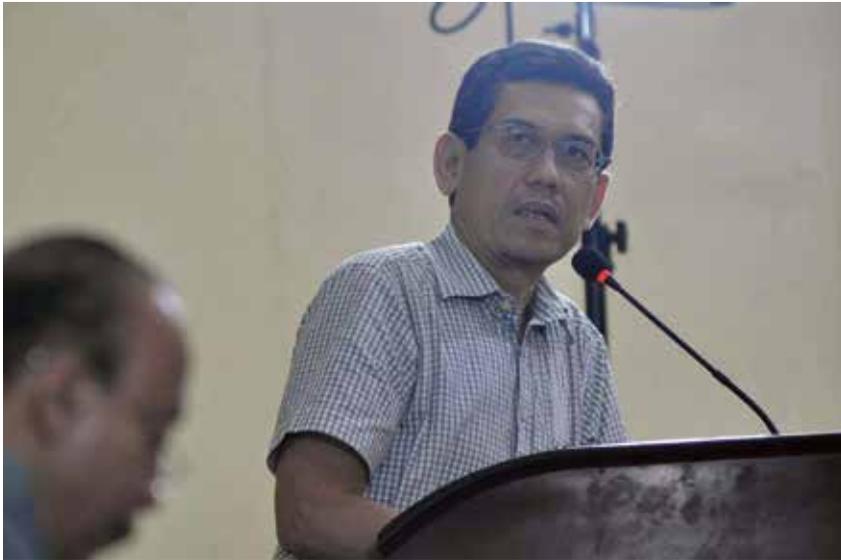
Dalam tata niaga energi, pemerintah menetapkan tiga jenis harga jual eceran BBM, yakni jenis BBM tertentu bersubsidi, BBM khusus penugasan, dan BBM umum. Yang

termasuk jenis BBM tertentu bersubsidi adalah Minyak Tanah dan Solar. Sedangkan Premium masuk kategori BBM khusus penugasan dan umum sehingga tak lagi mendapatkan subsidi pemerintah.

Sofyan mengatakan, pemerintah hanya mensubsidi BBM jenis solar sebesar Rp.1000 per liter karena secara teori BBM jenis ini lebih sering digunakan dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan untuk premium tidak ada subsidi. "Kami juga ingin masyarakat terbiasa dengan harga keekonomian premium," katanya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah hanya akan menetapkan formula untuk menentukan harga eceran BBM di pasar. Untuk jenis BBM tertentu bersubsidi, formulanya adalah harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar





(Foto Kiri) Marwan Batubara

(Foto Kanan) Rekomendasi Keberadaan Petral. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (tengah) bersama anggota Daniel Syahputra Purba (kiri) dan Chandra M. Hamzah (kanan) memberikan keterangan terkait rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas tentang keberadaan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (30/12).

kendaraan bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi. Kemudian harga eceran jenis BBM khusus penugasan ditentukan dengan formula harga dasar ditambah PPN dan PBBKB ditambah biaya tambahan pendistribusian ke wilayah penugasan 2 persen dari harga dasar.

Harga BBM memang akan terombang-ambing sesuai mekanisme pasar. Inilah yang dikecam banyak pihak karena pemerintah membiarkan rakyat menghadapi ganasnya sistem ekonomi pasar bebas. Imbas naik turunnya harga BBM akan membuat harga-harga kebutuhan pokok akan mudah naik namun sulit diturunkan.

Pengamat ekonomi keuangan Yanuar Risky mengatakan, menaikkan dan menurunkan harga dalam rentang waktu cepat adalah bukti pemerintah Jokowi-JK menerapkan liberalisasi total pengelolaan energi. Sebagai presiden, Jokowi hanya berharap semoga Indonesia beruntung mendapatkan akses pendapatan mengikuti pasar sedangkan rakyat silakan menderita jika pasar tidak berpihak.

“Akhirnya, liberalisasi total justru terjadi di era Jokowi yang selama ini dicitrakan sebagai punggawa ekonomi Trisakti. Tapi fakta yang terjadi pengelolaan energi dan semuanya diserahkan ke mekanisme

pasar,” ujarnya.

Dengan sistem ini, lanjut dia, rakyat yang selama ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dipaksa menghadapi kerasnya pertarungan pasar. “Ya, inilah kenyataan. Mari menikmati ‘pasar’ dan semoga kita beruntung,” tegasnya.

Adapun Direktur Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilai penurunan harga BBM hanyalah akal-akalan pemerintah untuk kemudian mencabut subsidi BBM jenis premium yang banyak dikonsumsi rakyat.

“Ini akal bulus pemerintah untuk meliberalisasi harga minyak. Kelihatannya hebat menurunkan harga BBM, padahal saat ini memang harga minyak dunia lagi turun,” ujarnya.

Pencabutan subsidi, kata Marwan, sangat berbahaya karena bisa mencekik secara pelan-pelan. “Manakala harga minyak normal lagi di kisaran 90-100 dolar per barel, maka harga BBM jenis premium bisa mencapai Rp11 ribu/liter karena tak ada subsidi,” ucapnya.

Pada kesempatan lain, pakar ekonomi politik dari Universitas Indonesia Ichsanuddin Noorsy mengatakan, liberalisasi kebijakan energi Indonesia memang masuk ke

sector hulu dan hilir. Sumber-sumber migas nasional juga sejak lama dikuasai pemain-pemain asing.

“Penguasaan PT Pertamina (Persero) terhadap migas negara hanya 14,6 persen minyak serta 11,6 persen gas. Sisanya dikuasai perusahaan asing seperti Chevron, Total, Shell dan sebagainya. Kalau di hilir sudah jelas liberalisasi dan inilah yang namanya pengingkaran terhadap Pasal 33 UUD ayat 2 dan 3,” ujar Ichsanuddin.

Wakil Ketua DPR RI Komisi VII Satya W Yudha juga menyebut pemerintah Jokowi-JK secara nyata melanggar Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 bahwa menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar bertentangan dengan konstitusi.

“Semua yang berhubungan dengan harga domestik harus ada intervensi pemerintah. Tidak boleh dilepas ke pasar, harus pakai harga patokan. Kalau tidak begitu maka setiap hari harga premium dapat berubah dan akan meresahkan masyarakat,” tukas Yudha.

Permainan Antara Petral dan ISC

Menjelang peringatan tahun baru 2015, Kepala RTKM Faisal Basri mengeluarkan rekomendasi tentang kinerja PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Salah satu bagian dari rekomendasi itu menyatakan bahwa peran Petral terkait tender penjualan dan pengadaan impor minyak



mentah dan BBM dikembalikan ke Integrated Supply Chain (ISC).

Ketua Tim RTKM Faisal Basri mengatakan, ISC akan bertugas mengadakan lelang pengadaan minyak mentah dan BBM. Lelang itu pun bisa di Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di dalam negeri, sehingga auditor dan penegak hukum seperti BPK, KPK dan lain-lain dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Namun ada jejak aneh dibalik rekomendasi ini. Sehari setelah rekomendasi diumumkan, ternyata satu anggota RTKM, Daniel Purba langsung ditunjuk menjadi VP ISC, padahal Daniel sebelumnya pernah menjadi VP dari Petral. Di sisi lain, ISC merupakan lembaga lama yang dibentuk oleh mantan Dirut Pertamina, Ari Soemarno pada 2008. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga

pernah menjadi VP ISC pada masa itu.

Koordinator Indonesia Energy Watch Syarief Rahman Wenno mengatakan, semua rekomendasi RTKM tentang Petral dan ISC sudah melenceng jauh dari realisasi janji kampanye Jokowi-JK dalam memberantas mafia migas. Dia mengingatkan, ISC sempat disebut sebagai ladang empuk para mafia migas lantaran memiliki kuasa dalam penjualan minyak mentah dan pengadaan BBM untuk kebutuhan lokal. Bahkan, ketika Karen Agustiawan menjadi Dirut Pertamina, lembaga itu sempat dibubarkan akibat disorot oleh Pansus Angket BBM DPR.

“Rekomendasi RTKM agar dilakukan pengalihan kewenangan dari Petral ke ISC adalah isyarat bahwa penilaian publik terhadap Petral yang menjadi basis bermain

mafia migas telah terkonfirmasi dengan sendirinya,” tandas Syarief.

Pemangkasan kewenangan Petral, lanjut dia, bukanlah cara untuk memutus mata rantai mafia migas. Pasalnya, ISC dalam melakukan tender impor minyak masih tergantung terhadap Petral mengenai mekanisme pasar minyak dunia dan peran barunya sebagai intelijen pasar, apalagi jika Petral kembali memenangi tender yang dilakukan oleh ISC.

“ISC dan Petral hanya bertukar peran. Makanya Petral dan ISC harus dibekukan karena fungsinya hanya memperpanjang jalur distribusi sehingga impor BBM dan *crude oil* menjadi lebih mahal. Mestinya Pertamina bisa langsung impor ke penjual/produsen, seperti menjalin kerjasama dengan Angola negara produsen minyak,” tandas Syarief.

■ M. Sahlan

Pertamina Diundang Garap Blok Migas Timor Leste



Pemerintah Timor Leste mengundang PT Pertamina (Persero) untuk melakukan eksplorasi di blok-blok minyak dan gas bumi negara tersebut. Kerjasama ini adalah kemajuan, mengingat selama ini Pertamina masih sebatas mengimpor minyak dari Indonesia untuk didistribusikan di Timor Leste.

Menteri Senior dan Menteri Urusan serta Kerja Sama Luar Negeri Timor Leste Jose Luis Guterres mengatakan, pihaknya mengundang Pertamina untuk

mengembangkan bisnis dengan melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi di Timor Leste.

"Kami mengundang Pertamina, bersama negara-negara yang sudah ada sebelumnya seperti Australia, Amerika Serikat dan Italia," ujar Guterres di Jakarta, Januari 2015.

Selain Pertamina, Guterres juga mengajak sektor-sektor swasta Indonesia untuk ikut dalam mengembangkan bisnis pertambangan di negaranya. "Kami membuka tender internasional untuk blok-blok sumber daya mineral. Untuk itu kami mengundang perusahaan-perusahaan swasta Indonesia bergabung ke dalamnya," tegasnya.

Guterres menyebut kerja sama ekonomi Indonesia - Timor Timur sudah terjalin cukup lama dan mencakup dalam beberapa bidang, seperti pembangunan infrastruktur. Potensi minyak dan gas bumi di timor leste sangat besar. Kondisi ini membuat sumber utama pendapatan di negaranya berasal dari industri pertambangan yang usahanya dikendalikan oleh negara. / Ismed Eka

ICW: Indikasi Mark Up Harga BBM Mencapai Rp 2,4 Triliun

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi penetapan harga BBM dan LPG 12 kg untuk bulan Januari 2015 lebih mahal dari harga seharusnya. Indikasi pemahalan atau *mark up* yang ditemukan ICW mencapai Rp 2,479 triliun, dan ini bisa menjadi celah penyimpangan dan korupsi yang dimanfaatkan pihak tertentu.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, indikasi *mark up* itu mengacu pada metode perhitungan yang ada serta realisasi harga pasar untuk BBM dan LPG. "Kita belum tahu, apakah ini karena

kesengajaan atau ketidakhati-hatian dalam perhitungan," kata Firdaus di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Januari 2015.

Jika dipetakan, lanjut dia, maka akan diketahui bahwa pihak yang memiliki rantai distribusi LPG, pengusaha SPBU, maupun pengusaha LPG sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki relasi politik dan dekat dengan kekuasaan.

"Apakah selisih kelebihan ini akan jadi ajang pembagian *margin*. Ini patut dipertanyakan," tandasnya.

/Nebby Habiburrahman

Pamor 'Bersih' Faisal Basri Memudar?

Faisal Basri selama ini diidentikkan sebagai sosok yang bersih dan sangat tegas memberantas mafia. Dia pun ditunjuk

Presiden Joko Widodo menjadi ketua Tim



Isu Merger PGN-Pertagas Kembali Berembus

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Pertagas sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) didesak agar segera *merger* atau melebur menjadi satu. Tujuannya agar aksi usaha dua perusahaan negara ini tidak tumpang tindih

dalam menjalankan *core* bisnis masing-masing.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, mengatakan selama ini PGN dan Pertagas seolah berebut lahan bisnis di sektor hilir, sedangkan sektor hulu cenderung kurang mendapat fokus.

"Kalau dileburkan anak PGN misalnya fokus mengurus gas di



Reformasi Tata Kelola Migas (RKTm). Dalam perkembangannya, kinerja RKTm yang dipimpin Faisal Basri mendapat penilaian kurang baik dari sejumlah kalangan, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Kinerja RKTm yang dipimpin Faisal Basri itu belum maksimal,” kata Koordinator Divisi Monitoring and Analisis ICW, Firdaus Ilyas dalam sebuah acara di Jakarta, Januari 2015.

Penilaian ini tentu tidak asal *jeplak*. Ilyas mendasari pendapatnya dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang seolah mengesampingkan data primer. “Sudah ada temuan minor, ada beberapa rilis formal dan informal tetapi belum efektif,” cetus Ilyas.

Dalam kesempatan ini, ICW juga merilis hasil analisisnya tentang

penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, serta harga gas elpiji 12 kg yang baru saja dinaikkan. Ada potensi pemahalan harga terkait penetapan harga BBM jenis premium mencapai Rp1,440 triliun dan solar sebesar Rp 909,9 miliar.

“Meskipun pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium dan solar, namun sesungguhnya Pemerintah telah menjual harga dua jenis BBM tersebut di atas harga yang seharusnya,” kata Ilyas.

Pada Januari 2015, Ilyas menjelaskan, harga keekonomian BBM jenis premium berada di angka Rp7.013,67 per liter. Sedangkan pemerintah menjual dengan harga Rp 7.600 per liter. Artinya, penetapan harga premium versi pemerintah berpotensi lebih mahal sebesar

Rp586,33 per liter.

Adapun BBM jenis solar harga keekonomian pada Januari 2015 berada pada level Rp6.607,53 per liter. Akan tetapi Pemerintah menjual dengan harga Rp7.250 per liter setelah menambahkan komponen PPN dan PBBKB.

Dari perhitungan ICW, subsidi solar yang diberikan Pemerintah tidak Rp1.000 per liter. Tetapi hanya Rp303,18 per liter. Angka ini didapat dari asumsi harga solar yang dijual ke pasaran Rp7.250 per liter dikurangi PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (Rp 7.250 – PPN – PBBKB) - Rp 6.607,53).

“Secara keseluruhan potensi pemahalan harga terkait penetapan harga BBM jenis premium mencapai Rp1,440 triliun dan solar sebesar Rp 909,9 miliar.” / *Ismed Eka*

sektor hilir, sedangkan Pertagas masuk ke sektor hulu,” ucap Satya dalam sebuah acara di Jakarta, Januari 2015.

PGN sendiri merupakan perusahaan negara yang sudah go publik. Porsi saham pemerintah di perusahaan yang kode PGAS ini sekitar 51% sedangkan sisanya milik publik. Jika nantinya PGN dilebur dengan Pertagas, maka porsi saham pemerintah akan meningkat. Namun di sisi lain Pertamina tak lagi memiliki anak usaha sekelas Pertagas yang selama ini sudah eksis mengurus bisnis gas negara.

Peleburan antara PGN dan Pertagas sendiri memang kerap ditentang kedua belah pihak. Di sisi lain, dua perusahaan negara ini tampak sering berebut proyek penjualan gas. Bahkan dua perusahaan ini kerap saling klaim sebagai pihak yang berjasa dalam pembangunan pipanisasi atau infrastruktur gas.

Rencana peleburan PGN dan Pertagas sendiri merupakan isu lama yang tercetus sejak Menteri BUMN dijabat Dahlan Iskan. Namun *merger* ini tak terealisasi hingga kembali digulirkan di era pemerintahan Joko

Naik-Turun Harga BBM Makin Sering Terjadi

Naik turun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan semakin sering dirasakan masyarakat. Selain akibat turunnya harga minyak mentah dunia, juga karena pemerintah memutuskan untuk melepas tata niaga energi ke mekanisme pasar.

“Ada berkah dari Allah SWT. Tapi sebentar lagi kembali turun harga BBM. Kisarannya menjadi Rp 6.400-Rp 6.500 per liter,” ujar Jokowi dalam acara Indonesia Outlook 2015 di Jakarta, pertengahan Januari 2015.

Dalam tiga bulan terakhir, pemerintah sudah tiga kali mengubah harga BBM. Dimulai dari pertengahan November 2014 ketika pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium dari 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Serta minyak solar dinaikkan dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 7.500 per liter.

Memasuki bulan Januari 2015, pemerintah dua kali menurunkan harga BBM, yakni dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter, dan terakhir adalah ketika Jokowi mengatakan ada kemungkinan



menurunkan kembali harga BBM hingga ke level Rp 6.500 per liter.

Jokowi mengakui, penurunan harga ini konsekuensi dari turunnya harga minyak dunia. Harga minyak patokan Amerika, WTI Oil sempat menyentuh level USD 45 per barel.

Terkait pernyataan Jokowi tentang penurunan harga BBM hingga Rp6.500, Menteri ESDM, Sudirman Said malah menilai harga yang disebutkan Presiden Jokowi baru harga dasar. Artinya belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), ditambah margin usaha.

“Adapun untuk minyak solar formulanya adalah harga dasar ditambah PPN, ditambah PBBKB, dikurangi subsidi Rp 1.000/liter,” tandasnya. / *Ismed Eka*



Javier Yanez berdiri di balkon rumahnya dimana ia menggantung bendera AS dan Kuba di Old Havana Kuba, Jumat 19/12/2014.

RUJUK AS - KUBA SESUDAH 54 TAHUN EMBARGO

Lewat normalisasi hubungan, Amerika Serikat dan Kuba membuka babak baru dalam hubungan kedua negara yang berbeda ideologi itu. Tetapi seberapa jauh rakyat Kuba mendapat manfaat dari perkembangan baru ini, masih harus dilihat.

Tanggal 17 Desember 2014 menjadi hari bersejarah bagi Amerika Serikat dan Kuba, dua negara yang kontras berbeda ideologi. Yang pertama adalah dedengkot kapitalis, sedangkan yang kedua adalah pengusung setia ideologi sosialis-komunis. Kedua negara selama puluhan tahun terlibat dalam “perang dingin.” Bahkan hubungan kedua negara tidak lantas membaik ketika komunisme runtuh di Eropa, yang diawali dengan pembongkaran Tembok Berlin pada 1989.

Di era Perang Dingin 1960-an, Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro menjadi sekutu dekat Uni Soviet. Waktu itu, Kuba nyaris terlibat dalam ajang perang nuklir antara dua negara adidaya, AS lawan Soviet. AS yang

dipimpin Presiden John F. Kennedy mengultimatum Soviet, yang dipimpin Nikita Khrushchev, agar menarik kembali rudal-rudal nuklirnya yang mau ditempatkan di Kuba.

Bagi Kennedy, penempatan rudal nuklir Soviet di wilayah Kuba, yang oleh AS dianggap sebagai “halaman belakang AS,” secara de facto adalah sebuah pernyataan perang oleh Soviet. Maka tuntutan Kennedy tidak bisa lagi ditawarkan. Untunglah, Khrushchev masih berpikiran waras. Pemimpin partai komunis Soviet ini membatalkan penempatan rudal nuklir di Kuba, dengan kompensasi penarikan rudal AS dari Turki, sehingga dunia pun selamat dari kehancuran.

Semua kenangan lama itu sirna, ketika pada waktu serentak,

17 Desember 2014, Presiden AS Barack Obama dan pemimpin Kuba Raul Castro –adik almarhum Fidel Castro-- mengumumkan langkah-langkah baru, untuk menormalisasikan hubungan kedua negara. Obama mengumumkan paket kebijakan komprehensif, berupa langkah-langkah yang akan dilakukan AS terhadap Havana. Ini berarti membuka halaman baru dari kebijakan lama yang terbukti gagal dalam mengisolasi dan menghukum Kuba. AS kini memilih melakukan “pelibatan konstruktif” (*constructive engagement*) terhadap Kuba.

Kebijakan isolasi yang gagal

Langkah awalnya adalah memudahkan izin bepergian dari

dan ke Kuba, serta kemudahan pengiriman uang dari AS ke Kuba. Disusul dengan langkah yang lebih signifikan, seperti pertukaran tahanan, pemulihan hubungan diplomatik, perluasan perdagangan dan perjalanan bagi lebih banyak warga Amerika, pelonggaran restriksi keuangan dan telekomunikasi, dan tindakan-tindakan lain untuk mendukung rakyat Kuba.

AS sudah 54 tahun memberlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba sebagai bagian dari permusuhan lama zaman Fidel Castro berkuasa. Embargo itu saat ini tidak serta merta bisa dicabut oleh Obama, yang dari Partai Demokrat, karena harus sepersetujuan Kongres AS, yang akan dikuasai kubu Republik mulai Januari 2015.

Puluhan tahun kebijakan isolasi AS terhadap Kuba telah gagal mencapai tujuan, yakni pemberdayaan rakyat Kuba untuk membangun sebuah Kuba yang terbuka dan demokratis, tentunya menurut versi AS. Tak jarang, kebijakan AS terhadap Kuba itu justru mengisolasi AS sendiri dari mitra-mitra di tingkatan regional dan internasional, dan menghambat kemampuan AS untuk mempengaruhi hasil-hasil kebijakan politik luar negeri di kawasan bersangkutan.

Kebijakan isolasi oleh Washington itu juga merusak peluang bagi pemanfaatan piranti-piranti yang tersedia di AS, untuk mendorong perubahan positif di Kuba. Sejak Fidel Castro berkuasa di Kuba pada 1961, semua kebijakan luar negeri AS ternyata hanya berdampak kecil terhadap Kuba. Terus-menerus bersikeras mempertahankan kebijakan yang gagal itu, jelas tindakan sia-sia.

Kebijakan lama AS, agar Kuba runtuh atau menjadi “negara gagal,” itu ujung-ujungnya tidak menguntungkan AS, dan juga tidak menguntungkan rakyat Kuba. Dari pengalaman panjang, Washington tahu, lebih baik mendorong dan mendukung reformasi di Kuba

daripada memaksakan kebijakan yang akan menghasilkan sebuah negara gagal, yang akhirnya justru membebani warga negara bersangkutan. Padahal niat awal Washington adalah untuk “menolong rakyat Kuba.”

Pendekatan ke Kuba, yang akan dilakukan Obama di tahun 2015, bisa dirinci sebagai berikut: Pertama, pemulihan hubungan diplomatik dengan Kuba, yang putus sejak pihak komunis berkuasa, Januari 1961. Obama sudah membuka kembali kontak-kontak dengan Havana, untuk membuka kembali kedutaan AS di Havana, mungkin dalam beberapa bulan mendatang. AS juga akan bekerjasama dengan Kuba dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, seperti: migrasi, narkoba, proteksi lingkungan, lalu-lintas orang, dan sebagainya.

Kedua, Obama ingin memberdayakan rakyat Kuba secara lebih efektif, lewat penyesuaian berbagai regulasi. AS telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perjalanan dan kebijakan pengiriman uang, yang akan mengembangkan lebih jauh kontak orang-ke-orang, dukungan ke masyarakat madani di Kuba, dan peningkatan arus bebas informasi ke, dari, dan antara rakyat Kuba sendiri.

Mengembangkan independensi ekonomi

Pemerintah Obama akan memfasilitasi peningkatan perjalanan ke Kuba, di mana warga Amerika akan bisa mendukung pertumbuhan masyarakat madani di Kuba secara lebih mudah. Misalnya, melalui organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO). Juga, memberikan pelatihan bisnis untuk kalangan swasta dan para petani kecil Kuba. Warga AS juga dapat memberikan dukungan lain bagi pertumbuhan sektor swasta Kuba yang sedang berkembang.

AS akan mengizinkan peningkatan penjualan dan ekspor barang dan jasa tertentu dari AS ke Kuba. Peningkatan ini akan

diarahkan ke pemberdayaan sektor swasta Kuba, serta memudahkan warga negara Kuba untuk memiliki akses terhadap barang-barang yang berharga lebih murah. Tujuan Washington adalah mengembangkan standar kehidupan mereka dan agar warga Kuba itu meraih independensi ekonomi yang lebih besar dari negara. Washington juga akan mengizinkan warga AS mengimpor tambahan barang-barang dari Kuba.

Selain itu, AS akan memprakarsai upaya-upaya baru untuk meningkatkan akses komunikasi warga Kuba dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara bebas. Penetrasi Internet di Kuba saat ini adalah sekitar 5 persen, salah satu tingkatan penetrasi yang paling rendah di dunia. Biaya telekomunikasi di Kuba juga luar biasa tinggi, sementara layanan yang ditawarkan sangat terbatas. Kini penyedia jasa telekomunikasi akan diizinkan untuk mengadakan mekanisme-mekanisme yang diperlukan, termasuk membangun infrastruktur di Kuba, untuk memberikan layanan telekomunikasi komersial dan Internet.

Sesudah sekian lama, Washington menyadari, perubahan di Kuba tidak bisa dipaksakan dari luar. Pada akhirnya, adalah rakyat Kuba sendiri yang akan menggerakkan reformasi ekonomi dan politik. Inilah sebabnya Obama mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan arus sumberdaya dan informasi ke warga negara biasa Kuba pada 2009, 2011, dan 2014. Langkah-langkah Obama ini diharapkan juga akan membuka jalan, dalam menghidupkan kembali kepemimpinan dan pengaruh AS di kawasan tersebut, khususnya menyambut Konferensi Tingkat Tinggi Amerika (the Summit of Americas) yang dijadwalkan berlangsung pada April 2015.

Reaksi warga Kuba umumnya positif

Menyambut normalisasi hubungan AS-Kuba, reaksi rakyat awam di Kuba umumnya sangat positif. Hal itu disaksikan sendiri

oleh Richard Feinberg, pengajar ekonomi politik internasional dari Universitas California, San Diego, AS. Saat itu, Feinberg kebetulan sedang menghadiri konferensi tentang hubungan AS-Kuba di Akademi Diplomati Kuba di Havana, ketika Barack Obama dan Raul Castro—pada waktu serentak dan sama-sama disiarkan secara langsung—mengumumkan pemulihan hubungan kedua negara.

Ketika Raul Castro berpidato dalam siaran langsung lewat televisi, banyak warga Kuba bersorak riuh dua kali. Pertama, ketika Castro—yang berpakaian lengkap dengan seragam militer bintang limanya—mengumumkan pembebasan tiga “pahlawan” Kuba oleh otoritas AS. Ketiganya sebelumnya ditangkap dan dipenjara oleh AS dengan tuduhan melakukan kegiatan mata-mata. Kedua, warga Kuba bahkan bersorak lebih riuh, ketika Castro mengumumkan langkah pemulihan hubungan diplomatik.

Di akhir siaran itu, banyak warga Kuba yang meneteskan air mata karena gembira. Mereka secara spontan berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaannya. Seorang akademisi berkomentar, “Akhirnya, mimpi buruk yang panjang berakhir. Sebuah babak baru sejarah telah dibuka.”

Jalan-jalan di Havana dengan cepat ramai dipenuhi oleh kerumunan massa, khususnya para siswa, yang merayakan pengumuman itu. Mereka berpawai dengan meriah dengan membawa bendera Kuba. Sedangkan warga Kuba biasa berjalan dengan senyum di wajahnya. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di sana-sini, untuk membicarakan kabar yang mengejutkan tersebut.

Warga Kuba dengan gencar membahas pergeseran kebijakan tersebut. Mayoritas memuji la valentia (keberanian) kedua presiden, dan bertanya-tanya apakah Obama akan secara pribadi berkunjung ke Kuba, di mana tak diragukan lagi ia akan disambut sebagai seorang pahlawan. Sebagian besar warga



Sejumlah rakyat Kuba melambaikan tangan dari bus yang melewati sedang melewati bagian Vedado Havana, Kuba, 17/12/2014.

Kuba berpendapat, pelonggaran embargo terhadap Kuba—yang selama puluhan tahun diterapkan oleh Washington—akan berdampak nyata pada peningkatan standar kehidupan mereka.

Kelompok oposisi Kuba terbelah

Namun ada sebagian warga Kuba yang tetap skeptis. Setelah selama bertahun-tahun dalam kondisi ekonomi yang tertekan, mereka tidak mudah percaya pada politisi dan tak mau berharap muluk-muluk. Yang lainnya mengambil sikap “tunggu dan lihat.” Sedangkan yang lainnya khawatir, kubu Kuba-Amerika yang keras kepala di Kongres AS akan menghambat pelonggaran embargo ekonomi.

Sedangkan kelompok oposisi Kuba dengan cepat terbelah dua. Kelompok pembangkang garis keras—sesudah mulai bisa menyesuaikan diri sejak kabar mengejutkan tersebut—menekankan bahwa sebetulnya tidak ada yang berubah. Mereka beranggapan, dengan normalisasi hubungan AS-Kuba itu Obama bertindak sangat keliru, karena secara tak langsung telah mengakui kediktatoran Raul Castro.

Sedangkan kubu oposisi lain

menyambut pergeseran hubungan AS-Kuba itu seperti membuka ruang yang tak terduga sebelumnya bagi suatu tindakan politik. Sedangkan di pojok lain spektrum politik Kuba, ada sedikit kelompok yang mengkritik Castro, karena memulihkan hubungan AS-Kuba tanpa terlebih dahulu menuntut pencabutan total embargo ekonomi, yang selama ini menjadi basis negosiasi Kuba.

Tak diragukan lagi, langkah-langkah pelonggaran ketentuan bagi warga AS asal Kuba untuk boleh berkunjung dan mendukung sanak kerabat mereka di Kuba memberi dampak positif bagi kedua pihak. Bagi komunitas asal Kuba dalam pengasingan, hal ini akan memperbarui ikatan mereka dengan keluarganya di Kuba lewat cara yang nyata, serta melemahkan posisi generasi lebih tua, yang bersikeras menentang kontak apapun dengan Kuba yang komunis.

Memang, ada perbedaan pandangan antar-generasi di kalangan komunitas warga AS asal Kuba. Generasi yang belakangan datang dapat memanfaatkan kelonggaran signifikan, untuk pulang ke kampung halamannya di Kuba dengan membawa uang dan barang, yang nilainya bisa miliaran dollar AS.

Makin banyak warga AS asal Kuba yang memberi suara untuk Obama, yang dengan sukses mengeluarkan ancaman veto terhadap upaya anggota Kongres asal Florida, yang ingin mengaktifkan lagi peraturan lama. Florida adalah wilayah AS yang paling banyak menampung warga asal Kuba. Kunjungan-kunjungan tingkat tinggi ke Kuba dari kalangan bisnis, anggota Kongres, agamawan, akademisi, dan media Amerika telah berlangsung. Jadi, memang sudah ada perubahan cara pandang yang signifikan terhadap relasi dengan Kuba.

Reformasi ekonomi yang signifikan

Bagi Havana sendiri, langkah-langkah Obama pada masa jabatannya yang pertama merupakan darah segar bagi ekonomi Kuba yang sedang bermasalah. Pada 2008, Raul Castro mencermati rancangan bagi serangkaian reformasi ekonomi yang signifikan, yang berusaha mempertahankan sosialisme sambil memperkenalkan bentuk-bentuk baru mekanisme berbasis pasar.

Pemerintah Havana mulai memberi izin pada warganya untuk membuka bisnis-bisnis kecil, untuk membeli dan menjual properti dan mobil (90 persen warga Kuba memiliki rumah sendiri), untuk memiliki telepon seluler, dan untuk mendirikan koperasi, baik yang terkait ataupun di luar pertanian. Uang yang berasal dari diaspora Kuba bukan hanya membantu rata-rata warga Kuba dalam mengatasi situasi jaring pengaman sosial yang menyusut, tapi juga membantu membuka bisnis-bisnis baru dan merenovasi properti.

Rezim Havana menyadari bahwa kelangsungan hidupnya tergantung pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berbasis beragam (diversifikasi). Kuba tidak bisa lagi sekadar mengandalkan pemberian yang disubsidi dari Venezuela dan sekutu-sekutunya. Kuba mulai mendiversifikasikan hubungan-hubungan ekonomi, mengebor ladang minyak lepas pantai (yang belum begitu sukses), dan membuka

pintu bagi investasi asing. Hal ini terutama dibantu oleh keputusan Brazil, untuk membantu menanggung pengembangan sebuah pelabuhan modern dan zona perdagangan khusus di Mariel.

Untuk politik domestik AS sendiri, isu hubungan AS-Kuba ini jelas amat penting. Kebijakan AS terhadap Kuba selalu kontroversial, dan selalu ada penentangan yang keras di dalam Kongres AS jika pemerintah ingin mengubah kebijakan. Di sisi lain, opini publik AS ke arah Kuba sudah bergeser, khususnya perubahan itu dapat dilihat dari garis penyikapan berdasarkan demografis dan perbedaan generasi.

Pada awal 2014, 56 persen dari seluruh warga AS dan 63 persen dari warga Florida mendukung ke arah peningkatan hubungan AS-Kuba. Penggunaan otoritas eksekutif oleh Presiden Obama untuk pemulihan hubungan diplomatik dengan Kuba dan liberalisasi ikatan-ikatan ekonomi menciptakan peluang historis bagi revitalisasi relasi-relasi di Amerika Latin, meski juga ada beberapa risiko.

Dukungan Amerika Latin melemah

Sejak 1990-an, dukungan Amerika Latin pada kebijakan AS terhadap Kuba di kawasan itu telah merosot. Bahkan konsensus yang awalnya disepakati bersama, sebagaimana tertera pada Komisi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan Piagam Demokratis Amerika, telah melemah dalam tahun-tahun terakhir.

Hal ini berarti sebagian besar negara-negara Amerika Latin tidak lagi bisa menerima pandangan bahwa kurangnya demokrasi adalah landasan yang sah, untuk tidak melibatkan Kuba dalam lembaga-lembaga di kawasan itu. Lembaga-lembaga tersebut, seperti: Organisasi Negara-negara Amerika (Organization of American States) atau KTT Amerika (Summit of the Americas).

Para pemimpin negara di kawasan tersebut telah menegaskan

hal ini pada Presiden Obama di KTT Amerika di Cartagena pada 2012. Situasi memang tidak berpihak ke Washington. Bahkan jika Obama tidak mengumumkan langkah bersejarah ke arah pemulihan hubungan AS-Kuba, isu pengucilan Kuba tampaknya akan kembali menjadi fokus perselisihan di KTT Amerika di Panama pada 2015.

Dengan pemulihan kembali hubungan AS-Kuba, AS telah mencabut isu yang selama ini dipersengketakan dan menjadi duri dalam hubungan AS dengan Amerika Latin. Isu relasi AS-Kuba selama ini telah mengalihkan perhatian dari bidang-bidang kolaborasi yang lebih positif antara AS dan Amerika Latin.

Kebijakan normalisasi hubungan AS-Kuba ini memberi ruang bagi AS untuk terlibat secara lebih produktif dengan Amerika Latin pada agenda yang lebih luas, termasuk KTT kunci dengan topik demokrasi dan hak asasi manusia, kompetisi global, energi, lingkungan hidup, dan inklusi sosial. Semua isu ini bisa meningkatkan kekuatan lunak (soft power) AS di kawasan tersebut, yang telah merosot dalam dasawarsa terakhir.

Dari sudut pandang lain, keterbukaan Kuba terhadap produk-produk AS mungkin juga bisa berarti negatif untuk rakyat Kuba. Layanan kesehatan dan pendidikan gratis di Kuba sejauh ini adalah salah satu sistem sosial terbaik bagi Amerika. Layanan itu selama ini telah dinikmati oleh warga Kuba. Namun, mungkin layanan ini akan terancam oleh sistem privatisasi neoliberal yang disodorkan oleh AS.

Sesudah embargo ekonomi AS selama 54 tahun, Kuba terbukti tetap bertahan berkat dukungan solidaritas internasional. Yang dibutuhkan Kuba sekarang adalah akses bebas ke pasar-pasar internasional, di luar AS dan tidak tergantung pada AS. Kuba memang perlu berintegrasi ke suatu sistem finansial dan moneter yang independen, jadi bukan malah meresmikan ketergantungan baru pada imperium AS.



TEROR YANG MEREKATKAN EROPA



Presiden Prancis Francois Hollande (Ketiga dari kiri) dikelilingi oleh kepala negara (Dari kiri ke kanan: Benjamin Netanyahu (Israel), Ibrahim Boubakar Keita dari (Mali), Angela Merkel (Jerman), Presiden Uni Eropa Council Donald Tusk, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas saat mereka menghadiri *Marche Republicaine* di jalan-jalan Paris pada 11/1.

Place de la Republique selalu menjadi pertanda pergolakan di Paris, Prancis. Disana berdiri patung Marianne, Dewi keadilan dan kebebasan berdiri tepat di tengah pusara. Minggu 11 Januari lalu tidak akan dilupakan oleh warga Eropa. Sebanyak 1 juta orang memadati Place de La Republique untuk melawan aksi terorisme yang membuat Paris mencekam pasca penyerangan kantor majalah satire Charlie Hebdo. Pada penyerangan tanggal 7 Januari lalu itu 12 orang tewas ditangan kakak beradik Cherif Kouachi dan Said Kouachi. Serta lima orang tewas dalam aksi penyanderaan took swalayan komunitas Yahudi Amedy Coulibaly.

Ketiga pelaku memang kemudian tewas dalam penyergapan yang dilakukan aparat keamanan, satu hari sebelum jutaan orang menggelar aksi protes terhadap kekerasan terror tersebut. Minggu itu 3,7 juta orang turun ke jalan. Sebanyak 1,6 juta memadati Place de la Republique. Jutaan orang lainya juga menggelar aksi di kota Nice, Toulouse, Pau, Nantes, Lyon, Marseille, Lille, dan Lyon.

Dalam aksi tersebut pimpinan dunia berbaur mengutuk tindakan kekerasan yang mengguncang Eropa tersebut. Presiden Perancis Francois Hollande, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, Ratu Rania Abdullah dari Jordania, Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, hingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas tampak bergandengan mengikuti aksi tersebut.

Aksi dimulai dengan mengheningkan cipta selama satu menit. Setelah itu, massa bergerak dari Place de la Republique menuju Place de la Nation sambil meneriakkan kata "liberte" (kebebasan) dan "Charlie" yang merujuk pada Charlie Hebdo. Kerabat dari korban penembakan di Charlie Hebdo terlihat memimpin aksi ini.

Sejumlah spanduk yang dibentangkan pun memperlihatkan tujuan aksi untuk menolak takut

terhadap segala macam bentuk teror. Misalnya saja spanduk bertuliskan "Saya orang Perancis dan saya tidak takut". Ada juga spanduk bertuliskan, "Tinta yang harusnya mengalir, bukan darah".

Aksi tersebut merupakan yang terbesar di Paris melebihi sambutan rakyat Paris usai memenangi piala dunia. Aksi simpatik itu bahkan merekatkan banyak pihak yang tengah berkonflik. Palestina dan Israel misalnya. Namun tetap saja kondisi di Paris saat ini tetap penuh waspada. Setidaknya sebanyak 15.000 personil kepolisian dikerahkan untuk memperketat keamanan di wilayah rawan. Menteri Pertahanan Jean-Yves le Drian mengatakan, 10.000 personel militer akan dipanggil pada Selasa (13/1/2015) untuk mulai melaksanakan tugasnya mengamankan kawasan-kawasan "sensitif" karena meningkatnya ancaman terhadap Perancis. "Ini adalah kali pertama tentara kita dimobilisasi besar-besaran di dalam negeri," kata Le Drian yang tidak membeberkan lokasi-lokasi yang dianggap sensitif.

Seperti diketahui pasca serangan di kantor Charlie Habdon sejumlah masjid di kota Paris dirusak. di kota Le Mans, di sebelah barat Paris. Pada Kamis (8/1/2015) lewat tengah malam, tiga buah granat "kosong" dilemparkan ke sebuah masjid. Serangan itu tak menimbulkan korban, tetapi mengakibatkan kerusakan kecil, termasuk sebuah lubang di salah satu jendela masjid.

Serangan berikutnya terjadi di distrik Port-la-Nouvelle, dekat kota Narbonne, Perancis selatan. Sekelompok orang menembaki sebuah masjid tak lama setelah tempat itu digunakan untuk menggelar ibadah shalat. Kantor kejaksaan setempat mengatakan, serangan itu tak menimbulkan korban karena saat serangan terjadi masjid itu sudah kosong. Sementara pada Kamis pagi, sebuah ledakan terjadi di sebuah warung kebab di dekat sebuah masjid di kota Villefranche-sur-Saone, di wilayah timur Perancis, juga tidak menimbulkan korban.

Tokoh Masyarakat Papua Kecewa dengan Penunjukan Presdir PT Freeport

Tokoh masyarakat Amungme, Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin mengatakan warga Papua sangat kecewa dan menyesal dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia yang menunjuk Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menggantikan Rozik B Soetjipto.

Menurutnya, sejak awal masyarakat Papua menghendaki salah satu tokoh Papua akan memimpin PT Freeport Indonesia, setelah perusahaan tambang emas dan tembaga itu beroperasi selama 48 tahun di tanah adat Amungme dan Kamoro.

Namun ironisnya, suara orang Papua sama sekali tidak didengar dan diperhitungkan oleh para pemegang saham, utamanya James Robert Moffet selaku pimpinan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc dan Presiden RI Joko Widodo.

"Kami betul-betul kecewa dan sangat menyesal seakan-akan suara kami orang Papua sama sekali tidak didengarkan. Kami mempertanyakan, apa yang Moffet dan Jokowi pikirkan untuk orang Papua. Perusahaan ini sudah datang mengambil tambang, menghabiskan kami punya gunung-gunung, membuat rusak semua lingkungan, dan masyarakat terpinggirkan," katanya.

Putra almarhum Moses Kilangin, salah satu tokoh utama di balik peristiwa penandatanganan dokumen 'Januari Agreement' 1974 itu



mempertanyakan apakah setelah hampir 50 tahun Freeport beroperasi di Papua tidak ada seorang pun figur setempat yang bisa memimpin Freeport.

Padahal semua posisi penting dalam pemerintahan di Papua saat ini entah gubernur, bupati, wali kota dan lainnya diduduki putra-putri asli Papua.

"Apakah betul orang Papua tidak punya kemampuan. Ukurannya apa? Toh semua provinsi dan kabupaten/kota di Papua dipimpin oleh anak-anak asli. Masa tidak ada satu orang Papua pun untuk perusahaan ini," kata dia.

Diyakini penunjukkan Maroef Sjamsuddin, seorang purnawirawan Marsekal Muda TNI AU yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014 itu sebagai Presdir PT Freeport Indonesia, tidak lepas dari campur tangan Jokowi.

"Saya yakin terpilihnya Pak Maroef ada pesan khusus dari Jokowi. Kalau memang demikian, mungkin Jokowi punya kepedulian terhadap orang Papua dengan cara yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Presdir PT Freeport Indonesia yang baru Maroef Sjamsuddin, usai terpilih di Jakarta beberapa hari lalu, berharap dapat bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan sejalan dengan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua.

"Saya menerima kesempatan untuk memimpin PT Freeport Indonesia. Ini merupakan saat yang paling menarik bagi PT Freeport yang akan mengembangkan tambang baru di Papua yang akan memberikan banyak manfaat bagi karyawan, masyarakat setempat, pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan sepanjang beberapa dekade yang akan datang," kata Maroef.

ant./Karel Stefanus Ratulangi

2015, Pemkab Lebak Gelar Pilkades Serentak di 226 Desa

Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Apip Saepudin mengungkapkan pihaknya akan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak di 226 desa pada 2015. Secara teknis, pelaksanaan Pilkades ini nantinya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa.

Menurutnya, pelaksanaan pilkades serentak tetap dilaksanakan tahun 2015 sesuai dengan jadwal yang ditentukan pemerintah daerah juga sesuai harapan masyarakat.

Saat ini kepala desa dijabat sementara oleh pegawai negeri sipil yang ditunjuk pihak kecamatan. Karena itu, roda pemerintah desa perlu dijabat secara definitif sehingga berdampak terhadap pelayanan publik masyarakat desa.

"Kami berharap pemerintah Daerah segera menerbitkan Perda tentang desa sehingga dapat dilaksanakan pilkades secepatnya," katanya, Rabu (14/1).

Pelaksanaan pilkades serentak, lanjutnya, merupakan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014.

Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 diantaranya diterbitkan perda tentang desa sebagai payung hukum Pilkades tersebut.

Saat ini, jumlah desa di Kabupaten Lebak tercatat 340 desa dan lima kelurahan. Dari 340 desa itu, Pilkades dilaksanakan serentak di 226 desa.



ant./Karel Stefanus Ratulangi

Penyaluran Alokasi Dana Desa di NTB Tidak Sesuai Aturan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan teguran terhadap beberapa kabupaten di daerah itu karena memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai ketentuan Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang desa.

"Semestinya dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dialokasikan kepada desa. Tetapi, kenyataannya di dalam APBD 2015 yang diajukan keempat kabupaten tidak sesuai dengan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa," kata Kepala Biro Keuangan Setda NTB Hj Putu Sehely Handayani, Kamis (15/1).

Daerah itu diantaranya adalah Pemda Lombok Tengah, Bima,



Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam APBD 2015 yang diajukan Kabupaten Lombok Tengah hanya mengalokasikan Rp24,324 miliar lebih, padahal seharusnya Rp97,007 miliar lebih. Begitu juga dengan Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya Rp18,700 miliar lebih, tetapi Rp2,661 miliar lebih.

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Utara seharusnya Rp6,874 miliar lebih, tetapi hanya mengalokasikan Rp4,307 miliar lebih. Kemudian,

Kabupaten Bima Rp3,048 miliar lebih, tetapi Rp2,242 miliar lebih.

"Malah Kabupaten Dompu tidak sama sekali mengalokasikan dana desa di APBD, semestinya ada alokasi sebesar Rp2,103 miliar," ujarnya.

Menurut Putu, pemerintah desa bisa menuntut pertanggungjawaban pemerintah kabupaten karena dianggap telah lalai dengan tidak mengalokasikan dana desa tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

"Inilah mengapa kami kemudian menolak dan meminta agar APBD 2015 yang diajukan kelima kabupaten untuk segera direvisi ulang, karena tidak sesuai dengan porsi anggaran untuk ADD," tegasnya.

Jika pemerintah kabupaten tetap ngotot tidak mengalokasikan ADD sesuai dengan yang ada, maka Pemerintah Provinsi tidak akan pernah menyetujui APBD 2015 kelima kabupaten tersebut. ant /Karel Stefanus Ratulangi

Anggota Polda Metro Asyik Indehoi

Detik-detik pergantian tahun baru diwarnai insiden memalukan korps Bayangkara. Adalah Iptu Manung Pamuji Tri, perwira administrasi dan urusan tata usaha (Pamin Urtu) Subbag Renmin Rosapras Polda Metro Jaya pelakunya.

Pamuji menyelingskuhi istri Kanitlantas Polsek Kelapa Dua Resta Tangerang Ipda Samsul Hadi, yakni Endang Martini. Kedua pelaku melampiasikan hasrat terpendamnya pada hari pergantian tahun baru di Hotel Mega Anggrek, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (31/12).

"Iya ada, ditangani langsung Polda Metro," ucap Kanit PPA Polres Jakarta Barat, Kopol Slamet, Jumat (2/1) pekan lalu.

Aksi perselingkuhan Pamuji dengan Endang dipergoki langsung oleh suaminya, Ipda Samsul, sekitar pukul 23.00 Wib. Yakni disaat keduanya check in di kamar hotel nomor 424. Ipda Samsul menggerebek keduanya bersama jajaran Sipropam Restro Jakbar.

Ipda Samsul selanjutnya melaporkan perselingkuhan istrinya tersebut ke Mako Restro Jakarta Barat dengan Laporan Polisi No: LP/01/K/1/2015/PMJ/Restro Jakbar, tertanggal 1 Januari 2015. / Andy Abdul Hamid



DBD, Tiga Orang Meninggal Dunia di Sampang

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Firman Pria Abadi mengatakan bahwa tiga orang meninggal dunia akibat terserang demam berdarah dengue (DBD) sejak awal Januari 2015.

"Jumlah penderita DBD yang meninggal dunia ini mulai 1 Januari hingga 15 Januari 2015, hari ini," kata Firman di Sampang, Madura, Jatim, Kamis (15/1).

Jumlah warga meninggal dunia

akibat terserang DBD ini sama dengan jumlah korban meninggal dunia akibat penyakit yang sama selama 2014, yakni tiga orang.

Sementara, jumlah total warga yang terserang DBD mulai 1 Januari hingga 15 Januari 2015 atau selama 15 hari sebanyak 30 orang dan tiga diantaranya meninggal dunia.

Pada bulan yang sama tahun sebelumnya, yakni selama Januari 2014, jumlah warga Sampang yang terserang DBD sebanyak 41 orang.

"Jadi jumlah penderita selama setengah bulan saja pada bulan ini, hampir menyamai jumlah penderita selama satu bulan tahun lalu," katanya.

Meski sebanyak tiga orang telah meninggal dunia, namun Dinkes Sampang belum menyatakan kasus DBD ini sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Alasannya, karena mewabahnya DBD di Bangkalan ini bukan di daerah endemis, akan tetapi di daerah baru.

ant /Karel Stefanus Ratulangi

Polandia Belum Sirna

Dhia Prekasha Yoedha



Jika ada negara paling naas itulah Polandia. Negeri asal musisi romantik Friedrich Chopin ini ditimpa nestapa beruntun lima abad. Polandia yang dikenal berbendera kebangsaan putih merah mirip bendera Indonesia terbalik, memiliki lagu kebangsaan berjudul "Polandia Belum Sirna" yang dalam Bahasa Inggris berbunyi:

*Poland has not yet died, So long as we still live.
What the alien power has seized from us, We shall recapture with a sabre.
March, march, Dąbrowski, To Poland from the Italian land.
Under your command, We shall rejoin the nation.*

Polandia semasa awal Perang Salib karena dianggap belum memeluk Kristen, acap diserbu Teutonic Knight bentukan Jerman yang melatih para rahib jadi unit tempur. Begitu terpukul pasukan Muslim di Palestina, pasukan Salib beralih perhatian ke Eropa Timur. Lewat penaklukan, Teutonic Knight menyebarkan agama Kristen ke wilayah Baltik maupun pedesaan di kawasan hutan yang kelak jadi Prusia.

Kala itu Polandia sempat jaya dipimpin Raja Persemakmuran Polandia-Lithuania, Jan III Sobieski. Pada 12 September 1683 dengan 30.000 tentara, Jan membantu 100.000 pasukan Kekaisaran Habsburg, Austria, lolos dari kepungan 140.000 pasukan Ottoman pimpinan Kara Mustafa Pasha. Siege Wina oleh Ottoman sejak 14 Juli, sukses dihalau Winged Hussar unit kavaleri tangguh Jan.

Perang Austria Ottoman itu jadi titik balik 300 tahun konflik kerajaan-kerajaan Eropa Tengah dengan Ottoman. Sepanjang 16 tahun setelah Siege Wina, Habsburg bisa merebut wilayah selatan Hongaria dan Transilvania dari Ottoman. Sehingga pengaruh Ottoman pun kian menciut redup dan sirna tahun 1923.

Sebaliknya sejak akhir abad 17, Polandia 43 kali diserbu negara tetangga. Tahun 1655 Swedia dibantu pasukan Tartars dan Cossacks menghancurkan Polandia. Penduduknya susut dari 10 juta tinggal 6

juta orang. 1700 Rusia, Prusia, dan Austria berperang memperebutkan Polandia dan menganeksasi jadi tiga bagian yang dikuasai mereka bertiga. 1793 Rusia tetangga di timur laut dan Prusia tetangga di sisi Barat, menguasai setengah Polandia. 1795 Negara bangsa Polandia sirna hingga 123 tahun kemudian.

1870 Rusia coba melenyapkan budaya Polish dengan mewajibkan Bahasa Rusia. 1890 Akibat kemiskinan berjuta orang Polandia beremigrasi, Sekitar 4 juta dari 22 juta imigran Amerika Serikat berasal dari Polandia.

1915 Perang Dunia 1 sebagai *buffer zone* (penyangga) dari tiga negara tetangga, Polandia diperebutkan Rusia, Jerman (Prusia) dan Austria untuk tapal pengaman. 1919 Perang Polandia-Rusia. 1926 Pilsudski jadi diktator Polandia. 1930 Polandia, Jerman dan Uni Soviet (Rusia) menandatangani pakta tidak saling serang. 1939 Jerman dipimpin Adolf Hitler dan Uni Soviet dipimpin Joseph Stalin menyerbu Polandia.

1940 Katyn Massacre oleh NKVD polisi rahasia Uni Soviet pimpinan Lavranti Pavlopitsy Beria. Korban sesuai dokumen deklasifikasi Soviet tahun 1990, diperkirakan 21.857 interniran Polandia dieksekusi sejak 3 April di barat Byelorusia dan Ukraina. Mereka adalah kaum militan yang menolak gagasan negara Polandia Soviet. 1941 Selama 3 tahun diduduki Nazi Jerman, terjadi penghilangan paksa 3 juta intelektual Polandia. 1941 Nazi juga melenyapkan 5 juta Gentile penduduk Polandia non Yahudi dan non Ibrani..

1945 Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris, menyetujui Polandia diserahkan kepada Uni Soviet.

1990: Inflasi besar-besaran memicu kelahiran serikat buruh independen Solidarnoch di Gdansk yang dipimpin Lech Walesa. Reformasi di Polandia ini berimbas meruntuhkan Tembok Berlin, membebaskan negara-negara Eropa Timur dari Pakta Warsawa. Terakhir 2010, tragis pesawat yang membawa Presiden Polandia jatuh di Rusia.

Apa yang bisa dipetik dari hikmah sejarah nasib negara bangsa yang dianggap sial ini? Polandia Belum Sirna.

Under your command, We shall rejoin the nation. ■



POLITIK INTERNASIONAL EKONOMI-BISNIS
URBANITAS **AKTUALISASI** TEKNOGET
OTOMOTIF **MASYARAKAT!** SOSIAL
WARISAN BUDAYA HUKUM OLAH RAGA JAJAN-JAJAN
ENERGI OASE KEHIDUPAN

POLITIK HUKUM EKONOMI-BISNIS SOSIAL OLAHRAGA OASE KEHIDUPAN
URBANITAS WARISAN BUDAYA JALAN-JAJAN OTOMOTIF TEKNOGET
INTERNASIONAL HUSANTARA ENERGI

"faktual
tak
membual"

AKTUAL
COVER YOUR
WORLD



aktual
NETWORK

Magazine
Online News
Internet TV

<http://WWW.AKTUAL.CO>
<http://www.facebook.com/aktualco>
<http://www.twitter.com/aktualco>